

# BANTEN SME



[www.bantenisme.com](http://www.bantenisme.com)

JILID 2

**Editor:**

**Anis Fuad,**

**Kandung S. Nugroho**



**Penulis :**

*Agus Sjafari, Riny Handayani, Rangga Galura Gumelar,  
Deviani Setyorini, dkk, Muhammad Jaiz dkk, Rd.Nia Kania &  
Neka Fitriyah, Ima Maisaroh & Titi Stiawati, Rina Yulianti &  
Rahmawati, Yeni Widyastuti & Arenawati, Anis Fuad.*



**FISIP Untirta Press**



**Anis Fuad &  
Kandung S. Nugroho**

# **Bantenisme**

**Jilid 2**

**FISIP Untirta Press**

**Nopember 2012**

# **BANTENISME**

## **Jilid 2**

### **Editor:**

Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho

### **Desain Sampul:**

ridvan@indosain.com

### **Tata Letak:**

AnisFuad

### **Penerbit:**

FISIP Untirta Press

Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan

Serang, Banten, Indonesia 42122

site: <http://www.fisip-untirta.ac.id>

email: [ict@fisip-untirta.ac.id](mailto:ict@fisip-untirta.ac.id)

booksite: <http://www.bantenisme.com>

Cetakan I: Nopember 2012

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh  
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**ISBN 978-602-97365-6-4 (no.jil lengkap)**

**ISBN 978-602-97365-8-8 (jil.2)**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelesaian buku serial Kebantenan ini yang berjudul Bantenisme. Serial Pertama berjudul Bantenesia yang sudah terbit pada bulan Februari yang lalu menjadi awal dari serial seri Kajian Kebantenan di FISIP Untirta. Kemudian dilanjutkan dengan Buku Bantenisme yang saat ini ada di tangan anda. Buku Bantenisme terdiri dari dua jilid. Buku yang sedang anda baca ini merupakan buku jilid ke-2 (dua) yang berisikan kumpulan tulisan hasil penelitian beberapa dosen yang ada di FISIP Untirta ini. Buku ini dipublikasikan juga dalam versi online yang tersajikan di situs <http://www.bantenisme.com>.

Buku Bantenisme Jilid 2, merupakan sebuah proses evolusi dan refleksi berfikir yang tidak akan berakhir. Buku ini merupakan proses pembelajaran yang membuka ruang diskusi

terbuka bagi seluruh kalangan tentang apa dan bagaimana Banten serta perkembangannya.

Provinsi Banten mempunyai keunikan tersendiri, Banten menyimpan potensi yang luar biasa, potensi ekonomi, potensi budaya. Banten penuh dengan sumberdaya, namun senyatanya Banten dapat dikatakan tertinggal dari daerah lainnya. Nampaknya Banten sedang mendapatkan kutukan Sumber Daya, di satu sisi begitu mudah dan strategisnya Banten dari berbagai aspek namun disisi lain Banten tidak dapat beranjak dari masalah-masalah klasik dari rendahnya SDM, Ketertinggalan dalam tingkat Pendidikan, Kemiskinan dan Minimnya infrastruktur yang dapat membangkitkan ekonomi masyarakatnya. Buku ini terdiri dari banyaknya potongan *puzzle* beberapa masalah yang terdapat di Banten dan menawarkan berbagai solusi untuk memperbaiki beberapa masalah yang ada di Banten. Adapula beberapa kasus yang terjadi di daerah lain dan dapat menjadi refleksi bagi pemecahan permasalahan yang sama di provinsi Banten. Selamat membaca dan semoga bermanfaat, Amin.

Tim Editor

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Wajah Kemiskinan Masyarakat Pesisir Banten (Kasus di Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang Banten) <i>Oleh: Agus Sjafari</i> .....	1
Pergeseran Tenaga Kerja Antar Sektor dan Tingkat Kesenjangan Antar Wilayah di Provinsi Banten <i>Oleh: Riny Handayani</i> .....	23
Makna Dibalik Sebuah Headline dan Objek Gambar: Analisis Semiotika Pemberitaan “Walikota Cilegon Diperiksa KPK” <i>Oleh: Rangga Galura Gumelar</i> .....	39
Pusat Layanan Internet Kecamatan dan Perilaku Pencarian Informasi Kaum Muda <i>Oleh: Deviani Setyorini, Andin Nesia &amp; Yearry Panji S</i> .....	55



Konstruksi Pemikiran Islam Tentang Pluralisme dalam Film “Tanda Tanya (?)” <i>Oleh: Muhammad Jaiz, Husnan Nurjuman &amp; Yoki Yusanto.....</i>	85
Efektivitas Kolom Kabar Civitas Akademika Untirta Terhadap Citra Realitas Untirta di Masyarakat <i>Oleh: Rd. Nia Kania &amp; Neka Fitriyah .....</i>	109
Majelis Tak’lim sebagai Media Pendidikan Non Formal Wanita (Studi Majelis Tak’lim At-Takwa Ciwaktu Kota Serang) <i>Oleh: Ima Maisaroh &amp; Titi Stiawati.....</i>	135
Citra Politik Perempuan di Kota Cilegon <i>Oleh: Rina Yulianti &amp; Rahmawati .....</i>	151
Analisis Persepsi Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi (Studi Kasus di FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) <i>Oleh: Yeni Widyastuti &amp; Arenawati.....</i>	161
<i>Website Usability</i> Provinsi Banten <i>Oleh: Anis Fuad .....</i>	187



**WAJAH KEMISKINAN MASYARAKAT  
PESISIR BANTEN**  
(Kasus di Desa Banten Kecamatan Kasemen  
Kota Serang Banten)  
*oleh : Agus Sjafari*

**Pendahuluan**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia bergerak melakukan perubahan secara terus menerus dan dilakukan secara bertahap ke arah kemajuan dan perbaikan seluruh aspek kehidupan bangsa. Pembangunan yang menyeluruh memberikan gambaran bahwa pembangunan harus dilaksanakan di seluruh tanah air secara merata serta dirasakan hasil dan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan secara nasional merupakan segala upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara sesuai ketentuan umum dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada dasarnya, semua pembangunan yang dilakukan ditujukan untuk masyarakat. Sumber daya manusia merupakan aset paling penting yang dimiliki negara. Oleh

karena itu, pembangunan manusia seutuhnya dewasa ini penting menjadi prioritas dalam pembangunan di Indonesia, disamping pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang berhasil akan dicapai hanya jika didukung oleh pembangunan manusia yang berhasil pula. Pembangunan masyarakat merupakan konsep yang lebih luas dari pembangunan manusia itu sendiri. Secara lebih luas, pembangunan masyarakat merupakan suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dimana dituntut adanya keterlibatan atau peran serta masyarakat.

Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar, baik itu sumber daya daratan maupun sumber daya lautan yang sangat melimpah. Letak geografis serta kekayaan sumber daya itulah yang seharusnya dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kekayaan alam seperti halnya kandungan mineral, potensi ikan, nilai pariwisata laut dengan terumbu karang yang luas, gas serta energi yang menyebar di seluruh wilayah nusantara, dimana dua pertiga adalah lautan. Memberi justifikasi terhadap hadirnya Indonesia sebagai negara maritim di dunia, baik secara ekonomi maupun budaya.

Dengan kata lain, Indonesia adalah negara yang kuat, makmur dan sejahtera akan tegak bila negeri ini dibangun berdasarkan visi maritim atau kepulauan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kreatif dan terdidik serta didukung oleh kebijaksanaan pemerintah (Kamaluddin, 2002 : 40). Melihat kondisi obyektif yang demikian tersebut, sudah saatnya apabila proses pembangunan di Indonesia lebih menitikberatkan kepada pembangunan berbasis kelautan atau maritim. Konsep pembangunan yang selama ini lebih menitikberatkan kepada pembangunan wilayah darat sudah mengalami degradasi yang amat sangat. Hal ini disebabkan karena pesatnya pertumbuhan penduduk. Di sisi lain proses pembaharuan sumber daya alam yang ada di darat sangat

terbatas. Oleh karena itu sangatlah logis apabila terdapat reorientasi pembangunan berbasis sumber daya maritim.

Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi baru yang ada di Indonesia merupakan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas pembangunan yang berbasis kelautan atau maritim. Secara obyektif wilayah Banten memiliki luas wilayah yang dikelilingi oleh pantai dan pelabuhan. Dengan demikian secara obyektif wilayah tersebut memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar dibandingkan dengan potensi daratannya.

Salah satu problematika yang sangat krusial dalam pembangunan wilayah pesisir dan Banten adalah kondisi masyarakat yang sangat terbatas baik dilihat dari beberapa aspek antara lain aspek ekonomi yang sangat terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, kultur masyarakat yang cenderung negatif, tingkat partisipasi masyarakatnya yang rendah dan beberapa problematika lainnya. Di samping problematika yang berasal dari dalam diri masyarakatnya juga dipengaruhi oleh peran dari beberapa pihak terkait yang masih tergolong rendah antara lain masih rendahnya kepedulian dari pihak - pihak terkait seperti peran pemerintah, pihak swasta, NGO (*Non Government Organization*), lembaga pendidikan tinggi serta beberapa pihak lainnya.

Hal ini yang juga terjadi di Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang. Sebagai salah satu wilayah pesisir yang ada di Kota Serang kondisi sosial ekonominya sangat mengkhawatirkan. Mengacu kepada kondisi riil tersebut tulisan ini akan mendeskripsikan kondisi riil beberapa aspek yang ada di Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang Banten, antara lain dilihat dari aspek pendidikan, Perilaku ekonomi masyarakat, dan kondisi sosial ekonomi.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : “ Bagaimanakah

kondisi kemiskinan masyarakat pesisir dilihat dari aspek pola pendidikan keluarga, perilaku ekonomi, dan kondisi sosial budaya di Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang ?”.

### **Problematika Masyarakat Pesisir Banten**

Masyarakat pesisir Desa Banten pada dasarnya terdiri dari masyarakat yang tingkat pendapatan dan penghasilan ekonominya relatif rendah. Rendahnya tingkat penghasilan dan pendapatan ekonomi keluarga pesisir dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: 1) Rumah yang tidak permanen; 2) kualitas kesehatan yang sangat buruk; 3) lingkungan keluarga yang tidak sehat; 4) kualitas makanan/kalori yang dikonsumsi tidak memadai dari sisi kesehatan dan sebagainya (Sjafari, 2010)

Rendahnya pendapatan dan penghasilan ekonomi keluarganya dikarenakan oleh rendahnya atau belum berkembangnya perilaku masyarakat pesisir tersebut. Rendahnya atau belum berkembangnya perilaku masyarakat pesisir tersebut ditandai oleh: 1) tingkat pengetahuan yang rendah dikarenakan tingkat pendidikannya yang rendah; 2) Sikap mental masyarakatnya yang masih tradisional tanpa disertai oleh keinginan untuk maju dan berkembang; serta 3) Keterampilan yang tidak memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari.

Kehidupan masyarakat pesisir Desa Banten tersebut mengakibatkan kehidupannya yang terasing baik secara sosial, ekonomi maupun politik; secara sosial mereka tetap teridentifikasi sebagai masyarakat marginal (terpinggirkan) dan tidak memiliki modal sosial yang memadai untuk dapat bersaing dengan masyarakat lainnya yang memiliki modal sosial dan modal ekonomi yang besar.

Rendahnya tingkat penghasilan masyarakat pesisir di Desa Banten, yang berdampak terhadap rendahnya

kesejahteraan mereka menempatkan mereka (masyarakat pesisir) sebagai masyarakat yang tingkat kemandiriannya tergolong rendah. Artinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebenarnya mereka masih sangat membutuhkan uluran tangan serta bantuan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan ekonomi yang lebih, misalnya saja orang kaya, pihak pemerintah, pihak swasta dan lain sebagainya. Tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut, menjadikan mereka semakin tidak berdaya dan dalam kondisi yang sangat kekurangan. Dengan demikian guna membangun kemandirian masyarakat pesisir tersebut, sangatlah perlu ditunjang oleh proses pemberdayaan yang intensif bagi masyarakat pesisir tersebut.

### **Potret Kemiskinan Desa Banten**

Potret kemiskinan di Desa Banten ini akan dideskripsikan kondisi Desa Banten dilihat dari beberapa aspek antara lain : pola pendidikan, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial budaya masyarakat di Desa Banten.

### **Pola Pendidikan Masyarakat**

Masyarakat Desa Banten memiliki sosial kultural nelayan, karena mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan atau pengusaha ikan. Hal ini tidak dapat di pungkiri karena mengingat letak wilayahnya secara geografis dengan dermaga/pelabuhan. Secara historis pelabuhan Karang Mulya-Desa Banten ini dahulunya sebagai pelabuhan Internasional, terutama mengalami kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Walaupun tak seramai dahulu, pelabuhan Karang Mulya tetap menjadi pusat aktifitas kelautan di wilayah Kota Serang dengan kondisi yang relatif kecil.

Salah satu hal yang menarik dari daerah ini adalah penduduknya berasal dari suku yang berbeda-beda dan sangat

beragam (*heterogen*). Warga Karang Mulya ada yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Tionghoa dll. Sehingga tidak heran jika hal ini daerah Karang Mulya- Desa Banten memiliki kultur yang berbeda-beda, tetapi mereka hidup berdampingan bersama-sama dengan menjunjung toleransi antar sesama.

Upaya mendalami aspek pendidikan keluarga atau masyarakat yang ada di Desa Banten dapat di lihat ke dalam beberapa bagian aspek yang telah dikaji seperti:

#### **a. Tingkat pendidikan formal**

Tingkat pendidikan formal keluarga atau masyarakat dapat dilihat dari jenjang tingkatan pendidikan yang di tempuh masyarakat melalui lembaga- lembaga pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Manengah Atas), D3, S1 dan sebagainya. Mengutip pendapat Darmelawati (1994) yang berpendapat bahwa pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang berlangsung secara teratur dan bertingkat mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat.

Melalui sekolah-sekolah masyarakat dididik, di Desa Banten masyarakatnya cenderung hanya mengutamakan pendidikan formal di tingkat dasar dan paling banyak masyarakatnya adalah lulusan SD, dimana jumlah sarana-prasarana pendidikan atau jumlah Sekolah Dasar di Desa Banten memang paling banyak di banding SMP, atau yang lainnya. Semakin tinggi tingkat jenjang pendidikan formal yang harus di tempuh, berbanding terbalik dengan antusiasme masyarakat yang semakin berkurang dalam menyekolahkan anak- anak mereka setelah tingkat sekolah dasar.

Padahal lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah dapat berfungsi mengurangi pengendalian beban orang tua: 1) Melalui pendidikan sekolah, orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah; 2)

Menyediakan sarana untuk pengembangan, sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangunan di masyarakat; 3) Sekolah juga bisa menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan atau lebih dari status orang tuanya; 3) Dapat memperpanjang masa remaja, pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya.

### **b. Tingkat pendidikan non formal**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan mengenai pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang.

Umumnya pendidikan nonformal paling banyak pada saat usia dini, kemudian pendidikan dasar seperti misalnya TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran yang banyak dijumpai di masjid-masjid untuk yang beragama islam dan Sekolah Minggu di gereja untuk yang beragama kristen atau katolik. Disamping hal tersebut di atas juga ada berbagai kursus, ada juga bimbingan belajar, juga program yang dilaksanakan pemerintah dalam aspek pendidikan nonformal seperti Keaksaraan fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan (paket A, B, C) dan lain-lain.

Namun di masyarakat Desa Banten nampaknya belum ada campur tangan dari pemerintah setempat dalam pengadaan sistem pendidikan nonformal bahwasanya di tempat mereka belum pernah ada kegiatan pendidikan-pendidikan di luar pendidikan sekolah (formal) untuk masyarakat di Desa Banten sendiri. Namun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan masyarakat setempat sudah ada seperti halnya pengajian, seperti TPA, kalau untuk pelatihan-pelatihan pun masih jarang, masyarakat cenderung berlatih

menjaring sendiri belajar dari suaminya dengan membuat jaring-jaring ikan, dan lain sebagainya.

### **c. Pengaruh pendidikan terhadap profesi keluarga/masyarakat**

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan dimana pendidikan baik formal maupun nonformal dapat menopang kehidupan masyarakat untuk dapat kehidupan yang lebih baik. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung pendidikan memberikan pengaruh besar terhadap tingkat pekerjaan atau profesi seseorang sehingga berpengaruh juga terhadap tingkat kesejahteraannya. Masyarakat Desa Banten dengan mayoritas tingkat pendidikan yang masih rendah, dan paling banyak hanya lulusan Sekolah Dasar, tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap profesi pekerjaan masyarakatnya justru factor potensi daerah yang memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat yaitu sebagai nelayan karena potensi laut atau pelabuha.

Masyarakat yang tinggal di Desa Banten ini lebih banyak berprofesi sebagai nelayan atau pencari ikan, karena letaknya berada di daerah perairan atau pesisir pantai. Sebagai daerah nelayan yang memiliki potensi perikanan yang relatif banyak, maka biasanya masyarakat setempat menangkap ikan dengan menggunakan jaring. Seperti halnya masyarakat di Desa Banten banyak berprofesi sebagai nelayan atau hanya berprofesi sebagai pengepul ikan dari kapal-kapal nelayan. Masyarakat Desa Banten yang berpendidikan rendah hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari ikan dan menjualnya ke pengepul-pengepul atau menjadi pembuat dan pembersih jaring-jaring yang penghasilannya pun tidak seberapa. Sedangkan untuk masyarakat Desa Banten yang memiliki pendidikan tinggi lebih memilih mencari kehidupan di Kota.



Pada intinya pendidikan itu sangat penting seperti pendapat yang di kemukakan oleh Hummel (1977) dalam Sadulloh (2010), *Pertama*, pendidikan itu memberi kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan secara maksimum kepada individu maupun kelompok, untuk dapat hidup mandiri, dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. *Kedua*, pendidikan tersebut memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi, dengan memberikannya pendidikan dasar yang sama. *Ketiga*, dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya agar menjadi lebih baik dan mandiri.

#### **d. Penanaman pendidikan formal dalam keluarga**

Penanaman pendidikan formal dalam keluarga merupakan hal yang penting karena semua berawal dari keluarga, sejak anak dilahirkan keluargalah yang mendidik dan mengajarkan bagaimana harus bersikap dan mengajarkan mana yang baik dan yang buruk ketika anak masih kecil. Pendidikan formal itu sendiri juga penting, keluarga (ayah dan ibu) bertanggung jawab menyekolahkan anaknya atau memberikan pendidikan secara formal, karena dalam tatanan terkecil sebuah pendidikan sepenuhnya tanggung jawab keluarga.

Masyarakat di Desa Banten dalam penanaman pendidikan formal di keluarga nampaknya masih kurang karena para orang tua yang usianya sudah lanjut lebih cenderung membiarkan anaknya untuk mencari uang membantu ekonomi keluarga di banding pergi bersekolah setiap hari. Sedangkan orang tua yang usianya masih tergolong muda memang pemikirannya lebih maju dalam pendidikan. Mereka lebih dapat membuka pemikirannya bahwa pendidikan formal itu sangat penting untuk anak-anak mereka sehingga mereka mau

berkerja keras untuk semata-mata menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya agar menjadi lebih baik daripada orang tuanya. Seperti memasukan anak ke Play Group, Taman Kanak-kanak, masuk SD, SMP sampi terus SMA atau jenjang perguruan tinggi. Keluarga berkewajiban menanamkan pada jiwa anak untuk bersekolah, mengajarkan bagaimana jenjang-jenjang itu dapat di tempuh. Hingga akhirnya pendidikan menjadi sebuah prioritas di dalam keluarga.

#### **e. Penanaman pendidikan informal.**

Diluar pendidikan formal upaya pendidikan informal juga di terapkan di setiap aspek kehidupan yang berawal dari keluarga. Keluarga mengajarkan dan menanamkan perilaku yang baik, memberikan motivasi menjadi seseorang dapat berguna di masyarakat, menanamkan budaya untuk maju, mengajarkan bagaimana cara mendekati diri kepada Tuhan seperti mengaji dan beribadah, serta bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan material untuk mendewasakan dan memajukan anak. Seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.*

Penanaman pendidikan informal di masyarakat di Desa Banten sudah berjalan baik dengan ditanamkannya bagaimana cara saling membantu sesama terutama di dalam keluarga. Namun masih ada kekurangan yang dapat di simpulkan dari kehidupan masyarakat Desa Banten ini yang tergolong keluarga miskin. *Pertama*, pola pendidikan didalam keluarga miskin cenderung lebih permisif orang tua selalu membiarkan segala tindakan yang dilakukan anak, cara mendidik orang tua yang permisif dapat dilihat dari kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan terlalu membebaskan anaknya untuk melakukan hal-hal di luar lingkungan. Seperti masyarakat Desa Banten yang membebaskan dan membiarkan anaknya yang di

bawah umur lebih memilih mencari uang dengan cara apapun disbanding bersekolah. *Kedua*, Motivasi atau dorongan cinta kasih pada keluarga miskin nelayan, masih kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak, intensitas pertemuan anak dengan orang tua terutama ayah sangat jarang karena ayah lebih sering mencari ikan sehingga kurang memberikan nasehat kepada anaknya. *Ketiga*, Penanaman nilai keagamaan pada keluarga untuk menanamkan atau mengajarkan pada anak masih kurang, terlihat dari respon masyarakat yang masih jarang memasukan anaknya untuk mengikuti pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an atau TPA, serta banyaknya etnis masyarakat yang tinggal di Desa Banten ini walaupun masyarakat yang beragama islam lebih mendominasi.

### **Hambatan Pendidikan**

Kondisi pendidikan masyarakat di Desa Banten secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

*Pertama*, disebabkan oleh faktor *rasioanal economic*. tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan aspek penting dalam kelangsungan hidup masyarakat dan pendukung pendidikan sebagai aspek finansial. Berdasarkan observasi di lapangan pada umumnya bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Desa Banten masih rendah. Masyarakat hanya mengandalkan hasil penangkapan *lobster/rajungan* dan ikan dari laut, disamping sebagai penyedia jasa transportasi laut untuk masyarakat setempat yang akan menuju pulau-pulau disekitar daerah itu. Kondisi laut pun tidak selamanya baik terkadang masyarakat sulit mendapatkan ikan karena kondisi iklim atau cuaca yang tidak mendukung.

Sebagai daerah nelayan yang memiliki potensi perikanan yang relatif besar, maka biasanya masyarakat setempat menangkap ikan dengan menggunakan jaring. Jaring yang

digunakan untuk menangkap ikan perlu perawatan baik itu, menjahit maupun pembersihan jaring. Ketika jaring digunakan di laut untuk menangkap ikan maka banyak terdapat sampah dan kotoran yang menempel pada jaring, sehingga perlu di bersihkan. Biasanya nelayan menggunakan jasa pembersih yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu dan anak-anak dengan upah kisarannya mencapai 8.000 rupiah hingga 15.000 rupiah per orang dalam satu kali pembersihan jaring milik nelayan.

Ternyata hal ini menjadi daya tarik bukan hanya bagi ibu-ibu setempat tetapi bagi anak-anak kecil usia sekolah, sehingga dengan adanya peluang pekerjaan sebagai pembersih jaring dan ditambah dengan beban ekonomi yang cukup tinggi membuat anak-anak yang seharusnya usia sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak akhirnya lebih memilih menjadi pembersih jaring dan menjadi nelayan juga seperti para orang tuanya. Hal ini menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Banten.

*Kedua*, kurangnya dorongan atau *motivasi* keluarga. Peran keluarga merupakan sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan masa depan anak, karena keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak sebagai bagian dari anggota keluarga. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat di Desa banten banyak anak-anak yang putus sekolah dan bukan faktor dominan disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga, tetapi hal ini terjadi karena pengaruh lingkungan yang cenderung banyak bermain dan bermalas-malasan untuk sekolah. Kondisi lingkungan yang menarik perhatian anak-anak untuk ikut terlibat dalam aktifitas nelayan, menyebabkan anak-anak usia kurang memperhatikan pendidikannya. Sebenarnya halnya ini dapat diantisipasi melalui peran serta orang tua dan keluarga dalam memotivasi anak untuk tetap melanjutkan sekolah hingga selesai.

## Kondisi Ekonomi Keluarga

Dalam perhitungan Indeks Pembangunan manusia (*Human Development Indeks*) yang dipublikasikan oleh UNDP sejak tahun 1990 menyusun indeks komposit berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu : (1) angka harapan hidup (*life expectancy age*); (2) angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate: Lit*), dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling:MYS*); dan (3) daya beli masyarakat (*purchasing power parity*) yang merupakan ukuran yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, kondisi ekonomi seringkali menjadi indikator utama. Aspek ekonomi keluarga bisa dilihat dari beberapa indikator. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kondisi ekonomi keluarga di Desa Banten antara lain:

- a. Jumlah anggota keluarga/masyarakat;
- b. Jumlah pendapatan keluarga;
- c. Proses kegiatan sebagai pekerja (nelayan, petani, buruh tani, pedagang, dan lain-lain);
- d. Jumlah anggota keluarga yang ditanggung;
- e. Lokasi tempat tinggal; dan
- f. Lama bekerja kepala keluarga/masyarakat.

Secara umum kondisi ekonomi keluarga masyarakat bisa dikatakan relatif normal namun belum bisa dikatakan sejahtera. Di beberapa kampung yang ada di Desa Banten terdiri dari beberapa suku antara lain: suku bugis, suku sunda dan jawa. Suku bugis ini merupakan pendatang yang sebagian besar berasal dari Sumatra. Kedatangan mereka ke Desa Banten melalui proses perdagangan/pengiriman kayu dari pulau Sumatra.

Dari beberapa keluarga tersebut rata-rata anggota keluarganya berjumlah 5 orang. Sedangkan pendapatan keluarga dalam satu bulan rata-rata sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,-. Mata pencaharian warga Desa Banten terdiri dari

petani, nelayan, pedagang dan buruh pabrik penggilingan kayu. Sebagian besar para kepala keluarga di Desa Banten mata pencahariannya ialah sebagai buruh di pabrik penggilingan kayu, sedangkan istri mereka ada yang berjualan warung, ibu rumah tangga, dan ikut bekerja bersama suaminya di pabrik penggilingan kayu tersebut. Pekerjaan sebagai buruh pabrik penggilingan kayu tersebut sudah digeluti warga selama rata-rata kurang lebih 20 tahun.

Adapun anak-anak yang belum bisa bekerja atau orang tua yang sudah lanjut usia, merupakan tanggungan bagi keluarganya. Jumlah keluarga yang menjadi tanggungan kelaurga rata-rata berjumlah 3 (tiga) atau 4 (empat) orang.

Sebagai penduduk pesisir pantai, lokasi rumah warga di Desa Banten semuanya berada di dekat pantai. Tiap kompleks perumahan dilengkapi dengan jalan gang untuk memudahkan lalu lintas warga. Sehingga tempat tinggal mereka selain dekat pantai juga dekat dengan jalan.

### **Problematika Ekonomi Masyarakat**

Membahas permasalahan aspek ekonomi keluarga tentu akan kompleks sekali permasalahannya misalnya kurangnya lapangan kerja, kurangnya jumlah penghasilan, minimnya akses permodalan, rendahnya pendidikan warga, kondisi rumah yang tidak layak dan lain sebagainya. Sehingga pembahasannya bukan hanya berbicara dalam konteks ekonomi saja, namun akan berkaitan dengan masalah lainnya seperti pendidikan, sosial budaya dan juga kebijakan pemerintah.

Dari beberapa sumber menyatakan bahwa sebelum tahun 1998 desa Banten merupakan desa yang perekonomiannya sangat tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya para pengusaha kayu yang berasal dari Sumatra mengirim kayu ke pelabuhan Karangantu. Sehingga, banyak berdiri

pabrik penggilingan kayu dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sebagai (buruh pabrik penggilingan kayu).

Kayu yang berasal dari Sumatra kelebihannya ialah kualitasnya bagus dan harganya pun relatif lebih murah jika dibandingkan dengan kayu yang berasal dari Banten. Dengan demikian pendapatan masyarakat pun meningkat dan dirasakan sekali baik oleh pedagang, petani, buruh tani, buruh pabrik, nelayan dan semua masyarakat. Oleh karena itu jika dideskripsikan, maka roda perekonomian desa Banten saat itu berjalan dengan baik.

Namun pada pertengahan tahun 1998, pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan melakukan larangan dan penghentian pengiriman kayu dari Sumatra karena dianggap melakukan pelanggaran (*illegal logging*). Kebijakan ini sudah tentu berdampak terhadap penurunan aktivitas industri penggilingan kayu, banyak industri penggilingan kayu yang gulung tikar dan para buruh yang bekerja di pabrik tersebut pun menganggur. Bukan hanya dirasakan oleh para buruh pabrik kayu saja, namun kebijakan penghentian pengiriman kayu dari Sumatra pun berdampak terhadap para pedagang kecil, nelayan, dan masyarakat luas di Desa Banten pada umumnya. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan industri, para pengusaha kayu terpaksa mencari bahan baku ke daerah Pandeglang dan Lebak yang berasal dari perkebunan rakyat.

Selain kebijakan tersebut di atas, masalah lain yang berkaitan dengan melemahnya kondisi ekonomi keluarga di Desa Banten ialah adanya larangan dari pemerintah bagi nelayan yang menangkap ikan dengan pukat harimau (jaring yang besar). Alasannya ialah penggunaan pukat harimau dapat mengganggu ekosistem. Banyak para nelayan yang diberikan sanksi dan dipenjara. Dampak yang dirasakan ialah berkurangnya jumlah tangkapan ikan sehingga berkurang pula penghasilan mereka. Tidak berhenti disana, namun berkurangnya pendapatan nelayan ini pun menyebabkan

berkurangnya daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap kondisi mikro ekonomi di sekitar desa Banten. Oleh karena itu, saat ini kondisi pelabuhan Karangantu suasananya sepi ibarat sebuah pelabuhan mati.

Kemudian masalah lain mengenai kondisi ekonomi masyarakat ialah terkait akses permodalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa akses permodalan masih sulit dirasakan oleh masyarakat di Desa Banten. Padahal jika diberikan modal maka mereka dapat mengembangkan usaha atau kerajinan yang diharapkan mampu menambah pendapatan bagi keluarganya.

Sebelumnya, telah ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan kepada masyarakat Desa Banten. Namun program ini tidak berjalan dengan baik karena banyak anggota masyarakat yang tidak mengembalikan dana tersebut. Oleh karena itu Bank BRI selaku Bank penyalur dana KUR tidak berani untuk memberikan pinjaman/bantuan modal lagi kepada masyarakat. Bukan hanya Bank BRI saja, para Ketua RT serta aparatur Desa Banten pun tidak berani untuk mengajukan bantuan modal kepada masyarakat, dengan alasan khawatir dana tersebut macet.

### **Pengaruh Aspek Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Kemiskinan**

Kedua aspek ini (pendidikan dan ekonomi) merupakan dua aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap wajah kemiskinan masyarakat khususnya di Desa Banten. Pada aspek pendidikan, merupakan aspek yang sangat penting terkait dengan tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang memiliki nilai tambah bagi kehidupan keluarganya maupun bagi kehidupan masyarakat secara umum. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di sebuah negara atau masyarakat. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat



pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai *skill* atau paling tidak dapat membaca dan menulis (Dwisetiati, 2011).

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Bagi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, ia tidak akan mampu mengembangkan keterampilan di dalam mengembangkan dirinya dan keluarganya. Tingkat keterampilan masyarakat sangat terkait dengan sejauhmana ia memiliki tingkat pengetahuan yang luas mengenai sesuatu. Kebanyakan dari masyarakat Desa Banten yang pendidikannya rendah lebih banyak menggantungkan dirinya kepada orang lain atau pihak lain yang memiliki kepedulian kepada mereka. Kalaupun mereka memiliki pekerjaan, maka pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang kasar, karena pekerjaan pada taraf yang kasar tersebut tidak terlalu membutuhkan daya analisis dan kreatifitas yang tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Bagi masyarakat yang memiliki pendidikan rendah tersebut sangat rentan sebagai penyumbang terbesar terhadap kemiskinan masyarakat.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi

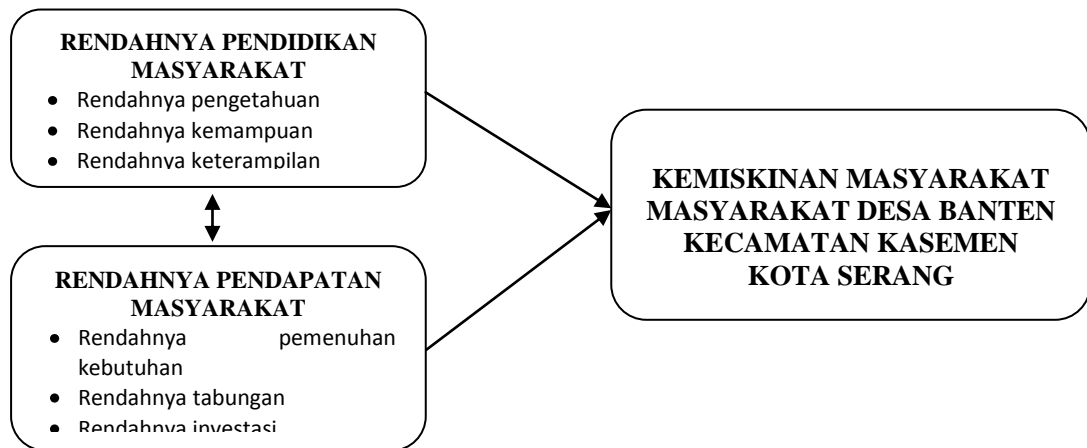
semangat untuk terus melakukan upayamencerdaskan bangsa (Criswardani Suryawati, 2005). Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2004). Dengan demikian pendidikan merupakan modal sosial yang sangat berharga di dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat dari jurang kemiskinan. Pendidikan akan memberikan arah yang jelas terhadap masyarakat untuk memperbaiki harkat dan martabatnya.

Pada sisi lain, kemiskinan juga sangat terkait dengan aspek ini. Aspek ini juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap tingginya tingkat kemiskinan khususnya di Desa Banten. Ketidakmampuan secara ekonomi seringkali melemahkan masyarakat untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Modal ekonomi seringkali menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat miskin untuk melakukan terobosan - terobosan baru dalam melepaskan diri dari kemiskinan.

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk akhirnya mengurangi tingkatkemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraanmasyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabilapengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakatdan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Adanya keterbatasan pendidikan dan ekonomi (pendapatan)

masyarakat semakin melengkapi terciptanya kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang Banten. Secara skematis hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kemiskinan masyarakat di Desa Banten adalah sebagai berikut:

Gambar Hubungan Aspek Pendidikan dan Pendapatan dengan Kemiskinan



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, di dalamnya terdapat rendahnya pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan masyarakat. Rendahnya ketiga aspek tersebut berpengaruh kepada semakin sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga pendapatan keluarga menjadi sangat terbatas. Sedangkan rendahnya pendapatan keluarga, di dalamnya menyangkut rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang layak, rendahnya tabungan masyarakat, dan rendahnya masyarakat untuk melakukan investasi. Dengan demikian kedua aspek tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan masyarakat di Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang.

## Penutup

Sebagai penutup dalam tulisan ini bahwa kemiskinan merupakan musuh bersama yang harus kita lawan bersama. Dua aspek pokok yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan khususnya masyarakat pesisir di Desa Banten adalah rendahnya pendidikan dan pendapatan masyarakat. Kedua aspek tersebut menjadi penyebab sempurnanya kemiskinan di desa tersebut. Kedua aspek tersebut menjadi penyebab terciptanya kemiskinan kultural pada masyarakat di Desa Banten. Kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan yang bersumber dari masyarakat yang diakibatkan karena rendahnya *need for achievement* (kebutuhan untuk berprestasi dan maju) dari masyarakat serta masih tingginya nilai - nilai negatif yang tumbuh di keluarga atau masyarakat sehingga mereka tidak mampu keluar dari kubangan kemiskinan. Aspek pendidikan dan ekonomi seringkali menjadi penopang utama terciptanya kemiskinan ini. Melalui pembahasan di atas diharapkan jenis kemiskinan apapun yang terjadi pada masyarakat pesisir Banten khususnya di Desa Banten akan terminimalisir.

## Daftar Pustaka

Agus Sjafari, 2010. *Keberdayaan Keluarga Miskin di Perkotaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidupnya: Kasus di Kotamadya Jakarta Utara dan Kota Bekasi Disertasi*. IPB Bogor.

Criswardani Suryawati, 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Jakarta: Gramedia

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008 , *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Jakarta : Litbang.Deptan.

Sadulloh, Uyoh. 2010. *Pendidikan (Ilmu Mendidik)*. Bandung: Alfabeta

Sadono Sukirno, 2004, *Makroekonomi Modern*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan*. Jakarta : Erlangga.

**Sumber lain:**

Darmelawati (1994) .<http://www.lpmj.org/?page=Artikel&id=31>. *Korkel LPMJ: Johar Baru*. [16 Desember 1994]



# PERGESERAN TENAGA KERJA ANTAR SEKTOR DAN TINGKAT KESENJANGAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI BANTEN

*Oleh : Riny Handayani*

## **Pendahuluan**

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang dinamis dalam jangka panjang dan menengah yang akan membawa dampak terhadap perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Transformasi sosial ekonomi tersebut dapat berupa pergeseran sektoral, kelembagaan, dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Tenaga kerja selalu dipergunakan dalam proses produksi sebagai unsur yang terlibat langsung dalam produksi suatu komoditi.

Provinsi Banten merupakan provinsi baru yang berdiri pada tahun 2000, maka provinsi ini masih mencari arah pembangunan yang tepat, untuk melihat arah pembangunan maka salah satu indikatornya adalah pembangunan ekonomi. Maju atau mundurnya pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari peluang kesempatan kerja. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari tingkat pengangguran.

Menurut data dari BPS, tingkat pengangguran di Provinsi Banten dari tahun 2001 sampai dengan 2010, perkembangannya

makin tinggi, dengan angka pengangguran rata-rata setiap tahunnya sebesar 12%. Sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya adalah sektor industri dan perdagangan. Sebab kedua sektor tersebut banyak membutuhkan tenaga kerja yang besar dan sektor yang dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah. Sedangkan untuk sektor pertanian pertumbuhannya relatif stagnan. Hal ini disebabkan karena input yang diterima oleh sektor pertanian tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. Tingginya tenaga kerja yang bekerja di sektor industri akan menyebabkan kelangkaan tenaga kerja di sektor lain terutama sektor pertanian. Kondisi demikian akan menyebabkan kesenjangan pembangunan diberbagai sektor. Kesenjangan tersebut juga akan berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan pengembangan wilayah.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah salahsatunya terjadi karena adanya perbedaan sumber daya. Kesenjangan dapat mengakibatkan dua sisi perekonomian suatu negara atau wilayah yang berbalikkan satu sisi sebagian wilayah akan mengalami pertumbuhan yang cepat sedangkan sebagian wilayah akan mengalami pertumbuhan yang lambat (miskin). Terjadinya kesenjangan antar wilayah di Provinsi Banten membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota. Karena itu, aspek kesenjangan pembangunan antar wilayah uga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

### **Pergeseran Tenaga Kerja Antar Sektor di Provinsi Banten**

Berdasarkan data Tahun 2010, Angka Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten sangat fluktuatif mencapai sekitar 1.275.800 Jiwa (sekitar 12%) yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2009 yaitu 952.362 Jiwa dari jumlah penduduk Banten yang mencapai 10.632.166 Jiwa.



Selengkapnya data TPT di Provinsi Banten adalah sebagai berikut : Kabupaten Pandeglang (10.98%), Kabupaten Lebak (13.42%), Kabupaten Tangerang (15.86%), Kabupaten Serang (14.45%), Kota Tangerang (15.57%), Kota Cilegon (18.26%), dan Kota Serang (17.55%).

Di Provinsi Banten, faktor yang mempengaruhi tingginya angka persentase pengangguran antara lain adalah pertumbuhan dan kualitas pertumbuhan ekonomi Banten yang belum optimal, berkurangnya minat penduduk bekerja disektor pertanian, dan kualitas SDM yang masih terbatas dan kurang kompetitif seperti masih tingginya usia angkatan kerja yang berpendidikan SMP ke bawah dan *mismatch* ketrampilan yang dibutuhkan antara pencari tenaga kerja dengan lapangan kerja yang dibuka. Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia Angkatan Kerja di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia Angkatan Kerja di Provinsi Banten Tahun 2010**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>SD (%)</b>	<b>SLTP (%)</b>	<b>SLTA (%)</b>	<b>PT (%)</b>
Kab.Pandeglang	63.89	20.78	12.10	3.24
Kab. Lebak	73.13	17.34	7.78	1.75
Kab.Tangerang	35.49	25.28	29.59	9.65
Kab. Serang	54.20	25.05	17.14	3.61
Kota Tangerang	22.93	26.18	39.98	10.92
Kota Cilegon	30.73	28.63	34.43	6.21
Kota Serang	60.30	18.35	16.55	4.79
Kota Tang. Selatan	-	-	-	-

Sumber ; Pengolahan Data 2012, Banten Dalam Angka, 2010

Kabupaten Pandeglang dan Lebak, penduduk usia angkatan kerja terlihat ekstrem didominasi oleh penduduk

dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu masing-masing 63.89% dan 73.13% dari total jumlah penduduk usia angkatan kerja di wilayahnya. Kabupaten Lebak merupakan kabupaten yang memiliki penduduk usia angkatan kerja yang paling sedikit berpendidikan setingkat minimal Diploma atau kategori berpendidikan Perguruan Tinggi yaitu sekitar 1.75%. Kabupaten Serang juga terlihat memiliki jumlah penduduk usia angkatan kerja yang didominasi tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 54.20%.

Kabupaten dan Kota Tangerang terlihat cenderung merata untuk perbandingan penduduk usia angkatan kerja dengan tingkat pendidikannya, walaupun untuk Kabupaten Tangerang terlihat didominasi tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan untuk Kota Tangerang didominasi oleh tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) hal yang hampir sama juga terjadi pada Kota Cilegon.

Di bawah ini adalah gambaran pertumbuhan wilayah Provinsi Banten untuk sektor tenaga kerja tahun 1994-2010. Disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

**Tabel Perbandingan Pertumbuhan Provinsi Banten  
Untuk Sektor Tenaga Kerja Tahun 1994-2010**

No	Sektor	1994	2004	2010
1	Pertanian	784157	787999	729087
2	Pertambangan	31169	65334	74342
3	Industri	200426	627615	925161
4	Listrik	4257	11090	12008
5	Bangunan	70195	116453	142987
6	Perdagangan	239872	842284	1201092
7	Angkutan	90275	295216	512657
8	Keuangan	9167	111508	149057
9	Jasa	136106	432324	586 676

Sumber : Pengolahan Data 2012, BPS Provinsi Banten, 2010

Jika melihat data pada Tabel di atas, tergambar pola pergeseran sektor lapangan kerja untuk setiap tahunnya. Pola yang jelas adalah terjadinya penambahan jumlah penduduk untuk semua sektor lapangan kerja kecuali untuk sektor pertanian yang menunjukkan penurunan tiap tahunnya.

Percepatan pertumbuhan ekonomi pada sektor kecuali pertanian di atas tidak berarti tanpa sebab. Pada sektor pertambangan dan penggalian disebabkan oleh meningkatnya produksi batubara yang dihasilkan dari Lebak. Di sektor bangunan disebabkan oleh konstruksi yang didanai oleh pemerintah maupun swasta yang meningkat. Sedangkan pada sektor listrik, gas dan air bersih akibat bertambahnya pasokan gas dari sambungan South Sumatera and West Java.

Pola yang ekstrem terlihat pada sektor perdagangan, keuangan, industri dan angkutan. Keempat sektor ini bertambah lebih dari dua kali lipatnya dalam kurun waktu satu dekade. Hal ini juga dapat kita kaitkan salah satunya dengan adanya perubahan status wilayah dari Provinsi Banten sebagai provinsi baru yang sangat berpengaruh terhadap semua aspek pembangunan selain juga karena penambahan jumlah penduduk yang tinggi di Provinsi Banten ini.

**Tabel Komponen Pertumbuhan Lapangan Kerja Wilayah  
Provinsi Banten**

No	Sektor	Share	Mix	Competitive
1	Pertanian	73487.018	-13453.90	-69645.31
2	Pertambangan	2921.007	7566.73	31243.83
3	Industri	18782.873	-13248.80	408405.88
4	Listrik	39894.474	1331.62	6434.04
5	Bangunan	65782.815	7176.45	39679.91
6	Perdagangan	22479.504	22457.37	579932.64
7	Angkutan	84600.448	26747.85	196481.43

8	Keuangan	85907.253	4925.72	101482.03
9	Jasa	12755.166	-26859.62	283462.40
	Jumlah	146721.91	16643.43	1577476.85

Sumber : Tri Wahyuni, Krismanti. 2008

Dari tabel di atas terbaca, Provinsi Banten untuk jangka waktu mendatang muncul sebagai wilayah yang memiliki lingkungan yang kurang mendukung untuk pengembangan sektor tenaga kerja pertanian, sektor ini tumbuh dengan laju yang negatif (-69645,31). Sedangkan sektor perdagangan (579932.64), industri (408405.88) dan jasa (283462.40) merupakan sektor lapangan kerja yang terlihat berpeluang untuk dikembangkan di Provinsi Banten ini didukung oleh data yang memiliki laju pertumbuhan sangat tinggi dengan arah positif.

### **Tingkat Kesenjangan Antar Wilayah di Provinsi Banten**

Kesenjangan antar wilayah merupakan fenomena yang biasa terjadi di negara berkembang, namun pada tingkat yang lebih lanjut berpengaruh terhadap masalah-masalah ekonomi yang berkepanjangan dan juga tantangan sosial dan politik. Oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab penting dalam mewujudkan pemerataan dan distribusi hasil-hasil pembangunan ke arah keseimbangan proporsional sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya masing-masing.

Level perekonomian Provinsi Banten tergambar dari besaran nilai PDRB yang mampu dicapai oleh provinsi ini. Perkembangan memperlihatkan dari tahun ke tahun level perekonomian Banten terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, untuk pertama kalinya level perekonomian Banten mencapai di atas 100 triliun rupiah. Hal ini terlihat dari nilai PDRB Banten atas dasar harga berlaku yang besarnya 107,43 triliun rupiah. Nilai tersebut tercapai setelah adanya penambahan nilai tambah sebanyak 9,56 triliun rupiah atau

9,77 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan atas dasar harga konstan, PDRB Banten baru mencapai 65,05 triliun rupiah.

Pada Tabel berikut ini disajikan klasifikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010.

**Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>PDRB Perkapita ADHB (Trilyun)</b>	<b>Klasifikasi PDRB Perkapita ADHB</b>
Kab. Pandeglang	7162070.3	1145790	6.79	Rendah
Kab. Lebak	7770000	1203680	5.78	Rendah
Kab. Tangerang	34802038	2838620	11.97	Rendah
Kab. Serang	11497205.23	1403230	8.54	Rendah
Kota Tangerang	56964840	1797720	31.73	Tinggi
Kota Cilegon	19982129.65	374460	57.23	Tinggi
Kota Serang	4806605.82	576960	8.62	Rendah
Kota Tangsel	11615146.22	1303570	9.11	Rendah

Sumber : Pengolahan Data 2012, BPS Kabupaten/Kota, 2010

Terdapat kesenjangan PDRB untuk tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten ini, jika dibandingkan PDRB antar kabupaten/kota secara umum terbagi menjadi dua kategori klasifikasi yaitu Tinggi dan Rendah. Tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam kategori klasifikasi Sedang dalam hal ini. Kota Tangerang dan Cilegon adalah wilayah yang termasuk dalam kategori klasifikasi tinggi untuk Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Perkapita ADHB) sedangkan sisanya masuk dalam kategori klasifikasi Rendah. Hal serupa juga berlaku untuk

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Perkapita ADHK). Hasil klasifikasi ini telah melalui perhitungan dengan perbandingan terhadap jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota.

**Tabel Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2010**

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit (Unit)	Puskesmas (Unit)	Dokter (Orang)	Klasifikasi
Kab. Pandeglang	2	34	128	Rendah
Kab. Lebak	3	35	134	Rendah
Kab. Tangerang	12	40	847	Tinggi
Kabupaten Serang	2	38	119	Rendah
Kota Tangerang	18	25	838	Sedang
Kota Cilegon	5	8	319	Tinggi
Kota Serang	5	10	147	Rendah
Kota Tangsel	7	24	665	Tinggi

Sumber : Pengolahan Data 2012, BPS Kabupaten/Kota, 2010

Dari Tabel di atas terlihat adanya distribusi sarana kesehatan yang tidak merata di Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota Tangerang terlihat paling dominan untuk kepemilikan sarana kesehatan. Keberadaan sarana kesehatan berkaitan erat salah satunya dengan faktor persalinan yang ditolong tenaga medis yang dalam hal ini juga dapat dihubungkan dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu. Pertolongan persalinan oleh tenaga medis sebesar 56,6% pada tahun 2002, meningkat menjadi 62,3% pada tahun 2005. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa masih terdapat 37,7% persalinan yang ditolong oleh tenaga non medis (dukun paraji). Kabupaten dan Kota Tangerang memiliki kasus

yang paling sedikit dalam hal ini, berkaitan dengan cukupnya sarana kesehatan di wilayahnya.

**Tabel Jumlah Sarana Perdagangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010**

Kabupaten/Kota	Pasar Permanen	Pasar Non Permanen	Super market/ Swalayan	Klasifikasi
Kab. Pandeglang	26	22	11	Tinggi
Kab. Lebak	29	33	8	Tinggi
Kab. Tangerang	65	32	110	Sedang
Kab. Serang	44	29	28	Sedang
Kota Tangerang	20	32	75	Sedang
Kota Cilegon	6	3	14	Tinggi
Kota Serang	5	5	65	Rendah
Kota Tangsel	22	42	110	Tinggi

Sumber : Pengolahan Data 2012, BPS Kabupaten/Kota, 2010

Klasifikasi sarana perdagangan di tiap kabupaten/kota berdasarkan perbandingan antara sarana perdagangan yang ada dibandingkan jumlah penduduk yang ada di setiap kabupaten/kota. Dari Tabel di atas terlihat, hanya Kota Serang yang masuk dalam kategori klasifikasi Rendah untuk ketersediaan sarana perdagangan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang masuk kategori klasifikasi Sedang sedangkan Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Kota Cilegon masuk dalam kategori klasifikasi Tinggi untuk ketersediaan sarana perdagangan.

**Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Provinsi Banten Tahun 2010**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Angka Harapan Hidup (tahun)</b>	<b>Angka Melek Huruf (persen)</b>	<b>Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)</b>	<b>IPM</b>	<b>Klasifikasi IPM</b>
Kab. Pandeglang	63.77	96.35	6.47	68.29	Rendah
Kab. Lebak	63.28	94.60	6.24	67.67	Rendah
Kab. Tangerang	65.79	95.78	8.94	71.76	Sedang
Kab. Serang	63.51	95.23	7.05	68.67	Rendah
Kota Tangerang	68.37	98.39	9.98	75.17	Tinggi
Kota Cilegon	68.58	98.72	9.67	75.29	Tinggi
Kota Serang	65.13	96.47	7.51	70.61	Sedang
Kota Tangsel	68.54	98.15	10.15	75.38	Tinggi

Sumber : Pengolahan data 2012, BPS Provinsi Banten, 2010

Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten terlihat relatif merata, tidak ada perbedaan yang ekstrem. IPM tinggi didominasi wilayah yang terletak di sebelah Utara Provinsi Banten yaitu Kota dan Kabupaten Tangerang serta Kota Cilegon, dan untuk IPM kategori rendah terdapat di wilayah sebelah Selatan Provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak dan Pandeglang serta Kabupaten Serang.

Klasifikasi dibuat berdasarkan perbandingan angka IPM di masing-masing kabupaten/kota. IPM kategori klasifikasi Tinggi terdapat di Kota Tangerang, Cilegon dan Tangerang Selatan. Kategori klasifikasi Sedang terdapat di Kabupaten Tangerang dan Kota Serang, sedangkan kategori klasifikasi Rendah terdapat di Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang. Detailnya dapat dilihat pada Tabel di atas.



**Tabel Kontingensi Indikator Kesenjangan Wilayah  
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010**

Kabupaten/Kota	Klasifikasi PDRB Perkapita ADHB dan ADHK	Klasifikasi Gini Ratio	Klasifikasi Sarana Kesehatan	Klasifikasi Sarana Perdagangan	Klasifikasi Produksi Padi	Klasifikasi IPM
Pandeglang	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Rendah
Lebak	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
Tangerang	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Serang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
Kota Tangerang	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
Cilegon	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Kota Serang	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang
Tangsel	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber : Pengolahan data, 2012

Jika melihat Tabel Kontingensi di atas, terlihat bahwa kesenjangan wilayah memiliki pola yang berkaitan dengan status wilayah kabupaten/kota tersebut. Terlihat bahwa wilayah yang memiliki indikator pembangunan yang mendukung adalah wilayah yang berstatus kota, ini terbukti pada Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Hal ini tidak terbukti di Kota Serang, terlihat dengan kategori klasifikasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan yang masih masuk klasifikasi Rendah, dan ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan yang Rendah, serta ketersediaan sarana perdagangan yang juga Rendah. Untuk Kota Tangerang Selatan semua indikator mendukung kecuali untuk Produk Domestik Regional Bruto

Atas Dasar Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan yang masih masuk klasifikasi rendah, hal ini berkaitan dengan jumlah penduduk wilayah ini yang sangat padat selain merupakan wilayah yang baru berubah status wilayahnya menjadi Kota.

Selain status wilayah, secara geografis juga terlihat bahwa wilayah yang memiliki indikator pembangunan yang mendukung terletak di sebelah Utara Provinsi Banten, terlihat pada Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Selain karena Kota Tangerang dan Tangerang Selatan merupakan wilayah *Hinterland* atau wilayah penyangga dari Ibukota Negara yang merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi, wilayah yang terletak di sebelah Utara dari Provinsi Banten ini juga memiliki ketersediaan jaringan jalan yang memadai sehingga mempengaruhi segala aksesibilitas dan mobilitas yang berkaitan erat dengan percepatan pembangunan.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yang masuk klasifikasi Rendah di sebelah Selatan Provinsi Banten menunjukkan belum terkelolanya Sumber Daya Alam di wilayah tersebut. Karena faktanya, Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan wilayah yang memiliki sumber tambang terbesar di Provinsi Banten.

## **Penutup**

Pola pergeseran sektor lapangan kerja di Provinsi Banten menggambarkan terjadinya penambahan jumlah penduduk untuk semua sektor lapangan kerja kecuali untuk sektor pertanian yang menunjukkan penurunan tiap tahunnya. Pola yang ekstrem terlihat pada sektor perdagangan, keuangan, industri dan angkutan. Keempat sektor ini bertambah lebih dari dua kali lipatnya dalam kurun waktu satu dekade. Hal ini

juga dapat kita kaitkan salah satunya dengan adanya perubahan status wilayah dari Provinsi Banten sebagai provinsi baru yang sangat berpengaruh terhadap semua aspek pembangunan selain juga karena penambahan jumlah penduduk yang tinggi di Provinsi Banten ini.

Faktor yang cukup mengganggu di sektor ketenagakerjaan adalah kualitas SDM di Provinsi Banten yang masih kurang kompetitif. Beberapa indikator mengkonfirmasi kondisi ini seperti, masih tingginya angkatan kerja yang berpendidikan SMP ke bawah dan terdapat *mismatch* ketrampilan yang dibutuhkan antara pencari tenaga kerja dengan lapangan kerja. Kesenjangan pembangunan wilayah memiliki pola yang berkaitan dengan status wilayah kabupaten/kota tersebut. Terlihat bahwa wilayah yang memiliki indikator pembangunan yang mendukung adalah wilayah yang berstatus kota, ini terbukti pada Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan dengan pengecualian pada Kota Serang.

Secara geografis juga terlihat bahwa wilayah yang memiliki indikator pembangunan yang mendukung terletak di sebelah Utara Provinsi Banten, terlihat pada Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Selain karena Kota Tangerang dan Tangerang Selatan merupakan wilayah *Hinterland* atau wilayah penyangga dari Ibukota Negara, wilayah yang terletak di sebelah Utara dari Provinsi Banten juga memiliki ketersediaan jaringan jalan yang memadai sehingga mempengaruhi segala aksesibilitas dan mobilitas yang berkaitan erat dengan percepatan pembangunan.

## **Saran**

Beberapa langkah kebijakan yang dapat diambil dalam upaya pengurangan kesenjangan wilayah di Provinsi Banten, diantaranya dengan cara berikut :

- a) Meningkatkan kualitas SDM berkaitan dengan ketenagakerjaan di Provinsi Banten yang masih kurang kompetitif. Beberapa indikator mengkonfirmasi kondisi ini seperti, masih tingginya angkatan kerja yang berpendidikan SMP ke bawah.
- b) Menambah keterampilan tenaga kerja sehingga tidak terjadi *mismatch* ketrampilan yang dibutuhkan antara pencari tenaga kerja dengan lapangan kerja
- c) Memperjelas hierarki kota dengan menghindari dominasi kota inti terhadap daerah belakangnya sehingga timbul keserasian pembangunan.
- d) Wilayah yang telah memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap diharapkan dapat lebih menyebarkan hasil-hasil pembangunan agar tidak terjadi pengurasan sumber daya dan eksploitasi daerah-daerah di sekitarnya.
- e) Alokasi dana pembangunan lebih diarahkan untuk pembangunan investasi yang merata dan mendorong perkembangan ekonomi jangka panjang, terutama pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan dan pendidikan. Koordinasi pembangunan antar wilayah bukan berarti memperbesar wilayah pusat provinsi sebagai pusatnya, namun adanya interaksi saling menguntungkan yang tidak bertentangan dengan kebijakan di tingkat nasional.

## Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2010. Banten Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

BPS Kabupaten Serang, 2010, Kabupaten Serang Dalam Angka 2010

- BPS Kota Cilegon, 2010, Kabupaten Serang Dalam Angka 2010
- BPS Provinsi Banten, 2010, Provinsi Banten Dalam Angka, 2010
- Budiharsono, S. 1989. Perencanaan Pembangunan Wilayah : Teori, Model Perencanaan dan Penerapannya. IPB. Bogor
- Daldjoeni, N., 1987, Geografi Kota dan Desa, Penerbit Alumni, Bandung.
- Faturochman, Bambang Wicaksono, Setiadi, M. Syahbudin Latif, Dinamika Kependudukan dan Kebijakan. 2011. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah mada.
- Muhadjir Darwin, 2011, Dinamika Kependudukan dan Penguatan Governance, Media Wacana, Yogyakarta.
- Mundiharto, 2000, Dinamika Kebijakan Kependudukan : Perkembangan, Ekses Negatif, Perbaikan dan Harapan, Warta Demografi No.1 Lembaga Demografi FEUI, Jakarta.
- Profil Provinsi Banten. <http://www.bantenprov.go.id/gov/?link=dtl&id=705>
- Sjafrijal, 2006. Ekonomi Regional 1 (Teori dan Aplikasinya)
- Sogianto, Soegijoko. 2004. Bunga Rampai : Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Todaro, Michael P., 1969. A Model Of Labour Migration And Urban Unemployment. American Economic Review: 183-193
- Todaro, Michael. P. 1987. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ketiga. Terjemahan. Jakarta : Erlangga.

Tri Wahyuni, Krismanti. 2008. Konvergensi dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Tesis Institut Pertanian Bogor

Tukiran, Abdul Haris, Pande Made Kutanegara, Setiadi. Mobilitas Penduduk Indonesia : Tinjauan Lintas Disiplin. 2010. Yogyakarta : Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Widodo, Tri 2005, Mobilitas Penduduk dan Alternatif Kebijakan Pengendalian Urbanisasi (Kasus Jawa Barat), Jurnal Kependudukan, Vol. 7 No. 1, Januari 2005

**MAKNA DIBALIK SEBUAH HEADLINE &  
OBJEK GAMBAR**  
**Analisis Semiotika Pemberitaan**  
**“Walikota Cilegon Diperiksa KPK”**  
*Oleh : Rangga Galura Gumelar*

**Pendahuluan**

Sistem pers sebuah negara pada dasarnya akan menggambarkan bagaimana sistem dari negara tersebut. Era kebebasan dimulai dari gerakan '98 reformasi, dimana salah satu terobosan yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya adalah tidak adanya pemberedelan atau SIUP bagi usaha media cetak. Tentunya hal ini merupakan suatu gerakan perubahan yang sangat positif, artinya pemerintah tidak memiliki intervensi kepada media khususnya media cetak. Eforia kebebasan pers yang ada pada waktu ternyata tidak dibarengi oleh kedewasaan dan kematangan dari pihak yang berkecimpung dalam praktek jurnalistik itu sendiri. Banyak sekali koran-koran yang terbit kemudian dimana isi dari berita yang mereka buat jauh dari kesan profesionalisme Jurnalistik.

Berbicara tentang profesionalisme tentunya kita akan dihadapkan kepada masalah yang pelik, karena banyak sekali faktor ataupun hal-hal yang dilakukan agar kemudian pelaku

jurnalistik itu menjadi profesional. Berbicara tentang media cetak dalam hal ini adalah koran, hingga saat ini masih menjadi pilihan masyarakat khususnya di Kota Serang umumnya di Provinsi Banten untuk dijadikan bahan dan sumber informasi. Media cetak ini dalam perkembangan masih tetap bisa bertahan walaupun banyak pengamat yang mengatakan bahwa media ini cepat atau lambat akan gulung tikar. Hipotesis ini seakan terbantahkan karena pada kenyataannya koran-koran lokal di daerah semakin lebih banyak dan semakin beragam. Kenyataan lain adalah bahwasannya demografi masyarakat Indonesia sesungguhnya masih jauh berbeda, karena pada kenyataannya tidak seluruhnya masyarakat kita telah sampai pada tahap masyarakat informasi yang selalu tergantung kepada alat elektronik. Masih banyak masyarakat yang lebih suka dengan alat konvensional seperti membaca koran.

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi. Ada empat pilar secara teoritis dalam demokrasi yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif dan media massa. Sesungguhnya media massa baik cetak ataupun elektronik dapat sebagai tempat *check and re-check* jika kemudian ketiga pilar itu bermasalah. Tentunya dalam koran kita akan disuguhkan dengan tulisan-tulisan berita serta penambahan informasi serta keyakinan dengan menghadirkan gambar-gambar atau foto, sehingga kita mengenal dalam pembuatan koran itu dengan istilah Layout. Layout itu sendiri akan memberikan pemahaman yang bisa jadi sama atau berbeda-beda antara individu yang melihatnya. Pesan yang diterima oleh indera kita tentunya bukan saja dari foto yang ada, tetapi juga dari tata cara penulisan hingga kepada gaya font yang digunakan dalam penulisan tersebut. Pemberitaan ataupun gambar memiliki komunikasi kepada khalayak yang kemudian kita kenal dengan komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal biasanya memiliki efek yang tidak dapat kita prediksi, karena hal tersebut tergantung dari bagaimana



pemahaman dan intepetasi yang beragam. Kemudian lantas menjadi suatu masalah besar ketika ternyata pemahaman itu menjadi pemahaman global atau menjadi opini publik, maka akan sulit bagi masyarakat menerima kenyataan jika ternyata apa yang mereka yakini selama ini kemudian tidak benar.

Adapun fungsi surat kabar adalah sebagai informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi (Efendy, 1981:100-101). Surat kabar dapat dikatakan sebagai lembaga informasi yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyiarkan kembali informasi atau berita dalam waktu yang sangat singkat. Berita yang diliput adalah berita-berita yang terbaru dan hasil peliputan yang profesional. Berita adalah seperti yang didefinisikan oleh Maulsby, "sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti yang penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita itu" (assegaf, 1983:24). Berita kemudian menjadi lebih menarik ketika kemudian mencoba menggali atau mengungkapkan berita-berita yang sifatnya sensasional. Salah satu berita yang menjadi headline pada harian umum surat kabar Radar Banten edisi Rabu 29 Agustus 2012 dengan sangat tegas dan jelas menuliskan: WALIKOTA CILEGON DIPERIKSA KPK yang kemudian disusul dengan Deck/Lead nya: Aat Curhat ke Dewan ingin disidang. Selain dari itu dalam berita tersebut terdapat sebuah foto besar walikota Cilegon yang sangat besar dengan posisi duduk dan tangan mencengkram disertai dengan kopiah hitam, aksesoris lambang negara yang memperlihatkan bagaimana ia adalah seorang walikota Kota Cilegon. Menjadi menarik adalah ketika kemudian kita bertanya apakah maksud dari semua ini. Ideologi apa yang kemudian ingin disampaikan oleh Radar Banten melalui gambar tersebut kepada masyarakat.

Gambar Walikota yang kemudian terpampang dengan sangat besar dan jelas tersebut beserta dengan Headline yang

besar dan pada bagian kata DIPERIKSA ditulis dengan tinta merah terasa semakin menyudutkan. Dimana posisi dari Walikota ini adalah sebagai putra dari Aat Syafa'at yang merupakan mantan walikota Cilegon sebelumnya. Secara psikologis dan kecenderungan dimasyarakat Indonesia pada umumnya, mereka yang kemudian telah berhadapan atau diperiksa oleh KPK pasti bersalah. Secara tidak langsung sesungguhnya pers secara tidak langsung membunuh karakter dari objek yang diberitakannya tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *"Apa makna dari headline, lead, Gambar objek serta simbol dalam headline berita utama koran Radar Banten edisi Rabu 29 Agustus 2012"*?

## **Landasan Teori**

### **Semiotika**

Secara etimologis bahwa istilah dari semiotika merupakan kata di Yunani yang berarti Semeion yang berarti tanda, dimana dahulu kala tanda itu kemudian dicirikan dengan alam seperti tanda asap atau mendung di awan. Secara lebih luas dapat dikatakan bahwa semiotika adalah sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa. Seluruh kebudayaan sebagai tanda. Dengan demikian bahwa kemudian ketika kita berbicara semiotika konteksnya akan menjadi luas. Komunikasi adalah sesuatu yang paling utama dalam kehidupan manusia karena manusia senantiasa dalam hidupnya tidak dapat tidak berkomunikasi. Gudykunts dan Kim kemudian memberikan sebuah perumpamaan bahwa dalam kehidupan maka kita tidak terlepas dari simbo-simbol ataupun tanda-tanda.

Theodorson dan Theodorson dalam buku *Communication model for the study of mass communication* memberikan suatu definis yang menekankan pada penggunaan tanda atau simbol-simbol dalam komunikasi di mana menurutnya komunikasi

adalah transisi dari informasi, ide, perilaku atau emosi dari satu individu atau kelompok kepada lainnya melalui simbol (Mcquail: 1994:4)

Charles Sander Peirce berpendapat bahwa logika harus mempengaruhi orang bernalar, dan penalaran tersebut kemudian dijadikan suatu tanda. Sehingga baginya tanda tersebut akan memberikan makna pada apa yang terlihat atau fenomena yang terjadi. Kajian semiotika kemudian menurut Morris menjadi tiga wilayah yaitu kajian semantik yang mengkaji hubungan tanda dengan denotata yang ada, sintaktika mengkaji tentang hubungan antara tanda yang satu dengan tanda yang lainnya dan pragmatika yaitu mengkaji hubungan tanda dan penafsiran. Dengan demikian dalam tanda tersebut terdapat pesan dan makna yang mungkin dalam pemahaman setiap individu akan berbeda-beda.

### **Makna dan Bahasa**

Hubungan dan urutan-urutan tanda yang ada pada diri manusia kemudian akan berubah menjadi suatu makna. Ketika tanda tersebut telah mencapai makna maka sesungguhnya telah terjadi komunikasi. Makna menurut Shimp adalah tanggapan internal yang dimiliki atau diacu oleh seseorang terhadap rangasangan dari luar (Shimp: 1997: 108). Maka tanda-tanda atau simbol yang kemudian ada dalam media cetak seperti dalam pemberitaan merupakan suatu rangsangan yang diberikan kepada individu yang kemudian akhirnya menjadi makna. Brown dikutip dalam buku *Semiotika Komunikasi* mengatakan bahwa makna merupakan kecenderungan total untuk menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa (Alex Sobur: 2003:256). Pendapat lain mseperti yang diutarakan oleh Judy Pearson dan Paul E. Nelson adalah proses memahami dan berbago makna. Artinya dalam hal ini komunikasi dapat diibaratkan sebagai usaha untuk memperoleh dan mendapatkan suatu makna.

Ketika kemudian semiotika digunakan dalam komunikasi massa, maka akan ada interpretasi yang beragam. Media massa sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama dan seni serta kebudayaan merupakan bagian dari alat kekuasaan negara sehingga bekerja secara ideologis guna membangun kepatutan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa. Tetapi kemudian media massa telah gagal dalam membangun kepentingan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Karl Marx, karena media massa telah berpihak kepada kaum kapitalis. Senada dengan itu Antonio Gramsci mengatakan bahwa media massa kemudian memiliki dua sisi dimana media massa selain menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, jadi alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik tetapi dapat dijadikan sebagai alat untuk membangun kultur ideologi yang dominas sekaligus juga menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

Adapun fungsi surat kabar adalah sebagai informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi (Efendy, 1981:100-101). Surat kabar dapat dikatakan sebagai lembaga informasi yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyiarkan kembali informasi atau berita dalam waktu yang sangat singkat. Berita yang diliput adalah berita-berita yang terbaru dan hasil peliputan yang profesional. Berger kemudian lebih lanjut berpendapat bahwa berita itu merupakan hasil sebuah konstruksi dari si pembuat berita. Oleh sebab itu bahwa kemudian Gadamer dalam pendekatan Hermeneutisnya kembali meyakini ketika manusia kemudian menuliskan kedalam bentuk teks maka akan ada kepentingan didalamnya. Bahasa oleh Berger dan Luckmann (1990:98); menjadi tempat penyimpanan kumpulan besar endapan-endapan kolektif yang bisa diperoleh secara monolitik yang artinya sebagai keseluruhan yang kohesif dan tanpa merekonstruksikan lagi proses pembentukannya semula.

Bias media pada akhirnya dalam perjalanan kemudian mengarah kepada upaya membunuh karakter suatu tokoh atau kelompok. Figur yang dianggap penting seperti Walikota Cilegon atau pejabat-pejabat yang dianggap penting kemudian dijadikan sasaran pemberitaan untuk menaikan oplah penjualan. Pau Johnson dalam artikelnya pada buku "*The Media Truth: Is There a Moral Duty (1997-1998)*" kemudian membeberkan setidaknya ada tujuh dosa yang dilakukan media: 1). *Distorsi informasi*, 2). *Dramatisasi fakta palsu*, 3). *Mengganggu privasi*, 4). *Pembunuhan Karakter*, 5). *Eksplorasi Sex*, 6). *Meracuni benak pikiran anak-anak dan penyalahgunaan kekuasaan*. Oleh sebab itu peneliti dalam hal ini mencoba memberikan persepsi pandangan tentang makna yang diterima terhadap tanda-tanda yang dihadirkan atau yang ada pada Headline pemberitaan Walikota Cilegon.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Dalam pendekatan kualitatif data yang dihasilkan berbentuk kata, kalimat dan gambar untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan variabel yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti, dalam hal ini adalah bagaimana mengkaji studi kasus yang diteliti.

Penelitian deskriptif memberikan suatu gambaran dan menjawab pertanyaan apa dengan penjelasan yang lebih terinci. Penelitian deskriptif menurut Kenneth D. Balley merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena secara detail (untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi).

## Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri. Data yang dikumpulkan adalah yang sesuai atau menunjang dalam penelitian yaitu tentang analisis semiotik pemberitaan Walikota Cilegon Diperiksa KPK. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### 1. Studi Dokumentasi

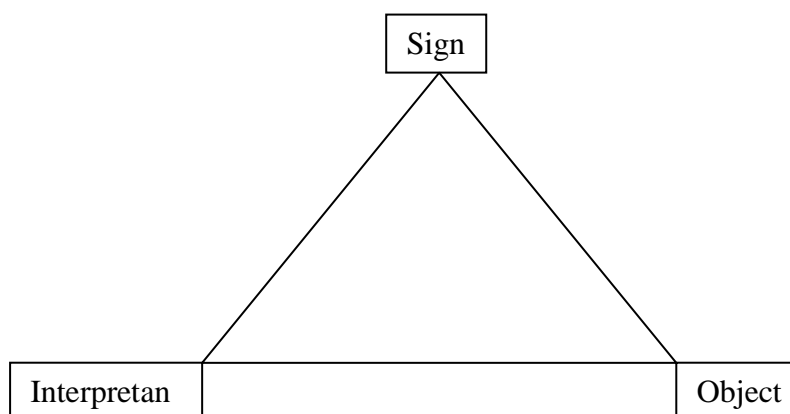
pengumpulan data yang bersumber dari dokumen resmi yang relevan penelitian, berupa sumber-sumber buku ataupun bacaan lainnya yang menunjang dalam penelitian.

### 2. Observasi Teks

Melakukan analisis semiotic terhadap pemberitaan terkait dengan headline dan objek gambar yang ditampilkan.

## Metode Analisa

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa semiotika yang menurut Alex Sobur merupakan suatu ilmu atau metode analisa untuk mengkaji tanda. Barthes mengatakan bahwa semiotika sesungguhnya adalah untuk mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal. Analisis semiotika yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce yang pemikirannya terbagi menjadi segitiga:



Sumber: John Fiske, Introduction to Communication Studies

Pierce kemudian mengistilahkan representament sebagai benda atau objek yang berfungsi sebagai tanda. Objek adalah sesuatu yang dirujuk oleh tanda dimana seringkali merupakan sesuatu yang lai dari tanda tersebut atau mungkin saja bahwa objek dan tanda merupakan entitas yang sama. Dalam teori semiotika ada beberapa objek yang dikemukakan oleh Pierce, yaitu:

- a. Objek Representasi (objek sebagaimana direpresentasikan oleh tanda)
- b. Objek Dinamik (Objek yang tidak bergantung pada tanda, objek inilah yang merangsang penciptaan tanda).

### Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan dokumen resmi, dimana merupakan pemberitaan pada Harian Umum Surat Kabar Radar Banten edisi Rabu 29 Agustus 2012. Menurut Moleong dokumen resmi adalah dokumen yang berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial misalnya majalah, bulletin, pernyataan dan berita yang disiarkan kepada media massa.

### Analisis dan Pembahasan

Dalam penelitian ini jika kita gambarkan ada tiga tanda yang kemudian dapat kita jadikan suatu analisis, yaitu:

NO	Tanda	Objek	Interpretan
1.	WALIKOTA CILEGON DIPERIKSA KPK	Sama dengan tanda	Seakan sudah pasti bersalah
2.	Aat Curhat ke Dewan ingin di Sidang	Sama dengan tanda	Keputusan
3.	Gambar Walikota Cilegon	Sama dengan anda	Simbol pejabat dan kekuasaan

## **Headline (WALIKOTA CILEGON DIPERIKSA KPK)**

Sebuah headline dalam suatu pemberitaan adalah hal yang harus ada. Fungsi dari pada headline adalah untuk menarik perhatian pembaca dan membedakannya dari elemen layout lainnya. Selain dari itu untuk Headline ini memang font nya lebih besar ukurannya serta ditulis dengan huruf kapital. Pada tanda atau tulisan headline ini memang terkesan biasa saja, dalam surat kabar telah banyak sekali headline tentang pejabat ataupun mantan pejabat bahkan sekelas menteri pun ditulis bahwa mereka berurusan dengan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini memang suatu lembaga yang jikalau bias dihindari oleh para pejabat negara atau siapapun untuk berurusan, karena ujungnya adalah mereka yang dipanggil terindikasi atau diduga terlibat dalam masalah korupsi. Tentunya hal ini setidaknya membuat citra tidak baik.

Tetapi dalam penulisan Headline sedikit berbeda dengan penulisan kata "DIPERIKSA" dengan menggunakan warna merah. Dalam dunia desain atau warna terdapat psikologi warna. Artinya warna yang ditampilkan itu sesungguhnya memiliki suatu makna baik makna yang dapat diterjemahkan secara denotatif (sebenarnya) ataupun secara konotatif (kiasan/tidak sebenarnya). Warna merah dalam kata "DIPERIKSA" jika dikaji dengan pemaknaan kata denotatif memang tidak ada permasalahan. Menurut E. Holzschlag, warna merah memiliki kekuatan sebagai *power, energi, kehangatan, cinta, nafsu, agresi, bahaya*. Dalam konteks berita ini maka terlihat bahwa ada makna lain yang ingin disampaikan oleh Harian Umum Radar Banten. Kata DIPERIKSA dengan warna merah menandakan seolah-olah Walikota Cilegon sudah pasti bersalah, selain dari itu ada kesan bahwa dengan warna merah ini kasus tersebut sangatlah penting. Merah terkesan menantang, sehingga kesan yang ditimbulkan negatif. Hanya berita ini yang menggunakan warna merah sedangkan berita-berita lainnya terkait kasus-kasus yang terjadi dan harus



dipanggil atau diperiksa oleh pihak-pihak tertentu ditulis dengan menggunakan warna hitam.

### **Deck (Aat Curhat ke Dewan ingin Disidang)**

Deck merupakan gambaran singkat tentang topik yang dibicarakan pada *bodytext* dimana letaknya bervariasi tetapi pada umumnya diantara judul dan *bodytext*. Fungsi dari Deck adalah pengantar pembaca sebelum masuk kepada *bodytext* dan huruf rata-rata lebih kecil dari *bodytext*. Menilik tulisan deck yang ada pada berita tersebut terlihat bahwa apa yang dituliskan pada deck ini tidak ada secara langsung atau menjelaskan tentang isi berita “WALIKOTA CILEGON DIPERIKSA KPK”. Tetapi tulisan ini memiliki nuansa politis yang sangat besar. Makna kata Aat Curhat ke Dewan ingin disidang seakan menandakan suatu keputusan dan kondisi psikis yang terlihat telah lelah. Makna lain adalah kasus ini seakan menjadikan suatu kesan kolaborasi atau kesalahan antara Aat Syafa’at yang merupakan mantan walikota Cilegon sebelumnya dan juga merupakan ayah dari walikota Cilegon saat ini Tb. Iman Ariadi. Kesan dari keduanya bahwa mereka terlibat dalam kasus ini, yang memang sedang menjadi kasus hangat khususnya di Kota Cilegon.

### **Objek Foto**

Fungsi foto dalam Koran adalah sebagai informasi akurat ataupun untuk menggambarkan dan menjelaskan berita yang ditulis. Berita tersebut dihiasi oleh foto Walikota Cilegon yang sangat besar, bahkan 3/4 ruang pada berita tersebut habis oleh foto tersebut. Hal ini tentulah tidak lazim, dikarenakan pada berita lainnya, dibawah berita tersebut ada foto presiden SBY berukuran sangat kecil yang bersalaman dengan ketua Umum PBNU dengan berita kasus kekerasan di Sampang. Foto Iman terlihat tersenyum, duduk di kursi dengan tangan mengepal dan atribut pemerintah.

Makna yang ditangkap bagaimana sosok yang terkesan bersahaja dan muda ini kemudian dihubungkan dengan KPK maka terkesan ada pembunuhan karakter. Tidak ada penguatan ataupun penambahan informasi yang sesungguhnya diberikan oleh foto tersebut kepada pemberitaan yang ada. Tetapi penguatan yang ada pada pemberitaan tersebut adalah bahwa inilah sosok Walikota Cilegon yang diperiksa oleh KPK tersebut. Porsi yang diberikan kepada foto ini sangatlah berlebihan.

### **Kesimpulan**

Bahwasannya memang indikasi dari pemberitaan yang menyudutkan ataupun bahwa media memiliki kepentingan benar adanya. Kepentingan yang dimaksud adalah bukan secara politis saja, tetapi memang kepentingan secara ekonomi pun menjadi salah satu alasannya. Ketika foto seorang pejabat lokal dengan ukuran yang besar melebihi foto seorang presiden tentunya ini menjadi menarik. Kasus lokal tetap menjadi isu hangat dalam pemberitaan koran lokal, tetapi yang patut dicermati adalah bagaimana isu para pejabat lokal yang mungkin terkena kasus menjadi sorotan utama.

Memang tidak terlihat secara jelas bahwa harian umum Radar Banten ini mendukung kepada kekuasaan atau memiliki agenda dibelakangnya, tetapi penguatan dalam pemberitaan ini hanya mengarah kepada oplah penjualan semata. Tanpa mereka sadari bahwa pemberitaan yang mereka lakukan secara tidak langsung telah membuat pembunuhan karakter terhadap foto dan headline yang mereka buat. Walaupun sesungguhnya, ketika kita telisik dalam berita bodytext tersebut wartawan tidak dapat menggali informasi tentang isi pemeriksaan yang dilakukan KPK kepada Iman Ariadi. Makna yang ada pada headline, lead dan objek foto tentunya akan menyebabkan interpretasi yang beragam, dan kemudian interpretasi itu

menjadi suatu pembenaran yang salah adalah sesuatu yang harus dihindari oleh media massa dalam hal ini Koran.

### **Saran**

Pemahaman akan tanda, makna, tata letak ataupun elemen warna sangatlah penting. Penggunaan warna pada salah satu kata dengan tulisan bold tentunya memberikan arti yang beragam. Setiap pemberitaan akan selalu ada pro dan kontra, tetapi ketika tendensius yang berlebihan muncul maka hal tersebut tidaklah baik. Media dalam hal ini harus menempatkan dirinya sebagai tempat yang netral.

Memang memahami tanda dan memunculkan makna tertentu tidaklah sama. Tetapi mungkin dengan pemberitaan seperti ini tidaklah kita lantas mengatakan bahwa Radar Banten memusuhi Pemkot Cilegon atau tidak suka dengan Walikota Cilegon. Tetapi harus didasarkan bahwa ini adalah strategi dalam pemberitaan semata.

### **Daftar Pustaka**

Berger, Peter&Thomas Luckmann (1990), Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta, LP3ES

Bungin, Burhan (2009), Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana

------(2008), Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta: Prenanda Media Group

Budiman, Kris (2003), Semiotika Visual. Yogyakarta: Yayasan Seni Cemeti

Eriyanto (2001), Analisis Wacaba, Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta: LKIS

- , Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, Yogyakarta: LKIS.
- Griffin, Emory A (2003). A First Look at Communication Theory, 5th edition. New York McGraw-Hill.
- Hamad, Ibnu (2004), Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa, Granit. Jakarta.
- Kusriyanto, Adi (2004), Tipografi Komputer Untuk Desainer Grafis. Yogyakarta: Andi
- (2007), Pengantar Desain Komunikasi Visual. Yogyakarta: Andi
- Littlejohn, S. & Foss, K. (2009). Theories of Human Communication (Terj. Hamdan, Yusuf). Jakarta: Salemba Humanika.
- Miller, Katherine (2005). Communication Theories. USA: Macgraw-Hill.
- Moleong, Lexy (1998). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya
- Rustan, Suriyanto (2009). Mendesain Logo. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- (2009). Layout. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Salim, Agus (2001). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba dan Penerapannya). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Sobur, Alex (2006), Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing. Bandung: Rosdakarya

----- (2006), *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

W. Laurence Neuman. (2006). *Social Research Methodes, Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education.

Wibowo, Indiwana (2011), *Semiotika Komunikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media

# Lampiran

## Kasus Kekerasan di Sampang Tersangka Pelaku Lama, Langsung Ditahan

Polisi langsung menetapkan penggerak massa yang menyerbu komunitas Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur, sebagai tersangka. Dia adalah Rois yang merupakan adik kandung Tajul Muluk. Polisi langsung menahan yang bersangkutan dan memeriksa tujuh orang lainnya.



Presiden SBY menerima Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirojdi di Istana Negara, Selasa (28/8). Dalam pertemuan juga dibahas kasus kekerasan di Sampang.

menghusus dari menggerakkan massa," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karpennas) Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Selasa (28/8). Kata Boy, Rois dijenat Pasal 354 KUHP dan pasal 160 juncto 55 dan 56 KUHP tentang penganiayaan berat dan penghasutan.

Boy mengungkapkan, pengusutan kasus tersebut tidak berhenti di Rois. Dia mengakui, kemungkinan Rois tidak bekerja sendiri dan masih ada pihak lain yang terlibat. "Kami akan terus mengembangkan informasi kepada siapa pun yang terlibat," katanya.

Keilm 7

\*DIA diduga sebagai orang yang

# WALIKOTA CILEGON

## DIPERIKSA Aat Curhat ke Dewan Ingin Disidang KPK

CILEGON-Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin serius mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Walikota Cilegon Tb Aat Sya'at atas dugaan rekayasa kelang embahargawan tiang pancung diemaga Pelabuhan

ibungansi, Kecamatan Cisaradan, Kota Cilegon, Januari (28/8), giliran Walikota Cilegon Tb man Ariyadi menjadi salah satu saksi yang imana keterangan sebagai superbedi terdapat. Imany yang juga putra Aat menjalani pe-periksaan sekira lima jam sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB. Hingga tadi malam, man belum bisa dimintai keterangan epatar pemeriksaan tersebut lantaran rlaport pengantarannya tidak akaf.

Juru bicara KPK Johan Budi SP mengpa-akan, pemeriksaan iman masih sebatas ekai atas kasus Pelabuhan Kabanaganti. Sebagai saksi atas tersangka Aat Sya'at, jar Johan kepada Radar Banten, Selasa (28/8). Namun Johan tidak dapat menyebarkan nanti pemeriksaan yang ditanyakan penyidik KPK kepada iman. Sebab iman, penyidik KPK memeriksa satu orang lagi dari thak swasta, yakni Iman Sengra.

Keilm 10



Sebagai saksi atas tersangka Aat Sya'at." Johan Budi SP Juru bicara KPK



Tb Iman Ariyadi

## **PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN DAN PERILAKU Pencarian Informasi Kaum Muda**

*Oleh : Deviani Setyorini, Andin Nesia dan Yearry Panji S*

### **Pendahuluan**

Demokrasi adalah kesetaraan dalam menyampaikan pendapat, berekspresi, dan kesamaan akses dalam pemerolehan informasi. Seperti yang dikatakan Mulyana (2008:171), demokrasi adalah salah satu nilai penting yang wajib dibangun dalam penggunaan teknologi komunikasi (pemerataan informasi). Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mampu menjamin hak-hak setiap warga negaranya terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan hak dasar seperti hak mendapatkan pelayanan umum standar dan ketersediaan dan kemudahan akses dalam memperoleh informasi.

Perkembangan teknologi komunikasi baru, khususnya teknologi Internet telah membawa banyak perubahan dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Perubahan perilaku tersebut tentunya diharapkan menghasilkan kemudahan, keterbaruan, dan kenyamanan dalam segi biaya dan daya yang dibutuhkan. Akan tetapi, untuk sebagian individu di daerah tertentu terutama di daerah terpencil yang memiliki

keterbatasan ekonomi dan tingkat pendidikan, kesenjangan digital (akses) merupakan permasalahan yang dihasilkan oleh teknologi baru tersebut.

Sampai akhir Januari 2004 ini diperkirakan negara Indonesia telah memiliki kapasitas sekitar 29 juta satuan sambungan telepon, yang terdiri dari 9 juta lebih sambungan telepon tetap dan kurang lebih 20 juta sambungan/pelanggan telepon bergerak. Namun sebaran kapasitas tersebut tidaklah merata untuk semua wilayah pulau, kota, kecamatan hingga desa. Sesuai data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik dan Departemen Dalam Negeri yang kemudian digunakan oleh Ditjen Pos dan Telekomunikasi (Postel), diperkirakan 43.000 desa dari total 67.000 desa di seluruh Indonesia, masih belum memiliki fasilitas telekomunikasi (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi, 2010).

Sedangkan hak akan akses informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Sejalan dengan laporan PBB yang mengatakan "Internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memerangi ketimpangan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia, memastikan akses universal ke Internet harus menjadi prioritas bagi semua negara" (<http://inet.detik.com/read/2011/06/06/155631/1654196/398/pbb-akses-internet-hak-asasi-manusia>). Laporan tersebut juga memuat Internet adalah salah satu instrumen yang paling kuat dari abad ke-21 untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan akses, untuk informasi, dan untuk memfasilitasi partisipasi warga aktif dalam membangun masyarakat demokratis.

Fungsi Internet yang potensial akan menjadi sia-sia apabila akses terhadap teknologi ini terhambat karena persoalan dasar seperti daya dukung infrastruktur, listrik dan konektivitas. Penetrasi Internet di Indonesia di tahun 2010 adalah 13% dibandingkan dengan penetrasi telepon selular



66,27%, yang tersebar di area publik, kampus, sekolah, kantor dan rumah tangga. Sedangkan kesenjangan penetrasi dan infrastruktur informasi terbagi antara Indonesia kawasan barat (pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan) dan timur (Pulau Sulawesi dan Papua) (Data Statistik Dirjen Pos dan Telekomunikasi,2010).

Oleh karena itu, negara (pemerintah) harus mengadopsi kebijakan yang efektif dan konkret dan strategis dalam mewujudkan masyarakat demokratis - yang dikembangkan dalam konsultasi dengan individu dari semua segmen masyarakat, termasuk sektor swasta maupun departemen pemerintah yang relevan - untuk membuat Internet tersedia secara luas, mudah diakses dan terjangkau untuk semua.

Akses universal diartikan bahwa setiap orang dalam suatu kelompok masyarakat haruslah dapat melakukan akses terhadap telepon publik yang tidak harus tersedia dirumah mereka masing-masing. Universal Access ini biasanya dapat diperoleh melalui telepon umum, warung telekomunikasi atau kios sejenis, *multi purpose community center*, dan berbagai bentuk fasilitas sejenis (International Telecommunication Union, 2003).

Akses universal khususnya akses terhadap teknologi Internet merupakan bagian dari Universal Service Obligation (USO). Kerangka internasional program USO adalah International Telecommunication Union (ITU) pada World Summit on Information Society Declaration (Tokyo Declaration 2003, Geneva 2003 and Tunis 2005) yang ingin mencapai pemenuhan pelayanan telekomunikasi bagi setengah penduduk dunia pada 2015. Lebih penting adalah mengenai dasar pemikiran dari deklarasi itu - yang menjadi dasar program USO di pelbagai negara - yaitu komitmen untuk menciptakan masyarakat informasi yang inklusif dan menyejahterakan rakyat, dimana setiap orang menciptakan, akses, menggunakan, membagi informasi dan pengetahuan, memungkinkan anggota masyarakat dan komunitas

mengembangkan kemampuan setingginya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun mengandung jargon, namun prinsipnya masuk akal, yaitu meningkatkan kapabilitas masyarakat secara merata untuk ikut mengelola sumber daya untuk kesejahteraan.

Sebenarnya tujuan konsep Universal Service dan Universal Access tidaklah semata-mata untuk menyediakan fasilitas telekomunikasi kepada seseorang atau kelompok masyarakat saja, tetapi adalah untuk: (a) meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi; (b) mempromosikan proses kohesi sosial dan politik melalui pembauran komunitas yang terisolir dengan komunitas umum/maju; (c) meningkatkan cara dan mutu penyampaian jasa-jasa publik pemerintah; (d) memacu keseimbangan distribusi populasi; dan (e) menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara information rich dan information poor (International Telecommunication Union, 2003).

Pemerintah Indonesia tengah mengkampanyekan USO (*Universal Service Obligation*) di bidang telekomunikasi melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau teknologi informasi dengan membangun fasilitas telekomunikasi untuk daerah perdesaan berupa akses jasa telepon dasar di 3.010 desa di tanah air melalui program Universal Service Obligation (USO) yang telah diresmikan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2003. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah memenuhi kewajiban pelayanan universal. Sasarannya adalah mencapai masyarakat berbasis informasi pada 2025. Untuk program hingga 2014 adalah menjangkau layanan dasar di hampir tiga puluh empat ribu desa. (Kompas 19 Desember 2003).

Ministry Decree No 32/2008 Kementerian Informasi dan Komunikasi adalah pedoman USO pemerintah Indonesia dalam bidang ICT (*Information and Communication Technology*) yang menjelaskan tentang USO Regulation and

Implementation, berupa Desa Berdering (Ringing Village) yang menyediakan jaringan telepon, Desa Pintar (Smart Village) yang menyediakan jaringan internet (2015). Program ini dibiayai dari kewajiban pihak swasta operator yang harus menyisihkan 1,25 persen dari keuntungan kotor mereka. Program USO Indonesia: Desa Pintar diimplementasikan dalam Inpres no 1/2010 yaitu PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) yang didukung oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan. Program PLIK adalah pengembangan teknologi internet di wilayah-wilayah kecamatan di banyak provinsi di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan perekonomian daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang prospektif (<http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/08/20/195/USO-untuk-Kesejahteraan>).

USO lebih kurang akan menjangkau 1.515 kecamatan di belasan provinsi di Indonesia yang dikelompokkan menjadi 3 paket, yakni paket 7, paket 8 dan paket 9. Paket 7 terdiri atas beberapa provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Paket 8 terdiri atas Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Paket 9 terdiri atas Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Selanjutnya, USO Desa Pintar sudah direalisasikan pada awal Mei 2010 (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi, 2010).

Program PLIK ini bertujuan untuk meningkatkan pola pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi, meningkatkan sinergitas dan integrasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi. Program ini akan tersebar di kurang lebih 5.748 kecamatan di seluruh Indonesia. Untuk

masing-masing titik PLIK akan dilengkapi dengan 5 unit PC, 1 server, 1 printer, paket perangkat V-sat, dan semua perlengkapan penunjang termasuk perlengkapan instalasi, meja, kursi dan papan nama. Sejauh ini sampai dengan bulan Agustus 2010 telah tercapai sebanyak 1.210, kemudian bulan Oktober 2010 diharapkan akan tercapai sebanyak 2.118, serta selanjutnya pada bulan Desember 2010 sebanyak 5.748 (<http://www.forum-kita.net/tag/kemenkominfo>).

Kebijakan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam program-program Kementerian Informasi dan Komunikasi ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Indonesia khususnya yang berada di wilayah yang jauh dari pusat (daerah tertinggal). Kebutuhan informasi ini meliputi empat bidang, yaitu *pertama*, informasi berkaitan dengan pengetahuan dasar. Tujuannya adalah masyarakat mengetahui fakta yang merugikan berkaitan dengan kesehatan, produk, peraturan baru yang terkait luas, dan lainnya. Misalnya, penyebaran flu burung, zat aditif dalam makanan, makanan tercemar, peraturan tentang-kependudukan, pemilu dan pilkada.

*Kedua*, informasi yang dapat mengarah pada perbaikan akses terhadap pelayanan publik, misalnya waktu dan biaya pelayanan, tempat pengaduan, partisipasi pemantauan dan rencana penggunaan tata ruang. *Ketiga*, informasi yang mengarah pada peningkatkan aktifitas ekonomi: fasilitas pemberian kredit rakyat, kebijakan baru ekonomi, pelatihan usaha, pelatihan kejuruan, kegiatan asosiasi yang penting, kondisi pasar yang berdampak cukup luas. *Keempat*, informasi yang mengarah pada peningkatan kohesi sosial: pengetahuan mengatasi konflik komunitas, membangun forum warga, memperkuat aspek pelayanan masyarakat organisasi keagamaan (bekerja sama dengan LSM misalnya dalam menyediakan materi ini), mencegah beredarnya materi bersifat SARA, memfasilitasi pengembangan pengetahuan baru tentang

hidup dalam keragaman yang produktif (<http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/08/20/195/USO-untuk-Kesejahteraan>).

Kaum muda mempunyai peran penting yang tidak bisa diabaikan dalam pembangunan masyarakat demokratis. Karakternya sebagai agen perubahan membantu proses demokrasi menjadi lebih lancar. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana kehadiran program PLIK dapat mempengaruhi perilaku pencarian informasi mereka dan apakah mereka dapat memanfaatkan kehadiran program ini dalam kegiatan komunikasi mereka.

Kota Cilegon merupakan salah satu kota yang menjadi target sasaran program PLIK di Banten. Kota Cilegon menjadi fokus penelitian ini karena kondisi geografisnya yang notabene berdekatan dengan pusat (Jakarta), lebih modern tetapi masih memiliki banyak daerah yang tertinggal. Ada 8 kecamatan di kota Cilegon yang menjadi sasaran program PLIK yang terdiri dari kecamatan Cilegon, Cibeber, Jombang, Grogol, Purwakarta, Pulomerak, Ciwandan dan Citangkil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program PLIK diimplementasikan di 8 kecamatan di kota Cilegon. Selain itu penelitian ini juga ingin menggambarkan bagaimana pemanfaatan program PLIK oleh masyarakat khususnya kaum muda di kota Cilegon yang berkaitan dengan perilaku mereka dalam mencari dan mengelola informasi. Motif dan kebutuhan pengguna layanan Internet kecamatan juga menjadi tujuan dalam penelitian ini.

### **Tinjauan Pustaka**

Teknologi informasi baru yang bersifat konvergen sebagai akibat dari globalisasi dan digitalisasi menawarkan beberapa manfaat bagi masyarakat. Keberadaan jaringan atau sistem komputer yang membuat aliran informasi mengalir dengan sangat cepat adalah sebuah 'Information Highway'

atau jalan bebas hambatan informasi, yang merupakan sebuah representasi peluang yang luas bagi setiap orang untuk mengakses dan menggunakan teknologi tersebut bagi keuntungan mereka. Konvergensi teknologi informasi juga dilihat sebagai salah satu infrastruktur penunjang yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi dan fisik suatu bangsa. Flew (2005:18) menyatakan bahwa inovasi perkembangan teknologi informasi sejak tahun 1980an telah membawa berbagai macam aplikasi dalam hal bentuk-bentuk pelayanan bisnis yang akan memberikan kontribusi bagi aktivitas ekonomis.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi modern yang sangat cepat dan berkelanjutan seperti Internet dan system penyiaran digital (digital broadcasting) juga telah membawa dunia kepada penciptaan suatu bentuk masyarakat baru yaitu masyarakat informasi (information society). Masyarakat informasi adalah suatu bentuk masyarakat yang banyak diasosiasikan oleh kepemilikan informasi dan juga menawarkan lebih banyak kesejahteraan dan demokrasi melalui informasi literasi public dengan penggunaan teknologi informasi bagi umat manusia. Informasi telah menjadi komoditas kunci dalam masyarakat informasi atau dalam ekonomi yang berorientasi pelayanan di era baru masyarakat industry. Teknologi dan akses terhadap pelayanan informasi juga mempunyai peran yang signifikan. Seseorang yang mempunyai informasi terbaru dan lebih banyak adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan lebih banyak atau kendali untuk mempengaruhi orang lain (Schejter, 2003:158).

Kemunculan masyarakat informasi bersamaan dengan proses digitalisasi dan konvergensi juga membawa beberapa implikasi pada regulasi dan kebijakan telekomunikasi tertentu. Seperti konsep pelayanan universal dan akses universal, terutama akses terhadap informasi, dan paradigma ekonomi seperti social-demokratis dan neo-liberal. Sebagai tambahan,

perkembangan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi yang tidak seimbang diantara negara-negara telah menciptakan sebuah permasalahan bernama kesenjangan digital. Permasalahan ini akan didiskusikan dalam lingkup akses universal, di mana akses terhadap jaringan komunikasi dan isi informasi sangat fundamental bagi partisipasi demokrasi, ekonomi, dan social secara menyeluruh.

### **Akses Universal dan Kewajiban Pelayanan Universal**

Sebuah definisi awal dari pelayanan universal (universal service) dikemukakan oleh Theodore Vail (1907), arsitek Bell System, penemu *'one system, one policy, universally service'*, yang terkenal dengan gagasan visionernya bahwa semua warga negara seharusnya memiliki akses telekomunikasi (Jayakar,2004:339). Pada titik ini, pelayanan universal dapat didefinisikan memberikan akses jaringan komunikasi untuk setiap warga negara, dalam hal ini jaringan system telephone di bawah system ekonomi monopoli.

Sesuai perjalanan waktu, konsep Universal Service kemudian diartikan bahwa setiap rumah tangga dalam suatu negara memiliki sambungan telepon, biasanya telepon tetap. Namun mengingat definisi di atas hanya layak untuk negara maju, maka kemudian muncul pula istilah Universal Access yang bisa dijangkau dan lebih sesuai dengan praktek-praktek di negara berkembang. Universal Access diartikan bahwa setiap orang dalam suatu kelompok masyarakat haruslah dapat melakukan akses terhadap telepon publik yang tidak harus tersedia dirumah mereka masing-masing. Universal Access ini biasanya dapat diperoleh melalui telepon umum, warung telekomunikasi atau kios sejenis, multi purpose community center, dan berbagai bentuk fasilitas sejenis (International Telecommunication Union,2003). Dalam banyak literatur, kedua istilah Universal Service dan Universal Access ini kemudian sering dipakai pada saat bersamaan dan sering pula

dipertukartempatkan tanpa mengubah arti masing-masing (Majalah Bisnis Komputer No. 03 Edisi Maret 2004).

Mengingat pentingnya informasi bagi masyarakat desa maka pemerintah mengadakan salah satu program yaitu program Universal Service Obligation (USO). Program USO merupakan bagian dari Kerangka Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework) yang dikembangkan oleh BAPPENAS. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kesenjangan digital berupa akses Internet yang universal. Program ini diresmikan 18 Desember 2003 dengan sasaran masyarakat Indonesia berbasis informasi pada tahun 2025. Program USO terimplementasikan dalam Inpres No. 1/2010 tentang PLIK yang mengacu pada perwujudan Desa Pintar yang menyediakan akses Internet di seluruh Indonesia pada tahun 2015.

Ekspetasi dari program USO adalah (BP3TI, 2010) :

- a. Menyediakan akses untuk layanan-layanan dasar dari kegiatan ekonomi
- b. Perubahan terkait peristiwa-peristiwa budaya dalam hal pola-pola komunikasi dan informasi di area pedesaan (kebudayaan tradisional yang terbuka dan partisipatoris)
- c. Peningkatan kualitas hidup komunitas dalam aspek kesehatan, social, kebudayaan, ekonomi dan lingkungan
- d. Pembentukan masyarakat yang lebih percaya diri untuk berpartisipasi

Terwujudnya ekspetasi dari program USO menuntut adanya koordinasi dan pengawasan dari semua pihak yang terlibat dalam implementasi teknologi komunikasi dan informasi di masyarakat, seperti peran pemerintah daerah dan komunitas atau khalayak potensial yang melek teknologi dan informasi. Pemerintah Indonesia dapat mengedukasi khalayak sasaran dengan strategi menumbuhkan kesadaran, minat, hasrat dan tindakan untuk terlibat dalam diseminasi teknologi



dan informasi. Salah satu khalayak sasaran yang potensial dalam diseminasi teknologi dan informasi adalah “generasi baru” atau kaum muda. Sosialisasi dan training penggunaan inovasi teknologi baru dan penyebaran informasi baru akan lebih mudah pelaksanaan dan penanaman nilainya melalui peran pemuda (Mulyana, 2008: 182). Selain itu, bagaimana pemerintah (Keminfokom) dapat membantu dengan menyediakan tenaga-tenaga penyuluh dan tim yang terampil dan kredibel dapat membuat proses diseminasi teknologi dan informasi menjadi lancar dan efisien.

Pemuda mempunyai peran dalam perilaku dan kebiasaan mereka yang aktif, cepat beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan. Perilaku dan kebiasaan ini juga tertuang dalam peran mereka dalam mencari dan mengelola informasi lebih aktif dari aplikasi teknologi yang digunakan. Bagaimana pemuda dapat menggunakan teknologi komunikasi baru, Internet dan memanfaatkannya dalam memperoleh informasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, merupakan factor penting dalam mengatasi kesenjangan informasi dan akses digital. Seperti yang dikatakan Parker dan Dunn dalam Dilla (2007:169), perkembangan teknologi komunikasi hanya akan berdampak positif apabila akses ke pelayanan informasi tersedia secara universal di seluruh masyarakat yang berbeda lokasi dan kemampuan ekonomi.

Kaum muda juga merupakan komunikator yang berfungsi sebagai agen perubahan dalam pembangunan, khususnya masyarakat informasi yang demokratis. Dilla (2007:145) menjelaskan agen perubahan adalah kelompok atau orang yang terdidik dan terampil untuk melakukan perubahan social, melalui informasi pembangunan, saluran (media), dan sasaran pembangunan secara terencana, sistematis, sinergi dan terintegrasi.

## Perilaku Pencarian Informasi

Informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Informasi berkenaan dengan suatu fakta atau keadaan. Kristanto (2003:6) menyatakan informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Menurut Mayer (2005:3) ada beberapa karakter atau ciri dari informasi yaitu:

1. *Information is acquired at definite*
2. *Information has a definite value, which may be quantified and treated as an accountable asset*
3. *Information consumption can be quantified*
4. *Information has a clear life cycle*
5. *Information may be processed and refined, so that raw materials (e.g., database) are converted into finished product (e.g., public directories)*
6. *Substitutes for any specific item or collection of information are available, and may be quantified as more expensive or less expensive.*

Menurut Wasaa, (2008:1) informasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. *Accuracy*
2. *Form*
3. *Frequency*
4. *Breadth*
5. *Origin*
6. *Time horizon*

Informasi dapat dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada pengguna. Menurut Sutanta (2003:11) ada beberapa manfaat informasi yaitu:

1. Menambah pengetahuan

Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan yang mendukung proses pengambilan keputusan.

2. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi  
Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya, sehingga kemungkinan menghindari keraguan pada saat pengambilan keputusan.
3. Mengurangi resiko kegagalan  
Adanya informasi akan resiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.
4. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan yang akan menghasilkan keputusan yang lebih terarah.
5. Memberikan standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran dan tujuan.

Terdapat empat istilah yang berkaitan dengan perilaku informasi diantaranya (1) Perilaku informasi (*information behavior*) yang merupakan keseluruhan perilaku manusia berkaitan dengan sumber dan saluran informasi, termasuk perilaku pencarian dan penggunaan informasi baik secara aktif maupun secara pasif. Menonton TV dapat dianggap sebagai perilaku informasi, demikian pula komunikasi antar-muka. (2) Perilaku penemuan informasi (*information seeking behavior*) merupakan upaya menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dalam upaya ini, seseorang bisa saja berinteraksi dengan sistem informasi hastawi (suratkabar, sebuah perpustakaan) atau berbasis-komputer (misalnya www). (3) Perilaku pencarian informasi (*information searching behavior*) merupakan perilaku di tingkat mikro, berupa perilaku mencari yang ditunjukkan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi. Perilaku ini terdiri dari berbagai

bentuk interaksi dengan sistem, baik di tingkat interaksi dengan komputer (misalnya penggunaan mouse atau tindakan meng-klik sebuah link), maupun di tingkat intelektual dan mental (misalnya penggunaan strategi Boolean atau keputusan memilih buku yang paling relevan di antara sederetan buku di rak perpustakaan). (4) Perilaku penggunaan informasi (*information user behavior*) terdiri dari tindakan-tindakan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang ketika seseorang menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan dasar yang sudah ia miliki sebelumnya (Pendit,2003:29).

### **Motif dan Kebutuhan Mencari Informasi**

Kebutuhan informasi menurut Lor dalam Krikelas (1983:7-8) didefinisikan sebagai suatu permintaan. Dengan kata lain, permintaan dinyatakan sebagai kebutuhan yang nyata. Sejalan dengan pendapat Lor tersebut, menurut Menzel dalam Pannen (1990:30) kebutuhan informasi adalah permintaan pemakai yang disadari. Selanjutnya Krikelas menyatakan masalah yang kompleks akan timbul untuk membedakan kapan kebutuhan disadari seseorang dan bagaimana menyatakannya. Kebutuhan yang disadari adalah suatu proses internal dalam diri manusia tersebut, sedangkan bagaimana mengekspresikan kebutuhan tersebut dapat diteliti secara empiris.

Kebutuhan terjadi karena keadaan tidak menentu yang timbul akibat terjadinya kesenjangan atau gap dalam diri manusia antara pengetahuan yang dimiliki dengan yang dibutuhkannya. Pemakai akan mencari informasi untuk memenuhi kebutuhannya karena adanya kesenjangan tersebut, manusia menggunakan atau berusaha menggunakan berbagai sumber informasi (Chen dan chernon, dalam Pannen,1990:31). Setelah diperoleh, informasi dapat digunakan untuk

bermacam-macam keperluan. Keperluan tersebut menurut Dervin (1986) antara lain:

1. Untuk mendapatkan ide, pengertian atau gambaran agar dapat melintasi ruang dan waktu.
2. Untuk mendapatkan kemampuan dan keterampilan (skills)
3. Agar termotivasi, dapat memulai suatu pekerjaan atau mulai belajar.
4. Agar dapat membuat situasi lebih baik, atau lebih tenang
5. Agar menyenangkan, puas dan rileks

Belkin (1985) menjelaskan kebutuhan dan perilaku pencarian informasi dapat dipengaruhi oleh bermacam-macam sebab, antara lain latar belakang sosial, budaya, pendidikan, tujuan yang ada dalam diri manusia tersebut serta lingkungan sosialnya. Menurut Pendit, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mewujudkan kebutuhan informasi dalam bentuk perilaku informasi adalah kondisi psikologis seseorang, demografis, perannya dalam masyarakat, lingkungan dan karakter sumber informasi. Ishak (2006:93) menyatakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi pemakai, yaitu:

1. Jenis pekerjaan.
2. Personalitas, yaitu aspek psikologis dari pencari informasi, meliputi ketepatan, ketekunan mencari informasi, pencarian secara sistematis, motivasi dan kemauan menerima informasi dari teman, kolega dan atasan.
3. Waktu.
4. Akses, yaitu menelusur informasi secara internal (di dalam organisasi) atau eksternal (di luar organisasi).
5. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk informasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena ada kesenjangan dalam diri seseorang, maka muncul kebutuhan informasi. Kesenjangan dalam pikiran seseorang tersebut

disebut dengan situasi problematik atau masalah. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, manusia akan berusaha mencari dan menggunakan sumber informasi.

Pencarian informasi menurut Pannen (1990) adalah pencarian dan penggunaan informasi adalah keadaan ketika orang bergerak melewati ruang dan waktu dan menemukan dirinya pada suatu keadaan dimana dia harus menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, melihat suatu fakta, agar dapat mengetahui sesuatu untuk terus bergerak.

Pencarian informasi adalah kegiatan seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Manusia akan menunjukkan perilaku pencarian informasi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku pencarian informasi dimulai ketika seseorang merasa bahwa ada pengetahuan yang dimilikinya saat itu kurang dari pengetahuan yang dibutuhkannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorang mencari informasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi. Tindakan menggunakan literatur adalah suatu perilaku yang kenyataannya menggambarkan berbagai tujuan (Krikelas, 1983:5-20).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemakai agar dapat mencari dan menggunakan informasi adalah kesadaran mereka akan layanan informasi yang ada di lingkungan mereka (Pannen,1990). Dalam mencari informasi yang tepat dan akurat, diperlukan strategi pencarian informasi. Informasi merupakan pengetahuan apa saja yang diperoleh melalui komunikasi. Menurut Nicholson (2000:9) bagaimana cara mencari informasi yang efisien dalam database, terdiri dari:

1. Memahami topik
2. Mengidentifikasi *query* dan frase
3. Mengidentifikasi sinonim dan istilah yang terkait
4. Membuat pernyataan penelusuran
5. Memulai pencarian

6. Mengevaluasi hasil pencarian
7. Menyimpan hasil pencarian
8. Mengambil referensi

Menurut Kuhlthau (2000:49) ada 6 (enam) tahap model proses pencarian informasi. Ia menguraikan bahwa pola pencarian informasi sifatnya berjenjang, dimulai dari sesuatu yang tidak jelas, sampai pada tahap kejelasan dari informasi yang dicarinya. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. *Initiation* (inisiasi), yaitu ketika seseorang menjadi sadar dari kurangnya pengetahuan atau pemahaman, perasaan ketidakpastian dan ketakutan. Tahap ini muncul pada saat seseorang merasa pengetahuannya masih kurang dari yang dibutuhkannya.
2. *Selection* (seleksi), yaitu ketika sebuah topik atau masalah yang diidentifikasi dan ketidakpastian awal sering memberi cara untuk rasa singkat optimisme dan kesiapan untuk memulai pencarian atau penelusuran.
3. *Exploration* (eksplorasi), yaitu ketika tidak konsisten, informasi yang tidak kompatibel, kebingungan, dan keraguan sering membuat kurangnya kepercayaan pada diri mereka. Tahap ini sering merupakan tahap yang paling sulit bagi pemakai dan perantara (*intermediary*) atau petugas lembaga informasi.
4. *Formulation* (perumusan), yaitu ketika suatu perspektif yang difokuskan dibentuk dan mengurangi ketidakpastian ketika keyakinan mulai meningkat. Pola pikir menjadi lebih jelas dan terpusat pada masalah yang ditekuninya.
5. *Collection* (koleksi), yaitu ketika informasi yang berhubungan dengan fokus perspektif dan ketidakpastian dikumpulkan berhenti ketika minat diperdalam. Pada tahap ini interaksi antara pemakai dan sistem informasi menjadi lebih efektif dan efisien.

6. *Presentation* (presentasi), yaitu ketika pencarian dilengkapi pemahaman baru yang memungkinkan orang untuk menjelaskan pelajarannya kepada orang lain. Yang terjadi adalah tugas melengkapi penelusuran telah selesai. Suatu perasaan puas atau kecewa akan muncul pada tahap ini.

Proses pencarian informasi menurut Ellis, Cox dan Hall (1993) dalam Wilson (2000:52) melalui beberapa tahap yaitu:

1. *Starting* atau permulaan, yaitu tahapan dimulainya kegiatan pencarian informasi.
2. *Chaining* atau penghubungan, yaitu tahap dimana seseorang mulai menampakkan kegiatannya dengan mengikuti rantai yang menghubungkan antara bentuk bahan acuan dengan alat penelusuran.
3. *Browsing*, yaitu tahap yang ditandai dengan kegiatan pencarian mulai diarahkan pada bidang yang menjadi minatnya.
4. *Differentiating*, atau pembedaan, merupakan tahap dimana pencari informasi mulai menggunakan sumber-sumber yang beraneka ragam untuk menguji kualitas dari informasi yang dibutuhkannya.
5. *Monitoring* atau pengawasan, yaitu suatu tahap dimana pencari informasi mulai menyiapkan diri untuk pengembangan lebih lanjut dari pencarian informasi dengan cara memberi perhatian yang lebih serius terhadap sumber-sumber tertentu.
6. *Extracting* atau mensarikan, yaitu suatu tahap dimana kegiatan pencarian informasi dilakukan dengan lebih sistematis melalui pengelompokkan bahan-bahan yang menjadi minatnya.
7. *Verifying* atau pengujian ketepatan, yaitu tahap dimana pencari informasi mengecek apakah informasi yang didapat tepat atau sesuai dengan minatnya



8. *Ending* atau pengakhiran, yaitu tahap dimana pencari informasi mengakhiri proses kegiatan pencariannya pada saat berakhirnya topik yang ditulisnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uses and Gratifications Theory dari Katz, Blumler, & Gurevitch dan Information Processing Theory. Teori Uses and Gratifications menjelaskan bahwa individu (*audience*) aktif dalam memilih dan menggunakan media tertentu untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan mereka yang spesifik (West & Turner, 2007:428). Terdapat lima asumsi dasar dari Teori Uses and Gratifications, yaitu:

1. Audience adalah aktif dan mereka menggunakan media berorientasi pada tujuan.
2. Inisiatif menghubungkan pemenuhan kebutuhan dan pilihan media sepenuhnya milik audiens.
3. Media dan sumber lainnya bersaing untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
4. Masyarakat mempunyai kesadaran diri akan penggunaan medianya, minat dan motif yang membantu peneliti dalam hal alasan penggunaan media.
5. Penilaian isi media hanya dapat dilakukan oleh audiens.

Jenis-jenis kebutuhan yang dipenuhi oleh media (Katz, Gurevitch, & Haas, 1973):

No	Jenis kebutuhan	Deskripsi	Contoh media
1	Kognitif	Memperoleh informasi, pengetahuan, pemahaman	Televisi (berita), video, film (documenter)
2	Afektif	Emosi, kesenangan, atau pengalaman estetis	Film, televisi (sinetron, komedi)

3	Integratif personal	Meningkatkan kredibilitas, percaya diri, dan status pribadi	Video
4	Integratif sosial	Meningkatkan hubungan dengan keluarga, teman-teman dan masyarakat	Internet (e-mail, chat rooms, IM)
5	Melepaskan ketegangan	Pelarian diri dan diversifikasi dari rutinitas dan masalah	Televisi, film, video, radio, Internet

Penelitian Papacharissi dan Rubin dalam West & Turner (2007:436) menjelaskan bahwa individu memiliki lima motif dasar dalam menggunakan Internet, dan alasan paling utama adalah penemuan informasi. Mereka juga menjelaskan bahwa individu yang merasa nyaman secara interpersonal akan menggunakan Internet terutama untuk mencari informasi dan individu yang merasa kurang nyaman dalam interaksi tatap muka akan menggunakan Internet untuk motif sosial.

Teori Pengelolaan Informasi menggunakan analogi mekanis untuk menggambarkan dan menginterpretasikan bagaimana individu mengatasi semua stimuli informasi yang mereka terima (Baran & Davis, 2000: 270). Teori ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan rutinitas, perilaku tidak penting dalam pengelolaan informasi secara spesifik. Perspektif objektif mengenai proses belajar dan melakukan kesalahan adalah natural dalam pengelolaan informasi juga dibahas. Ia juga mengeksplorasi isi media yang beraneka ragam dan menyajikan hasil yang konsisten mengenai setting dan situasi komunikasi yang luas.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi evaluasi proses dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Studi evaluasi proses dalam penelitian ini merujuk pada evaluasi program PLIK yang berjalan dari tahun 2010 sampai saat ini di Kota Cilegon. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan hasil observasi dan wawancara mendalam dari key informan program PLIK di 8 kecamatan di Kota Cilegon. Menurut Denzin dalam Mulyana (2003:163), pengamatan adalah strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara dengan informan, dan partisipasi langsung. Sedangkan Zelditch dalam Mulyana (2003:171) mengatakan observasi merupakan bentuk riset terbaik untuk memahami peristiwa dan proses sosial.

Observasi dilakukan selama dua minggu di minggu ke-2 dan ke-3 bulan Maret 2012. Observasi difokuskan pada pelaksanaan program PLIK di 8 kecamatan di kota Cilegon, pengamatan perilaku pengguna layanan Internet kecamatan dalam mencari dan mengelola informasi, motif dan kebutuhan pengguna layanan Internet kecamatan.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi dan mengeksplorasi data yang diperoleh dari hasil observasi. Metode wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan alasan detail dari jawaban informan yang meliputi opini, motivasi, nilai-nilai atau pengalaman informan (Kriyantono,2006:65). Key informan yang terpilih dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Key informan dalam penelitian ini adalah pelaksana program PLIK di tiap kecamatan di Kota Cilegon. Pemilihan key informan berdasarkan tugas pelaksana program PLIK tersebut.

Data yang telah diperoleh dan terkumpul secara komprehensif selanjutnya dianalisis sesuai dengan kelompok data baik primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu melakukan penafsiran data dengan menggunakan tataran ilmiah atau logika. Secara umum proses analisis datanya mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja (Moleong,2010:288). Jika diimplementasikan proses analisis data kualitatif dengan penelitian yang hendak dilakukan maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan mencatat seluruh hasil observasi dan wawancara menurut identifikasi masalah.
2. Mengklasifikasikan data mengenai pelaksanaan Program Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di kota Cilegon, perilaku pencarian dan pengelolaan informasi kaum muda, motif dan kebutuhan pengguna layanan Internet kecamatan.
3. Mencari relevansi antara pelaksanaan PLIK, perilaku pencarian dan pengelolaan informasi oleh kaum muda di kota Cilegon, motif dan kebutuhan pengguna layanan Internet kecamatan.
4. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan bagaimana evaluasi pelaksanaan PLIK dan bagaimana kontribusinya kepada perilaku pencarian dan pengelolaan informasi kaum muda di kota Cilegon dan motif serta kebutuhan apa saja yang mendasari perilaku mereka dalam menggunakan layanan Internet kecamatan.

## **Pembahasan**

Kota Cilegon merupakan kota otonomi yang secara yuridis dibentuk berdasarkan UU No 15/1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. Undang-undang ini pula yang mengubah status kota administratif Cilegon menjadi kotamadya Cilegon. Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama penghubung pulau Jawa dengan pulau Sumatera. Secara geografis, kota Cilegon memiliki luas wilayah

175,50 kilometer persegi dan terbagi dalam 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Visi kota Cilegon adalah terwujudnya masyarakat Cilegon sejahtera melalui daya dukung industri, perdagangan dan jasa ([www.cilegon.go.id](http://www.cilegon.go.id)).

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di kota Cilegon mulai terinisiasi sejak 2010 yang ditandai dengan penjajakan kerjasama antara beberapa organisasi masyarakat atau individual dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Respon aktif mereka berupa inisiatif mereka untuk pemberdayaan masyarakat akan akses informasi yang lebih baik. Penjajakan kerjasama ini dilakukan tanpa adanya kontribusi secara langsung dari pihak pemerintah kota Cilegon. Proses inisiasi yang dilakukan sejak 2010 akhirnya terimplementasikan dalam penerimaan hibah program PLIK dari Kementerian Informasi dan Komunikasi mulai awal tahun 2011 secara bertahap berupa penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang terdiri dari 5 unit personal computer, 1 server, dan 1 printer dan perlengkapan penunjang seperti perlengkapan instalasi, meja kursi dan papan nama. Akan tetapi hibah program PLIK untuk kota Cilegon tidak meliputi penyediaan infrastruktur telekomunikasi seperti perangkat V-Sat dan mobil internet. Hal ini dikarenakan kota Cilegon masih dapat terkoneksi jaringan internet dengan kondisi yang baik (hasil wawancara dengan Atifulloh, koordinator PLIK kecamatan Cilegon).

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa dari 8 kecamatan (kecamatan Cilegon, Cibeber, Jombang, Grogol, Purwakarta, Pulomerak, Ciwandan dan Citangkil) di kota Cilegon yang menjadi target sasaran program PLIK, hanya Kecamatan Cilegon saja yang sudah mengimplementasikan infrastruktur telekomunikasi dan perlengkapan penunjangnya. Sedangkan kecamatan lainnya masih dalam proses implementasi. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi program PLIK ini terutama dalam hal daya dukung atau

support yang kontinu dan konsisten dari Kementerian Informasi dan Komunikasi dalam hal pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. Oleh karenanya pembahasan mengenai implementasi program PLIK ini hanya spesifik berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi PLIK kecamatan Cilegon.

Berdasarkan wawancara dengan Atifulloh (koordinator PLIK kecamatan Cilegon), Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kecamatan Cilegon sudah dilaksanakan sejak November 2011 yang berlokasi di Jalan Temuputih depan RSIA Kurnia Jombang Cilegon. PLIK ini melayani masyarakat yang ingin menggunakan akses Internet setiap harinya dari mulai pukul 9 pagi sampai dengan 8 malam. Masyarakat dapat menggunakan infrastruktur telekomunikasi dengan jaringan Internet untuk memenuhi kebutuhannya. PLIK Kecamatan Cilegon mendapatkan respon yang cukup baik terutama dari masyarakat sekitar lokasi PLIK. Berdasarkan penuturan Atifulloh, rata-rata pengunjung PLIK Kecamatan Cilegon 15-20 orang per harinya (data harian pengunjung PLIK kecamatan Cilegon) dan biasanya PLIK lebih banyak dikunjungi ketika sore sampai malam hari dan PLIK tidak mengenakan biaya penggunaan akses internet kepada pengunjungnya. Sebaran pengunjung PLIK Kecamatan Cilegon mayoritas adalah kaum muda di usia produktif (15-30 tahun) dan lebih banyak berjenis kelamin laki-laki. Peneliti menganalisis hal ini dikarenakan penggunaan akses teknologi untuk mencari informasi di luar rumah juga mensyaratkan adanya faktor keamanan dan kenyamanan.

Selama kurun waktu 5 bulan semenjak November 2011, pengunjung PLIK Kecamatan Cilegon menggunakan layanan internet ini untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan integratif sosial dan melepaskan tekanan dalam hidup. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengunjung PLIK lebih banyak menggunakan waktunya untuk membuka situs

jejaring sosial dan berselancar lebih lama di situs tersebut. Mereka juga lebih banyak menggunakan layanan internet untuk hal-hal yang menjadi hobi mereka seperti mendengarkan musik dan menonton film sebagai hiburan atau pelepasan masalah. Hanya terdapat beberapa pengunjung yang merupakan audiens aktif ketika menggunakan layanan internet kecamatan. Mereka kebanyakan adalah pelajar SMA yang menggunakan layanan internet untuk mencari informasi atau memenuhi kebutuhan kognitif bagi keperluan studinya seperti pengerjaan tugas atau makalah. Rata-rata waktu yang dihabiskan pengunjung ketika menggunakan layanan internet kecamatan sekitar 1-2 jam. Hal ini karena terbatasnya kapasitas bandwidth dan jaringan internet yang dimiliki PLIK Kecamatan Cilegon sehingga pengunjung membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat mengakses informasi.

Perilaku pencarian informasi pengunjung PLIK Kecamatan Cilegon juga melibatkan beberapa tahap dalam proses pencarian informasi seperti proses inisiasi, seleksi, eksplorasi (browsing), diferensiasi, koleksi, dan verifikasi. Pengunjung melakukan tahapan-tahapan ini dengan kategori yang berbeda. Misalnya tidak semua tahap dilakukan setiap kali menggunakan layanan internet tetapi disesuaikan dengan kebutuhan mereka pada saat itu. Perilaku pencarian informasi mereka pun dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis pekerjaan, waktu, pemahaman mereka akan teknologi yang digunakan, kepribadian, lingkungan, kondisi psikologis, dan peran sosial mereka dalam masyarakat. Misalnya pengunjung PLIK yang merupakan pelajar SMA dan memiliki minat terhadap olahraga akan mempunyai perilaku pencarian informasi yang berbeda dengan pengunjung PLIK yang adalah seorang karyawan pabrik dan juga seorang anggota organisasi pemuda.

PLIK Kecamatan Cilegon juga memiliki beberapa kendala terutama masalah pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi.

Seperti yang dijelaskan Atifulloh, apabila infrastruktur telekomunikasi yang digunakan bermasalah seperti kerusakan pada koneksi internet atau pada komputer, hal ini akan mengakibatkan terhambatnya akses informasi dan komunikasi bagi pengguna PLIK. Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Informasi dan Komunikasi dalam proses monitoring dan evaluasi merupakan hal yang sangat signifikan bagi keberlangsungan program ini.

## **Penutup**

Akses terhadap teknologi komunikasi dan informasi merupakan hal yang krusial dalam perkembangan masyarakat terutama masyarakat yang berbasis informasi. Pemerataan akses untuk semua warga di setiap daerah di suatu negara tanpa terkecuali adalah wujud kewajiban pemerintah demokratis dalam hal kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. Oleh karenanya pemerintah wajib membuat program yang dapat membantu terwujudnya pemerataan akses tersebut yang akan menunjang kebijakan pemerintah untuk menciptakan masyarakat informasi. Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) merupakan salah satu program yang mendukung terwujudnya program Desa Pintar di seluruh Indonesia. Akan tetapi implementasi PLIK masih jauh dari harapan terutama di kota Cilegon yang menjadi objek dalam penelitian ini. Seharusnya PLIK dapat menjadi awal bagi terciptanya masyarakat 'pintar' karena berbekal informasi, terutama kaum mudanya yang memiliki keahlian mencari dan menemukan informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi terbaru untuk memenuhi kebutuhannya maupun memecahkan berbagai persoalan hidup pribadi, masyarakat maupun bangsanya. Dukungan pemerintah yang kontinu dan partisipasi masyarakat yang tinggi merupakan aspek yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan dalam hal ini.



## Daftar Pustaka

- Baran, Stanley J & Davis, Dennis K. 2000. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future* 2<sup>nd</sup> edition. Wadsworth Thomson Learning.
- Belkin, NJ & Vickery A. 1985. Interaction in information systems: a review of research from document retrieval to knowledge-based systems. *Library and Information Research report no 35:11-19*
- Dilla, Sumadi. 2007. *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Flew, T. 2005. What's New about New Media. *New Media* (2<sup>nd</sup> ed), Oxford University Press, Melbourne.
- Ishak. 2006. Kebutuhan Informasi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK-UI Dalam Memenuhi Tugas Journal Reading. *Pustaka*. Vol. 2, No. 2, Desember 90-101.
- Jayakar, K.P and Sawhney, H. 2004. Universal service: beyond established practice to possibility space, *Telecommunications Policy*, Vol. 28, Issues 3-4, pp. 339-357.
- Kristanto, Andi. 2003. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yoyakarta: Gava Media.
- Krikelas, J. 1983. Information seeking behavior: Patterns and concepts. *Drexel Library Quarterly* vol 19(2):5-20.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Kulthau, Carol C. 2000. "Inside the searching process: Information Seeking from the user's perspective." *Journal*

of the American Society and Information Science Vol 42(5):49.

Mayer, Hester W. J. 2005. The Nature of Information, and The Effective Use Information in Rural Development. *Information Research*. Vol 13 No. 2 June 2008.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mulyana, Deddy. 2008. *Komunikasi Massa: Kontroversi, Teori dan Aplikasi*. Widya Padjadjaran. Bandung.

Nicholson, Angela. 2000. *Planning a Search Strategy*. [http://www.lib.ed.ac.uk/resbysub/PDF/search\\_skills\\_A4\\_booklet.pdf](http://www.lib.ed.ac.uk/resbysub/PDF/search_skills_A4_booklet.pdf) diakses pada 7 Maret 2012.

Pannen, Paulina. 1990. A Study in information seeking and use behaviors of resident students and non residents students in indonesian tertiary education. Disertasi. Syracuse: Syracuse University.

Pendit, Putu Laxman. 2003. *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Suatu Pengantar Diskusi Epistemologi dan Matodologi*. Jakarta: JIP-FSUI.

Schejter, Amit M. 2003. Public Broadcasting, the Information Society, and the Internet: A Paradigm Shift? In McCauley, M.P., Peterson, E.P., Lee Artz, B. & Halleck, D. (Eds), *Public Broadcasting and the Public Interest*, M. E. Sharpe, Inc, Armonk New York.

Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wasaa, 2008. *Characteristics of Information*.  
<http://wasaa.wordpress.com/2008/06/01/characteristics-of-information/> diakses pada 7 Maret 2012.

West & Turner. 2007. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application* 3<sup>rd</sup> edition. Mc Graw Hill.

Wilson, T.D. 2000. *Human Information Behavior*.  
<http://inforrn.nu/ArticlesNo13/v3n2p49-56.pdf> diakses pada 7 Maret 2012.

<http://inet.detik.com/read/2011/06/06/155631/1654196/398/pbb-akses-internet-hak-asasi-manusia>

<http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/08/20/195/USO-untuk-Kesejahteraan>

<http://www.forum-kita.net/tag/kemenkominfo>

[www.cilegon.go.id](http://www.cilegon.go.id)

Majalah Bisnis Komputer No. 03 Edisi Maret 2004

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi, 2010

Data Statistik Dirjen Pos dan Telekomunikasi, 2010

International Telecommunication Union, 2003

Kompas 19 Desember 2003

Hasil wawancara dengan Atifulloh (koordinator Pusat Layanan Internet Kecamatan Cilegon)

Hasil observasi PLIK kecamatan Cilegon

## Data pengunjung harian PLIK Kecamatan Cilegon

## KONSTRUKSI PEMIKIRAN ISLAM TENTANG PLURALISME DALAM FILM “TANDA TANYA (?)”

Oleh : Muhammad Jaiz, Husnan Nurjuman dan Yoki Yusanto

### **Pendahuluan**

Isu pemahaman keagamaan atau keislaman, menjadi isu yang cukup banyak diminati dan cukup banyak diangkat oleh media massa di Indonesia. Bahkan di Indonesia, jumlah media massa yang mengangkat tema-tema ke-Islaman cukup banyak, baik media yang menyatakan dirinya bervisi dakwah Islam atau hanya sebatas mengangkat Islam sebagai tema mereka. *Trend* isi tayangan bernuansa Islam tidak hanya berhenti di media cetak dan dunia pertelevisian. Beberapa tahun terakhir, dunia film Indonesia juga diramaikan oleh berbagai produksi film bertema Islam. Beberapa judul di antaranya “Perempuan Berkalung Sorban”, “Ayat - Ayat Cinta”, “Ketika Cinta Bertasbih”, “Emak Ingin Naik Haji” dan “Sang Pencerah” .

Di antara film tersebut ada yang menyampaikan topik tentang ahlak, seperti pesan agar berbakti kepada orang tua atau mencintai sesama. Namun ada pula beberapa membahas berbagai isu kontroversi dalam Islam seperti poligami, hak - hak perempuan dan perbedaan *mazhab* dalam Islam. Pembahasan berbagai isu kontroversi dalam pemikiran Islam

menjadi suatu hal yang penting dalam film. Hal disebabkan karakter film yang ditayangkan dengan durasi cukup panjang, mensyaratkan alur cerita dengan adegan-adegan konflik yang ditampilkan memiliki makna yang berbeda.

Salah satu isu kontroversi dalam pemikiran Islam adalah pluralisme. Isu ini menjadi hangat karena berkaitan dengan unsur pokok dalam ajaran Islam yaitu akidah atau sistem keyakinan. Dibandingkan dengan tema - tema kontroversi lainnya, isu ini merupakan isu yang paling keras. Isu - isu kontroversial Islam lain yang diangkat dalam film masih sebatas multi tafsir tentang ajaran fikih dalam Islam, namun isu pluralisme langsung menyentuh dasar keyakinan umat Islam yang diidentikan dengan doktrin bahwa Islam adalah satu - satunya agama yang benar di muka bumi.

Film "Tanda Tanya (?)" yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang sebelumnya pernah menyutradarai berbagai film bertema Islam lainnya ("Perempuan Berkalung Sorban", "Ayat - Ayat Cinta" dan "Sang Pencerah") adalah film yang menceritakan realitas keberagaman agama di Indonesia. Film ini menggambarkan bahwa di masyarakat Indonesia, orang dengan agama yang berbeda - beda harus hidup bersama dalam satu wilayah dengan keyakinan, adat kebiasaan, ritual dan aturan norma masing - masing.

Ada dua komponen utama yang menjadi bagian dalam film ini. Pertama, konflik atau gesekan yang muncul di tengah masyarakat yang beragam dari segi keyakinan, kebiasaan, budaya dan norma. Kedua, film ini menyampaikan ide tentang sikap yang seharusnya diambil dalam menyikapi perbedaan agama. Sebagai film yang menyampaikan ide atau pesan dari pembuatnya, maka film "Tanda Tanya (?)" mengandung pemahaman sang sutradara atau kelompok kreatif pembuatnya tentang pluralisme. Konsep pemikiran tentang perbedaan agama. Pluralisme sendiri sebagaimana yang diuraikan oleh Anis Malik Toha, memiliki tiga varian pemikiran, yaitu teologi

global (substansi sama dengan sistem yang berbeda), humanisme (berpangkal pada persoalan manusia) dan sinkretisme (pembauran sistem agama).

Lebih jauh lagi, sebagai sutradara yang beragama Islam dan memiliki riwayat pembuatan film – film bertema Islam, maka berbagai adegan, dialog, setting gambar, suara dan unsur teknis penayangan lain dalam film ini juga bertutur mengenai pemahaman ke-Islaman sang sineas mengenai pluralisme. Pada penelitian terdahulu, yaitu Konstruksi Media Islam Indonesia tentang Pemikiran Pluralisme dalam Islam (penelitian Husnan Nurjuman tahun 2006), digambarkan bahwa cendekiawan dan ulama Islam Indonesia terpolarisasi kepada dua pemikiran yang berbeda mensikapi pluralisme. Pertama, kelompok Islam institusi yang melihat pluralisme sebagai paham yang berbahaya. Kedua, kelompok Islam substantif yang melihat pluralisme sebagai keniscayaan dari ajaran Ibrahim, yang Islam dipandang sebagai penerusnya.

Penelitian tentang konstruksi oleh media, bukanlah kajian yang baru. Berbagai teori telah muncul untuk menjelaskan bahwa media bukanlah suatu hal yang bekerja tanpa agenda dan tanpa dipengaruhi oleh suatu struktur tertentu. Berbagai teori tentang media sebagai agen sosialisasi dan konstruksi realitas disampaikan oleh David Croteau, William Hoynes dan Eryanto. Dari sudut pandang kajian komunikasi, film “Tanda Tanya (?)” merupakan agen konstruksi realitas atau agen sosialisasi tentang salah satu varian pemikiran Islam tentang pluralisme. Maka diperlukan kajian lebih lanjut tentang varian pemikiran Islam yang mana yang menjadi ide dan pesan film “Tanda Tanya (?)”.

## **Metode**

Kajian terhadap film “Tanda Tanya (?)” yang menguraikan berbagai analisis secara mendalam berupa uraian interpretasi berbagai adegan dan dialog dalam film “Tanda

Tanya (?)". Analisis kualitatif ini dilaksanakan dengan metode analisis isi kualitatif. Metode ini akan menjadi sarana untuk mengungkap berbagai makna, pemikiran atau ideologi yang terkandung dalam film "Tanda Tanya (?)" secara mendalam, melalui pengamatan terhadap adegan, dialog, musik pendukung setting gambar dan hal teknis lainnya yang terdapat dalam film tersebut. Dalam analisis ini, adegan, dialog dan berbagai komponen lain dalam film merupakan fenomena yang dapat dikaji dan disimpulkan kepada tataran konsep yang berdasar kepada berbagai rujukan terkait pemikiran Islam tentang pluralisme. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menyampaikan berbagai pemikiran yang dikonstruksi melalui film "Tanda Tanya (?)".

Analisis ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data. Antara lain : 1) Studi Dokumentasi. Dilakukan dengan mengkaji DVD Film "Tanda Tanya (?)". 2) Studi Pustaka. Dilakukan dengan mengkaji berbagai buku bacaan dan rujukan yang terkait dengan pemikiran Islam tentang pluralisme.

Tahap analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan, memilah dan membandingkan unit pengamatan dalam unit analisa berdasarkan berbagai konsep yang ada dalam kajian pemikiran Islam tentang pluralisme. Sebagaimana pendapat Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola.

## **Hasil Kajian**

### **Konstruksi Pemikiran Pluralisme dalam Film Tanda Tanya ("?")**

Setelah dilakukan analisis terhadap setiap adegan dan dialog yang ada dalam film "?", penulis menemukan beberapa dialog atau adegan yang menggambarkan konstruksi pemikiran Islam yang diwakili oleh si pembuat film tentang pluralisme



dan varian aliran ajaran Islam. Berikut ini akan diuraikan beberapa adegan tersebut :

1. Adegan 1, adegan pastur membacakan pemahaman Rika tentang tuhan,
2. Adegan 2, adegan saat perayaan ulang tahun Surya dan Rika membacakan kutipan novel *'Lead to God'* sebagai kadonya,
3. Adegan 3, adegan saat Hendra bertanya kepada ustad apa arti Islam,
4. Adegan 4, adegan saat Soleh berusaha menyelamatkan jemaat gereja dari teror bom saat menjaga perayaan Natal,
5. Adegan 5, adegan yang berisikan potongan-potongan ayat Al-quran dan alkitab juga kutipan perkataan Budha,

Dari berbagai adegan dan dialog dalam film “?”, dapat diinventarisasi berbagai konstruksi yang dibangun tentang pemikiran Islam mengenai pluralisme. Berbagai konstruksi tersebut antara lain :

1. Bahwa tiap agama samawi berlandaskan pada wahyu yang bersumber dari tuhan yang sama dengan penamaan dan penggambaran yang berbeda,  
Film “?” menggambarkan pluralisme agama sebagai suatu paham perbedaan agama tanpa perbedaan Tuhan. Suatu paham yang meyakini bahwa pada hakikatnya Tuhan di setiap agama itu adalah sama. Walau paham ini membatasi bahwa agama dengan Tuhan yang sama itu terbatas pada agama - agama samawi atau agama yang didasarkan pada wahyu, bukan agama yang didasari pada kekuatan roh leluhur (animisme) atau kekuatan suatu benda (dinamisme) dan paganisme.

Penggambaran beda agama dengan satu tuhan tersebut dapat dilihat pada adegan 1 (Disk 1, menit 36:02) ketika Rika (perempuan yang pindah agama dari Islam menjadi katholik) harus mempresentasikan tugas dari pastur dalam

suatu sekolah minggu (forum kajian agama di gereja yang diasuh oleh pastur) tentang Tuhan dalam prespektif masing masing anggota jema'at.

Dalam adegan ini pastur membacakan kertas yang didalamnya terdapat tulisan pemahaman para jemaatnya tentang tuhan atau konsep tuhan secara personal. Rika sebagai jemaat baru karena baru berpindah agama merasa bingung saat mengisi kertas tersebut. Oleh karena itu pemahaman yang dia tuliskan dalam kertas tersebut ialah arti atau konsep tuhan dalam Islam yang ia pahami selama ini sebelum ia berpindah agama. Saat dibacakan tulisan Rika oleh pastur, ada beberapa jemaat yang kaget dan merasa tak senang dengan pemahaman Rika tentang Tuhan Yesus. Seakan-akan Rika menyamakan tuhan Yesus dengan Allah dalam agama Islam. Rika pun canggung saat pastur membacakan hasil pemahaman tuhannya kepada jemaat sampai selesai walau terlihat ada beberapa jemaat yang tidak senang ketika mendengarnya.

Adegan lain yang menunjukkan pemahaman ini juga terlihat pada adegan 2 (Disk 2 menit 20:40). Dalam adegan ini Rika, Surya dan Abi merayakan ulang tahun Surya yang ke 30 tahun. Rika memberikan kue dan beberapa kado, salah satunya adalah kutipan novel '*Leads to God*' karena Rika begitu menyukai kutipan tersebut karena sesuai dengan apa yang ia yakini dan percayai bahwa pencarian tuhan bisa dengan berbagai cara. Ia ingin Surya pun dapat memahami makna yang terkandung dalam kutipan dari novel tersebut. Bagi Rika, Surya bukan orang lain lagi yang melabeli keyakinannya itu sebagai sebuah kemurtadan atau pengkhiatan terhadap agama. Saat Rika membacakan kutipan tersebut surya mendengarkan dan berusaha memahami maknanya. Kemudian dilanjutkan dengan adegan Menuk yang tidak menyukai tindakan suaminya yang melakukan aksi kerusuhan di restoran koh Tan Kat

Sun. Pembacaan kutipan Rika berakhir dengan gambar rumah peribadatan tiga agama; Islam, Kristen katolik, Budha.

2. Pandangan bahwa secara substansi ajaran agama samawi adalah sama, namun secara Institusi tetap berbeda.

Hal kedua yang dikonstruksikan dalam film “?” adalah suatu pandangan bahwa Islam secara substansi adalah ajaran yang sama yang diajarkan kepada para nabi sebelum masa nabi Muhammad SAW. Pemikiran ini merupakan varean pemikiran islam yang melihat islam tidak sebagai institusi agama, tapi secara substansi. Pandangan ini melihat bahwa Islam secara substansi telah ada dan dibawa oleh para nabi sejak Nabi Adam AS hingga Rasulullah Muhammad SAW. Karena ajaran tiap nabi tersebut mengalami proses sejarah dan bmasing masing berubah menjadi instirusi agama, maka ajaran - ajaran kemudian berdiri masing - masing sebagai bagian dari sistem agamanya masing - masing. Namun karena sumber ajarannya adalah nabi yang diutus tuhan yang sama, maka varean pemikiran ini melihat bahwa ajaran - ajaran tiap agama yang tergabung dalam agama samawi tersebut adalah sama secara substansi.

Konstruksi tentang pemikiran pluralisme seperti tersebut di atas, tergambar dalam adegan 3 (Disk 2 menit 28:42). Dalam adegan ini Ping Hen sudah mulai menentukan pilihan penting dalam hidupnya yaitu ingin memeluk agama Islam. Dalam adegan ini ia mendatangi ustad ke masjid dan bertanya tentang arti Islam. Saat ustad menjelaskan arti Islam adegan diselingi dengan adegan orang tua Rika yang mendatangi Rika dan Abi tepat saat perayaan khatam Al-Quran Abi. Dalam adegan tersebut juga digambarkan bagaimana Rika yang sudah beragama kristen katolik membuatkan perayaan khataman Al-Quran untuk Abi dengan membagi-bagikan santunan kepada anak-anak tidak

mampu. Kemudian adegan berganti dengan Ping Hen resmi berganti agama menjadi Islam.

Adegan tersebut menunjukkan bahwa pluralisme dalam adegan ini terkait dengan arti Islam itu sendiri. Pembuat film ini menyadari bahwa pengertian Islam sangat pluralis yang disampaikan dengan gambar atau adegan yang menunjukkan welas asih atau berkasih sayang (seperti Rika seorang pemeluk Agama Katolik memberi santunan kepada anak-anak tidak mampu saat perayaan khataman Qur'an Abi anaknya yang masih beragama Islam.) dalam pengertian Islam adalah bermanfaat bagi orang di sekelilingmu (*rahmatil lil'alamiin*).

3. Pandangan bahwa secara substansi, ajaran agama diperuntukan bagi kebaikan seluruh manusia tanpa melihat agama.

Konstruksi lain dari pandangan pluralisme menurut salah satu varean Islam yang terkandung dalam film “?” adalah sebuah pandangan bahwa tujuan dari agama - agama samawi itu adalah kebaikan manusia. Hal tersebut digambarkan dalam adegan pada adegan 4 (Disc 2 menit 25:15). Adegan ini menggambarkan kepanikan Soleh saat menemukan kardus yang berisikan bom rakitan di bawah salah satu barisan kursi gereja dalam tugas dinas sebagai banser menjaga gereja saat malam natal. Dalam adegan ini pula disisipkan adegan-adegan ulang (*flashback*) tentang bagaimana Soleh menerima pekerjaan sebagai banser NU adalah jihad. Bahwa ia ingin berarti untuk istri, keluarga, dan agamanya. Sehingga ia memutuskan untuk membawa bom tersebut ke luar gereja untuk melindungi jamaat gereja dan orang-orang di sekitar dengan mengorbankan dirinya meledak bersama bom tersebut di area parkir gereja. Suatu pernyataan yang patas digarisbawahi dari adegan tersebut adalah ungkapan bahwa untuk berarti bagi agama adalah dengan berbuat

kebaikan pada sesama manusia, walau manusia yang ditolong itu adalah berbeda agama.

Adegan laian yang menunjukan bahwa tujuan dari semua agama adalah kebaikan manusia, terdapat pula dalam adegan 5 (Disc 2 menit 30:42). Adegan ini hanya berisikan potongan-potongan ayat dari berbagai sumber pemahaman agama ; al quran, alkitab, dan perkataan Budha. Dari semua sumber tersebut menyerukan satu tujuan, yaitu saling berkasih sayang dan menghargai. Teks - teks tersebut antara lain :

- a. "Allah tidak melarangmu berbuat adil kepada kepada orang kafir yang tidak memusuhimu" (QS Al-Mumtahanah : 8)
- b. "Kasihilah sesamamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri (Matius 22 : 36-40)
- c. "Cinta sejati tidak pilih kasih, tidak bersyarat, tidak melekat, dan selalu ingin berbagi" Budhist

Teks - teks tersebut menggambarkan suatu pembenaran bahwa tiap agama mengajarkan untuk selalau berbuat baik kepada setiap orang, meski orang yang ditolong atau diuntungkan oleh perbuatan baik itu berasal dari kelompok agama yang berbeda. Jika di lihat dari sudut pemikiran islam tentang pluralisme, maka film ini menggambarakan suatu pandangan bahwa islam mengakui bahwa setiap ajaran agama samawi menyampaikan ajaran tentang adanya berbelas kasih, tolong menolong dan solidaritas tanpa memandang batas - batas agama.

### **Konstruksi Realitas Sosial Tentang Pluralisme**

Konstruksi realitas sosial merupakan preses terbentuknya suatu realitas pengetahuan melalui suatu proses interaksi sosial. Realitas adalah sesuatu hal yang sebenarnya diinternalisasikan oleh atau melalui suatu proses sosial (Peter L.

Berger, Thomas Luckmann, 1966, h. 196). Pembentukan realitas pengetahuan itulah yang kemudian menjadi fokus dalam pembahasan mengenai isu pluralisme yang diangkat dalam film “?” sebagai suatu media massa yang berperan dalam proses konstruksi realitas sosial.

Sebagaimana telah diuraikan oleh Burhan Bungin dalam buku sosiologi komunikasi tentang tiga tahapan konstruksi Realitas (eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi), maka pembahasan tentang konstruksi realitas mengenai pluralisme pun dapat dikaji berdasarkan tiga tahapan tersebut. Eksternalisasi membahas bagaimana individu - individu dalam masyarakat berinteraksi dengan realitas dan produk pemikiran yang ada mengenai agama. Objektifikasi membahas bagaimana interaksi antar individu dalam masyarakat terkait tentang pemikirannya mengenai agama dan pluralisme membentuk suatu kelompok sosial atau terinstitusionalisasi dalam suatu madzhab atau aliran pemikiran tertentu. Sedangkan pada bagian internalisasi akan dipaparkan tentang bagaimana individu yang telah tergabung dengan aliran pemikiran tertentu mengenai pluralisme agama mengidentifikasikan dirinya dalam proses sosial.

Konstruksi realitas tentang pluralisme dan pemikiran Islam tentang pluralisme. Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai suatu bangsa yang satu, masyarakat telah dihadapkan dengan realitas kemajemukan suku, bahasa, adat istiadat, budaya dan agama. Keberagaman tersebut kemudian meengkondisikan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan keterikatan kondisi dan kebutuhan yang sama sebagai suatu bangsa. Namun, kendati hidup berdampingan dan berinteraksi, agama merupakan suatu cara pandang utama dalam masyarakat yang menjadi sumber dari nilai - nilai yang dianut. Perbedaan agama cukup berperan dalam menimbulkan perbedaan nilai - nilai operasional yang ada di masyarakat termasuk nilai dalam melihat perbedaan

agama itu sendiri. Karena agama berkembang dengan sistem dan sejarahnya masing - masing yang pada perjalanannya memproklamirkan dirinya sebagai kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak berarti bahwa agama yang dianut adalah satu - satunya kebenaran dan meniadakan kebenaran pada agama yang lain. Pada sisi ini, pluralisme cenderung dipahami berbeda dengan pluralitas. Pluralitas adalah suatu realitas kemajemukan yang tidak bisa dibantah keberadaannya, sedangkan pluralisme adalah paham yang meniadakan kebenaran mutlak agama sebagai suatu pemikiran yang membahayakan agama.

Di sisi yang lain, ada juga sekelompok masyarakat yang terus mengkaji ilmu agama secara mendalam dan mencoba memahami substansi ajaran agama, menemukan cara lebih terbuka, termasuk menelusuri sejarah dari tiap agama yang kemudian menemukan cara pandang lain dalam melihat pluralisme. Mereka melihat pluralisme merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama itu sendiri. Pemahaman mereka terhadap perbedaan agama tidak dari sisi ajaran agama secara substansi, tapi perbedaan agama dilihat sebagai akibat dari satu proses sejarah perkembangan agama.

Proses pertemuan antara individu dan masyarakat dengan kedua cara pandang tersebut dalam kajian konstruksi realitas desbut dengan eksternalisasi. Suatu proses interaksi antara masyarakat dengan wacana pluralisme. Masyarakat atau individu dalam masyarakat memiliki pengalaman yang berbeda ketika mereka berinterakis dengan wacana pluraslime.

Terkait dengan proses eksternalisasi, ada individu - individu yang bertemu dan berinterkasi dengan suatu realitas pengethauan bahwa klaim kebenaran agama merupakan suatu hal yang mutlak dan tak dapat diganggu gugat. Sehingga penerimaan terhadap pluralisme merupakan suatu hal yang salah. Agama yang dianut merupakan satu - satunya kebenaran, sehingga menurut pemikiran ini, kebenaran,

kebahagiaan hakiki hanya dimiliki oleh penganut agamanya saja, sedangkan yang lainnya adalah sesat.

Proses eksternalisasi juga terjadi dengan individu - individu yang lain yang berinteraksi dengan pandangan bahwa pluralisme merupakan suatu hal yang nyata ada dan tak dapat dielakan, bahkan menjadi bagian dari ajaran itu sendiri. Jika mengikuti alur pembahasan Dr. Anis Malik Toha dalam bukunya yang berjudul *Trend Pluralisme Agama* (2005, 49 - 121), individu - individu yang berinteraksi dengan wacana pluralisme tersebut dapat dikelompokkan menjadi individu yang bertemu dengan tiga kelompok pemikiran. 1) Pemikiran bahwa pluralisme merupakan pandangan bahwa semua agama adalah sama baik secara substansi maupun operasionalnya, sehingga mencampuradukan agama tidak menjadi suatu persoalan. 2) Pemikiran bahwa pluralisme adalah suatu pengakuan tentang kebenaran substansi yang sama pada tiap agama, meski agama sendiri tetap merupakan suatu institusi yang berbeda. 3) Pandangan bahwa manusia adalah pusat dari tujuan mengapa agama itu ada, sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi persoalan.

Berbagai pemikiran tersebutlah yang ditemui oleh para individu melalui jalan pertemuan atau pengalaman yang berbeda - beda. Individu - individu tersebut berinteraksi melalui berbagai jalur interaksi, antara lain pendidikan keluarga, lingkungan, buku bacaan, pendidikan formal di sekolah, kelompok kajian agama dan tentu saja media massa. Sebagai contoh, seorang anggota jama'ah pengajian akan cenderung berinteraksi dengan pengajaran dari ustadznya tentang klaim kebenaran mutlak agama islam, sedangkan seorang mahasiswa yang mempelajari sejarah agama dan perbandingan agama akan cenderung melihat proses terbentuknya suatu agama sebagai suatu kajian sejarah. Demikian juga dengan individu lain yang mempelajari agama Islam di timur tengah, akan mendapati produk pengetahuan



yang berbeda dengan mahasiswa muslim lulusan kajian agama di Kanada atau Belanda.

Berbagai produk pengetahuan yang dalam contoh tersebut diidentifikasi dengan pengajaran ustadz, kajian sejarah agama, perbandingan agama, materi kitab klasik di perguruan tinggi Islam di Timur Tengah dan metode studi Islam di perguruan Tinggi di Kanada dan Belanda. Produk pengetahuan tersebut bertemu dengan pengalaman pribadi tiap individu tentang realitas kemajemukan agama. Maka proses pertemuan tersebut akan menjadi interkasi yang disebut dengan eksternalisasi dalam proses konstruksi realitas sosial yang baru tentang pemikiran mengenai pluralisme.

Selanjutnya, sebagai wujud hasil pertemuan antara realitas pengetahuan dan pengalaman individu - individu tersebut, terbentuklah paham tentang pluralisme dalam berbagai pemikiran yang berbeda. Manusia dengan berbagai pemikiran tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Kesamaan pemikiran beberapa individu dengan sendirinya akan membuat mereka berkelompok dan kemudian melembagakan kelompoknya menjadi satu aliran atau madzhab tertentu tentang pluralisme. Proses pelembagaan tersebut kemudian disebut dengan objektifikasi.

Pada fase objektifikasi, pemikiran yang terbentuk dari proses eksternalisasi tersebut dibakukan menjadi sesuatu realitas yang telah berada di luar diri individu - individu yang terlibat sebelumnya. Realitas pengetahuan tersebut menjadi realitas yang disepakati dalam suatu institusi dan dijadikan sebagai dasar mengapa institusi itu ada, atau setidaknya menjadi substansi atau identitas kelompok. Institusionalisasi pemikiran tersebut telah mendorong suatu realitas yang seolah berada di atas diri individu, bahkan sanggup menjadi kontrol bagi individu tersebut.

Terkait dengan pemikiran mengenai pluralisme, objektifikasi yang kemudian terjadi adalah pemikiran

pluraslisme telah berkembang menjadi kelompok aliran tentang pluralisme, dan kelompok pemikiran Islam tentang pluralisme. Kelompok - kelompok tersebut secara garis besar dibagi kepada dua bagian antara lain kelompok yang melihat pluralisme sebagai ancaman terhadap kebenaran mutlak agama, dan kelompok lainnya adalah kelompok yang melihat bahwa pluralisme adalah suatu hal yang takl terpisahkan dari agama itu sendiri. Mengutip paparan Dr. Anis Malik Toha Toha (Toha, 2005, 49 - 121), kelompok yang kedua ini pun terbagai dalam tiga varian yaitu *teologi global* (bahwa agama secara substansi adalah sama, namun secara institusi berbeda), *sinkretisme* (terdapat kesamaan pada agama sehingga dapat dicampuradukandalam credo, ritus dan norma), *humanisme sekular* (bahwa perbedaan agama tidak menjadi persoalan selama menjaga nilai - nilai kemanusiaan).

Tahap terakhir dari proses konstruksi realitas adalah internalisasi. Para penganut madzab dan aliran tentang pluralisme kemudian akan melakukan indetifikasi dirinya dengan menyesuaikan apa yang dia kerjakan, dia sikapi dengan ajaran - ajaran yang telah baku dalam kelompok atau institusi tempat dia menjadi anggotanya. Mereka akan melakukan berbagai langkah berdasarkan posisinya masing - masing untuk mengamalkan nilai - nilai yang dianut oleh kelompoknya.

Internalisasi tiap penganut madzhab dan varian pemikiran Islam tentang Pluralisme akan memberikan dampak dalam kehidupan mereka berinterksi sosial sehari - hari. Anggota kelompok pemikiran pertama akan cenderung bersikap eksklusif dalam hal - hal yang bersifat keagamaan dan memiliki stigma tertentu kepada kelompok agama lain. Sedangkan anggota kelompok kedua akan lebih terbuka terhadap berbagai wacana yang terkait dengan isu lintas agama.

Pada proses eksternalisasi, Film “?” merupakan wujud dari interaksi antara berbagai pengalaman individu dengan berbagai pemikiran tentang pluralisme. Berbagai realitas pengalaman dan pengetahuan tersebut antara lain : 1) Realitas keberagaman agama di Indonesia. 2) Klaim kebenaran agama dan praktik penafsiran agama yang eksklusif. 3) Sejarah konflik antar agama. 4) Kesadaran semu tentang pluralisme di era orde baru. 5) Eufhoria kebebasan berpendapat pasca reformasi. 6) Praktik kekerasan atas nama agama. 7) Berkembangnya berbagai pemikiran tentang pluralisme. Ketujuh faktor tersebut menjadi realitas yang ditemui oleh masyarakat Indonesia. Bagi para aktivis pejuang pluralisme termasuk para sineas dalam Dapur Film. Proses eksternalisasi yang mereka alami menggiring pada suatu proses objektifikasi.

Film “?” merupakan wujud objektifikasi dalam berbagai bentuk komunitas dan gerakan kampanye yang terkait dengan isu pluralisme agama. Komunitas dan gerakan tersebut antara lain : 1) komunitas /gerakan kampanye kerukunan beragama dan anti eksklusifisme agama. 2) Komunitas / gerakan kampanye penegakan HAM dan pluralisme. 3) Komunitas / gerakan kampanye anti kekerasan atas nama agama.

Lebih lanjut, film “?” menjadi suatu referensi dalam kajian berbagai kelompok yang bersetuju dengan berbagai gerakan kampanye tersebut. Komunitas gerakan tersebut melakukan internalisasi dengan menggunakan film “?” sebagai materi kajian mereka. Materi kajian yang kemudian menimbulkan sikap dan perilaku yang memperkuat pandangan tentang pluralisme.

Dengan penggambaran pluralisme sebagai latar dan isi film “?”, kemudian film tersebut menjadi materi diskusi pluralisme, dapat terlihat peran film “?” dalam proses konstruksi realitas. Film “?” berperan sebagai sarana sirkulasi tentang proses konstruksi realitas tentang pluralisme sekaligus menjadi saluran dan partisipan konstruksi realitas tersebut.

## **Peran Media dalam Konstruksi Realitas Sosial tentang Pluralisme.**

Bagian kedua dalam pembahasan tentang media dan konstruksi realitas sosial mengenai pluralisme adalah bagaimana kontribusi media dalam keseluruhan proses konstruksi realitas sosial tentang pluralisme, baik pada tahap eksternalisasi, objektifikasi maupun internalisasi. Burhan Bungin menyampaikan bahwa substansi peran media dalam konstruksi realitas sosial adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan amat cepat dan sebarannya merata (Bungin, 2006, 207).

Dengan demikian media pertama, berperan untuk mempermudah dan memperlancar proses interaksi antara individu dalam masyarakat berinteraksi dengan suatu produk pengetahuan (eksternalisasi). Individu dalam masyarakat dapat bertemu dengan berbagai produk pengetahuan dengan mudah setelah mengetahui produk tersebut dari bacaan, siaran radio, televisi dan internet.

Kedua, media menjembatani interaksi antar individu sehingga akhirnya terbentuk suatu institusionalisasi (objektifikasi). Melalui media massa, antar individu yang berbeda pendapat dan pemahaman berdasar hasil interaksinya akan terjembatani melalui polemik yang difasilitasi media, sekaligus juga bagi yang berpemikiran sama akan terjembatani dalam berbagai forum komunikasi, obrolan publik, dan lain sebagainya yang terdapat dalam media massa. Selanjutnya media memfasilitasi pembentukan opini yang menggiring pada pelemagaan opini tersebut.

Ketiga, media membantu individu yang telah tergebung dalam satu institusi untuk mengidentifikasi dirinya dengan sistem dan nilai yang diterapkan oleh institusi tersebut (internalisasi). Individu dapat menyelaraskan pikiran, sikap dan perilakunya sehari - hari dengan berbagai pesan yang ia terima melauai media massa yang menampilkan nilai -

nilai yang telah terlembagakan. Media menjadi jendela antara individu anggota kelompok dengan kelompoknya, atau antara individu dengan pemikiran yang telah menjadi lembaga atau ideologi.

Dalam konstruksi realitas tentang pluralisme agama, media berperan sebagai sarana menyebarkan secara luas, merata dan cepat berbagai wacana tentang pluralisme. Media melalui berita, talkshow, artikel, gambar photo, musik, film dan berbagai hal lain yang ditampilkan dalam konten media. Media berperan menyampaikan berbagai produk pengetahuan tentang agama dengan berbagai varean pemikirannya kepada masyarakat agar masyarakat yang telah melalui pengalaman dengan relitas kemajemukan bereksternalisasi dengan pluralisme. Kemudian media massa juga membangun suatu opini yang berbeda - beda tentang pluralisme agama yang menggiring pada pembentukan suatu institusi atau pengelompokan aliran tertentu dalam masyarakat tentang suatu paham tentang pluralisme. Lebih jauh, masyarakat akan menyesuaikan pandangan dan sikapnya tentang pluralisme berdasarkan rujukan dari media yang menurut masyarakat sesuai atau menyampaikan pesan dari madzhab pemikiran pluralisme yang diikutinya.

Kajian media dalam konstruksi realitas sosial harus dilihat dari prespektif posisi keterlibatan media dalam suatu issue. Media tidak hanya berperan sebagai cermin realitas, tapi juga berperan sebagai partisipan atau pemain yang berpihak dalam suatu pross kontruksi realitas (Shoemaker dan Reese, 1996, 33). Maka dalam konstruski realitas tentang pluralisme pun, peran media massa sangat dipengaruhi dengan posisi keberpihakan media pada salah satu madzhab atau aliran pemikiran tentang pluralisme.

Terkait dengan film “?” sebagai salah satu media yang terlibat dalam proses konstruksi realitas sosial tentang pluralisme. Setelah dilakukan analisis isi kepada film tersebut,

dapat diketahui bahwa film “?” memiliki keberpihakan pada suatu konstruksi tertentu tentang pluralisme. Berbagai adegan dan dialog yang ditampilkan dalam film arahan Hanung Bramantyo tersebut menunjukkan bahwa para sineas dalam film “?” memahami bahwa pluralisme adalah sebuah pemikiran yang melihat bahwa agama merupakan suatu produk ajaran yang sebenarnya membawa substansi ajaran yang sama bahkan berorientasi kepada Tuhan yang sesungguhnya sama melauai jalan *credo*, *ritus* dan *norma* yang berbeda - beda.

Para sineas film “?” memediasi konstruksi realitas dengan sirkulasi informasi tentang paham pluralisme yang mereka anut melalui berbagai adegan dan dialog dalam film. Film “?” adalah produk budaya yang menjadi bagian dari seluruh proses konstruksi realitas sosial tentang pluralisme.

### **Peran dan Posisi Media Dalam Polarisasi Pemikiran Islam Tentang Pluralisme.**

Dalam kajian terdahulu tentang Konstruksi Media Islam Indonesia tentang pemikiran Islam Mengenai Pluralisme (Nurjuman, 2006), disebutkan bahwa peta-peta pemikiran Islam yang mengaji isu tentang pluralisme dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama melihat bahwa Islam adalah suatu kesatuan sistem yang telah baku sebagai kesepakatan para ulama yang bersumber dari Qur'an dan Sunnah Muhammad yang berlaku mutlak. Kelompok kedua adalah kelompok yang memahami Islam sebagai nilai yang ada sejak zaman para nabi sebelum Muhammad yang kemudian berkembang menjadi agama yang berbeda - beda.

Kelompok Islam institusi melihat bahwa yang dimaksud Islam sebagai satu - satunya agama yang diterima disisi Allah adalah Islam yang sudah berbentuk kesatuan sistem akidah, syari'ah dan akhlak. Kelompok ini memandang agama lain sebagai suatu hal yang sesat dan melihat para pemeluk agama

yang berbeda bukanlah orang – orang yang akan selamat di akhirat. Kelompok ini melihat pluralisme sebagai suatu ancaman terhadap keyakinan akidah Islam dan merupakan suatu hal yang harus dilarang bahkan ditentang.

Kelompok Islam substantif melihat bahwa yang dimaksud Islam sebagai satu – satunya yang diterima di sisi Allah adalah Islam yang diajarkan kepada umat nabi Adam sampai nabi Muhammad. Walau dalam proses sejarah, ajaran para nabi tersebut berkembang menjadi agama dengan sistem keyakinan, sistem ritus dan norma yang berbeda, nilai – nilai substansi ajaran agama yang masih ada merupakan bagian dari *Diinul Islam* itu sendiri. Bagi kelompok ini perbedaan agama hanya merupakan perbedaan jalan menuju satu tuhan yang sama.

Dalam sudut pandang Islam substansif, agama dilihat sebagai suatu sistem yang tidak hanya dilihat dari perangkat sistemnya (Akidah, Syari'ah dan Ahlak), tapi lebih fokus kepada tujuan agama itu sendiri. Tujuan agama atau lebih tepatnya dinul Islam adalah kemaslahatan manusia hamba – hamba Tuhan di dunia dan akhirat (Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, 2009, 278). Maka menurut pandangan mereka, seorang penganut agama yang soleh adalah penganut agama yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia dan menjaga nilai – nilai kemanusiaan sebagai manifestasi keimanan mereka kepada Allah. Kelompok Islam substansif cenderung menyerahkan kepada Allah tentang vonis bagi siapa yang selamat dan tidak selamat di akhirat, yang penting adalah bagaimana manusia dengan keberagamaannya beriman dan berserah kepada Allah seraya berupaya membuat kemaslahatan bagi semesta.

Pluralisme agama, diantara agama samawi dianggap sebagai bagian dari ajaran substansi Islam itu sendiri. Pengakuan terhadap ajaran Islam adalah satu kesatuan dengan pengakuan terhadap ajaran para nabi sebelumnya.

Kendati demikian, kelompok ini tetap meyakini bahwa Islam sebagai institusi adalah sebagai agama yang terbentuk dari ajaran yang dibawa Muhammad menyempurnakan ajaran - ajaran para nabi sebelumnya. Maka Islam sebagai hasil objektifikasi ajaran Muhammad dipandang oleh penganut Islam Substantif sebagai sistem mutakhir atau "*last edition*" dari rangkaian "buku" ajaran Islam. Namun pendapat ini tidak menghilangkan suatu sikap bahwa tetap terdapat nilai kebenaran dalam substansi hakiki tiap agama yang bersumber dari ajaran para nabi sebelumnya, walau tetap ada asumsi tentang kondisi reduksi karena proses sejarah dari perkembangan tiap agama tersebut.

Setelah melakukan kajian terhadap film "?", dari analisis isi kepada berbagai adegan dan dialog dalam film tersebut, dapat dilihat posisi Film "?" dalam polemik antara Islam Institusi dan Islam Substantif. Film "?" cenderung mengambil posisi untuk lebih sepakat atau mendukung pemikiran kelompok Islam substantif dalam hal kajian tentang pluralisme agama atau pemikiran Islam tentang pluralisme agama. Maka peran film "?" terkait dalam varian pemikiran Islam tentang pluralisme dapat dilihat sebagai saluran representasi pemikiran Islam substantif.

Film "?" menggambarkan berbagai adegan dan dialog yang menunjukkan bahwa perbedaan agama secara institusi menurut sistem credo, ritus dan norma atau akidah, syari'at dan ahlak memang ada dan tak dapat disamakan, karena agama adalah sistem yang memang bekerja dengan jalannya masing masing. Namun berbagai adegan dan dialog tersebut juga menggarisbawahi bahwa semua jalan yang dibuat oleh tiap agama tersebut secara hakikatnya menuju satu tuhan yang sama. Hal tersebut adalah suatu wujud representasi pemikiran Islam substantif.



## Simpulan

Simpulan yang didapatkan tentang muatan konstruksi pemikiran Islam adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tiap agama samawi berlandaskan pada wahyu yang bersumber dari Tuhan yang sama dengan penamaan dan penggambaran yang berbeda.
2. Pandangan bahwa secara substansi ajaran agama samawi adalah sama, namun secara Institusi tetap berbeda.
3. Pandangan bahwa secara substansi, ajaran agama diperuntukan bagi kebaikan seluruh manusia tanpa melihat agama

Dari ketiga point hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa dari sisi varean pemikiran Islam, para sineas yang memproduksi Film “?” cenderung mengambil posisi untuk lebih sepakat atau mendukung pemikiran kelompok Islam substantif dalam hal kajian tentang pluralisme agama atau pemikiran Islam tentang pluralisme agama. Sedangkan dari segi kajian pluralisme, film “?” cenderung merepresentasikan pemikiran *teologi global* yang melihat bahwa tiap agama adalah berbeda secara institusi namun sama secara esensi atau menuju Tuhan yang sama. Terakhir, dari kajian media dan konstruksi realitas, film “?” dapat dilihat sebagai bagian dari proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi pemikiran peluralisme, khususnya madzhab Islam substantif sekaligus juga menjadi saluran untuk mempercepat, memperluas dan meratakan sirkulasi informasi tentang paham pluralisme tersebut.

## Daftar Pustaka

Ahmad Nur. 2001. *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta : Kompas.

- Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala, Siti Karlinah. 2007. Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Berger, Peter L dan Thomas Luckmann, 1990, Tafsir Sosial Atas kenyataan, Jakarta : LP3ES.
- Bungin, Burhan. 2006. Sosiologi Komunikasi : Teori, paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta : Kencana.
- \_\_\_\_\_. 1996. The Social Construction of Reality. New York : Penguin Book.
- Efendy. Bachtiar. 2001. Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan. Yogyakarta : Galang Press.
- Effendy, Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
- Effendy, Onong Uchjana, Ilmu,Teori dan Filsafat Komunikasi, PT. Cipta Ditya Bakti, Bandung, 2003
- Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta: LKIS
- Gunadi, Y.S. 1998. Himpunan Istilah Komunikasi. Jakarta: Grasindo.
- Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Jakarta: Granit
- Hitti, Philip K., 2010. History of Arabs. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.
- Hoynes, Davis Croteau dan William. 2000. Media/Societiy Industries Images and Audiences, London: Pine Forge Press.

- Khaidir, Piet H. 2006. Nalar Kemanusiaan Nalar Perubahan Sosial. Jakarta : Teraju
- Littlejohn, Stephen W. 1989 : Theories of Human Communication. California: Wadsworth Inc.
- Littlejohn, Stephen W dan Karen A Foss, 2009. Teori Komunikasi, Theories of Human Communication, Esdisi ke-9. Jakarta : Salemba Humanika
- Louw, Eric. 2001 The Media and Cultural Production. London : Sage Publications.
- Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah. 2009. Himpunan Putusan Tarjih. Yogyakarta : PP. Muhammadiyah.
- McQuails, Dennis. 2000 : Mass Communication Theory. London : Sage Publication.
- \_\_\_\_\_. 2002. McQualis Reader in Mass Communication Theory. London : Sage Publication.
- Morissan, Andy Corry Wardhany. 2009. Teori Komunikasi. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nasution, Harun. 1986. Teologi Islam : Aliran - Aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nashir, Haedar. 2007. Gerakan Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia. Jakarta : PSAP.
- Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: LKIS
- Rachman, Budhy Munawar. 2007. Islam dan Pluralisme Nurcholish Madjid. Jakarta : PSIK Universitas Paramadina.

Salim, Agus. 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana

Salthout, Machmud. Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah. Jakarta : Bulan Bintang

Shoemaker, Pamela J. Dan Stephen D Reese.1996. Mediating The Message, Theories of Influences on Massa Media Content,New York : Longmann Publishers.

Sobur, Alex. 2002. Analisis Teks Media: Suatu pengantar untuk Analisis Wacana, Semiotika dan Framing. Bandung: Rosdakarya

\_\_\_\_\_. 2006. Analisis Teks media. Bandung: Rosdakarya.

Syahrastani, Muhammad bin Abdul Karim. 1996. Sekte -Sekte Islam. Bandung : Penerbit Pustaka.

Toha, Anis Malik. 2005. Tren Pluralisme Agama. Jakarta : Gema Insani.

Vardiansyah, Dani. 2004. Pengantar Komunikasi, Pendekatan Taksonomi. Bogor: Ghalia Indonesia

Referensi lain :

Tesis : Husnan Nurjuman, Universitas Indonesia. "*Konstruksi Media Islam Indonesia Tentang Pluralisme Dalam Islam*".

# EFEKTIVITAS KOLOM KABAR CIVITAS AKADEMIKA UNTIRTA TERHADAP CITRA REALITAS UNTIRTA DI MASYARAKAT

*Oleh : Rd.Nia Kania & Neka Fitriyah*

## **Pendahuluan**

Suatu perusahaan atau lembaga selalu bersentuhan dengan masyarakat tempat ia bekerja. Interaksi ini boleh jadi akan menjadi masalah namun pada saat yang lain menjadi hal yang menguntungkan bagi keberlangsungan lembaga atau perusahaan bersangkutan. Di sisi lain, di dalam perusahaan atau lembaga itu sendiri terjadi komunikasi yang relatif intens yang potensial menimbulkan masalah. Karena itulah untuk meminimalisir konflik yang mungkin terjadi dan memaksimalkan potensi yang ada, terjalinnya hubungan yang harmonis didalam perusahaan atau lembaga itu sendiri dan antara perusahaan dengan publik menjadi tuntutan mutlak.

Humas Untirta dan media massa dalam hal ini Radar Banten, adalah peranti yang digunakan Untirta dalam membangun kebijakan atau strategi civitas akademika dalam memberi ruang dan mencitrakan institusi pendidikan tinggi dalam hal ini Untirta. Hal ini tidaklah mengherankan bila diingat bahwa Humas adalah bidang aktivitas yang bertujuan

menciptakan saling pengertian yang baik antara suatu organisasi dengan publiknya, ia tidak dapat tumbuh dan bahkan akan tertelan menuju kehancuran.

Definisi PR yang diambil dari The British Institute of PR aktivitas PR adalah mengelola komunikasi antar organisasi dan publiknya (*public relation activity is management of communications between an organization and its publics*) Ruslan, 2005:15) Menurut Edward L Bernays dalam bukunya PR (1952, Univ of Oklahoma Press) terdapat 3 fungsi utama humas yaitu: Memberikan penerangan kepada masyarakat, Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung, Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya (Ruslan, 2005:18)

Kekuatan propaganda media massa dapat dianalisis melalui isi bahasa dan pengungkapan bagaimana hal itu dapat dilihat dengan penampilan metafora, penonjolan diksi, dan makna kata-kata. Surat kabar merupakan cara utama mencapai public komunitas didalam spesialisasi media dan khalayak terbagi-bagi sekarang. Meski tidak lagi menjadi media utama berita untuk mayoritas khalayak, surat kabar masih merupakan suatu kekuatan yang hebat, dalam membentuk opini public. Para pembaca secara umum merupakan orang-orang yang berpengaruh yang berminat. Karena mencapai pembacanya setiap hari, surat kabar merupakan medium paling bisa diterima untuk suatu bangunan publisitas kumulatif, dan karena itu khususnya berharga dalam kegiatan public relations. Surat kabar dibaca saat pembaca tidak tergesa-gesa dan waktu ia sempat, berbanding terbalik dengan media siaran, dimana suatu program yang hilang sulit untuk dicari atau pergi selamanya. Akhirnya kredibilitas yang dirasakan atas surat kabar sulit ditandingi. Surat kabar punya spesialis yang mencakup lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan. Hubungan internasional, bisnis dan bidang-bidang lain (Cutlip,

Center dan Broom, 2005: 241 dan 243-244) Kegiatan PR harus mengemban fungsi yang dikemukakan Canfield, dalam Arifin (2003), yaitu (1) mengabdikan kepada kepentingan umum, (2) memelihara komunikasi yang baik, dan (3) menitikberatkan pada moral dan tingkah laku yang baik.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang mengemuka pada latar belakang penelitian, penulis mencoba merumuskan masalah menjadi bagaimana “Efektivitas Kolom Kabar Civitas Akademika Untirta terhadap Citra Realitas Untirta”, dengan pertanyaan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- (1) Bagaimana Kolom Civitas Akademika Untirta di Harian Umum Kabar Banten?
- (2) Bagaimana Citra Realitas Untirta?
- (3) Bagaimana Efektivitas Kolom Civitas Akademika Untirta terhadap Citra Realitas Untirta?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu: untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Kolom Kabar Civitas Akademika Untirta terhadap Citra Realitas Untirta. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan berupa temuan-temuan yang dapat menjadi titik awal bagi penelitian komunikasi, lebih khusus bagi pengembangan kajian *public relations*. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Untirta dalam proses pengambilan keputusan, penetapan strategi, kebijakan, dan tindakan komunikasi khususnya berkenaan dengan komunikasi publik dalam kegiatan-kegiatan akademika.

Peran *Public relations* pada suatu perguruan tinggi sangat penting dimana dalam pertumbuhan perguruan tinggi yang kini tumbuh berkembang terutama di daerah-daerah

perkotaan di setiap provinsi sebagai akibat dari otonomi daerah dimana setiap perguruan tinggi kini bersaing untuk mendapatkan mahasiswa demi kelangsungan hidup institusinya. Public relations tidak hanya berperan untuk memelihara hubungan dengan para mahasiswanya, lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta tetapi yang lebih penting menghadapi krisis yang sewaktu-waktu dapat muncul sebagai akibat yang bermacam-macam dan tidak dapat diramalkan jauh sebelumnya . Apabila suatu perguruan tinggi mendapatkan masalah diperlukan suatu tindakan untuk menormalisasikan keadaan kembali baik. Pemberitaan yang salah perlu diluruskan berita yang tidak menguntungkan harus dihilangkan dan selanjutnya citra perguruan tinggi harus dikembalikan dan sekaligus ditingkatkan. Oleh karena itu di perguruan tinggi diperlukan keberadaan seorang public relations yang mempunyai keahlian dalam merubah hal-hal yang jelek atau negatif menjadi lebih baik atau positif , yang samar-samar menjadi jelas sehingga perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi tetap dipercaya oleh masyarakat dan juga dapat menciptakan opini publik yang positif berhasil atau tidaknya menciptakan opini yang positif yang dilakukan oleh seorang *Public relations* bagaimana ia bisa bekerjasama dengan berbagai pihak media masa untuk mengangkat suatu maksud yang akan disampaikan kepada publik dengan bentuk berita artikel ataupun informasi lainnya bisa tersebar dalam waktu yang bersamaan. *Public Relations* bertindak sebagai komunikator dalam kegiatan komunikasi pada organisasi di perguruan tinggi yang prosesnya dalam dua arah timbal balik dan juga membina dan membangun hubungan yang positif dan baik dengan pihak publik sebagai target sasaran yaitu publik *eksternal* dan *internal*, publik mengetahui rencana kebijaksanaan dan usaha-usaha pimpinan dari public relations. Dalam hal itu pimpinan menyempurnakan rencana dan strateginya, melakukan



kebijaksanaannya dan meningkatkan usaha-usahanya berdasarkan keadaan, perasaan harapan dan keinginan publik baik publik *intern* ataupun *ekstern* dan itu semua diketahui manajer beserta stafnya berkat laporan dari public relations. Kegiatan yang *two ways trafic* itulah yang menjadi ciri khas public relations yaitu kegiatan top manajemen ke publik dan dari publik ke top manajemen. Kegiatan yang dilakukan *public relations* dalam membina hubungan dengan publik *internal*.

### **Tinjauan Pustaka**

Dalam sebuah hubungan masyarakat terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam peranan yang diemban dalam rangka menciPerguruan Tinggiakan efektifitas organisasi. Nilai-nilai tersebut, terkait dengan bagaimana fungsi *public relations* dijalankan dan kontribusi dalam mengkomunikasikan organisasi sehingga tercipta efektivitas kerja. Menurut teori organisasi, sebuah organisasi dapat dikatakan efektif ketika apa yang menjadi tujuan/target organisasi yang telah direncanakan dapat diraih.

Sebuah organisasi memiliki hubungan dengan internal organisasi (pekerja), dan external organisasi (komunitas masyarakat, pemerintah, konsumen, investor dan media), yang dapat disebut sebagai konstituen strategis. Konstituen inilah yang membentuk lingkungan organisasi sehingga dapat berkembang, baik dengan dukungan maupun sikap kritis. Mereka juga menginginkan organisasi tersebut untuk dapat memfokuskan pada apa yang menjadi kepentingan konstituen, walaupun kadang bukan merupakan kepentingan organisasi.

*Public relations* berperan dalam membangun hubungan yang baik dengan konstituen strategis ini, karena dukungan dibutuhkan untuk perkembangan organisasi. Organisasi berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial karena dapat menghasilkan dukungan masyarakat/ konstituen strategis. Proses peranan *Public Relations* (tahapan *fact finding*,

*planning, communicating, dan evaluation*) sepenuhnya mengacu pada pendekatan manajerial. kemudian manajemen Public Relations dapat dirumuskan sebagai suatu proses dari kelompok orang-orang yang secara koordinatif, memimpin kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Strategi sebuah organisasi (yang membedakan lingkup arah dan tujuan jangka panjang) ditentukan setelah melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Pada umumnya orang, baik dalam lingkungan atau diluar lingkungan organisasi, akan memberikan kontribusi pada proses tersebut. Setelah mengembangkan sebuah strategi selanjutnya mengkomunikasikannya sehingga dapat diimplementasikan dan mendapat dukungan. *Public Relations* memiliki peran penting dalam proses tersebut, baik dalam membantu membangun strategi itu sendiri atau dalam mengkomunikasikannya.

Public relations berkaitan dengan pemikiran-pemikiran pada tingkat manajemen. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi menyusun kebijakan sehingga memperlihatkan sebuah kinerja yang bertanggung jawab. Ini berkaitan dengan kenyataan bahwa penampilan yang bertanggung jawab merupakan dasar penerimaan publik terhadap sebuah organisasi. Kinerja yang bertanggung jawab biasanya dicirikan dengan antara lain, perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan publik, perusahaan harus benar secara hukum, dan perusahaan harus berpedoman pada moralitas. Jika salah satu dari unsur ini dilanggar oleh sebuah organisasi, maka reputasi perusahaan berada dalam taruhannya.

Dalam konsep *public relations* sebagai fungsi komunikasi, penting difahami bahwa kegiatan utama public relations adalah melakukan komunikasi. Maka dikatakan bahwa public relations sebagai fungsi staff khusus yang melayani para

pemimpin organisasi, khususnya dalam membantu organisasi berkomunikasi dengan publik-publiknya. Sebenarnya, setiap manajer dalam organisasi terlibat dan bertanggung jawab dalam komunikasi organisasi. Ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya berorganisasi adalah berkomunikasi. Namun demikian, public relations punya tanggung jawab tambahan dan spesifik.

Peran *Public Relations* tersebut diharapkan menjadi “mata” dan “telinga” serta “tangan kanan” bagi top manajemen dari organisasi, ruang lingkup tugasnya meliputi:

- a) Membina hubungan ke dalam (Publik Internal), yaitu publik yang menjadi bagian dari perusahaan/organisasi itu sendiri. Efektifitas hubungan publik internal memerlukan suatu kombinasi antara : Sistem manajemen yang sifatnya terbuka (open management). Kesadaran pihak manajemen terhadap nilai dan pentingnya memelihara komunikasi timbal balik dengan para karyawan. Kemampuan Public Relations yang memiliki keterampilan manajerial (manager skill) serta berpengalaman.
- b) Membina hubungan keluar (Publik Eksternal), yaitu publik umum atau masyarakat mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif publik terhadap lembaga yang diwakilinya.

Jadi peranan humas atau *Public Relations* tersebut dua arah seperti dijelaskan di atas yaitu beorientasi ke dalam (*inward looking*). Public Relations ada untuk memastikan bahwa pesan yang dibawa tepat disajikan kepada publik. Pesan ini bisa mengenai produk dan dengan mempertimbangkan: (1) Kinerjanya (2) Organisasi dan etikanya (3) Kesehatan keuangan perusahaan (4) Reputasinya sebagai atasan yang baik dan penuh perhatian.

## ***Public Relations***

*Public Relations* adalah sebuah fungsi manajemen yang membantu mempertahankan garis komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama timbal balik antara sebuah organisasi dengan publik; melibatkan manajemen ke dalam sebuah isu; membantu manajemen untuk selalu mendapatkan informasi mengenai opini publik dan menanggapiinya, membantu manajemen untuk senantiasa mengikuti perubahan, dan memanfaatkan perubahan itu secara efektif. *Public relations* juga berfungsi sebagai suatu system peringatan dini untuk membantu mengantisipasi suatu kecenderungan, dan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi sebagai alat utamanya. (Wilcox et.al, 2003:3-4)

Kegiatan *Public Relations* harus benar-benar dicurahkan untuk kepentingan umum sehingga menurut Mc Nair (1999) PR harus merancang akses para khalayak internal untuk dimuat dan ditayangkan dalam media secara cuma-cuma (bukan iklan, tetapi aktivitas para khalayak internal dan memiliki nilai berita sehingga dimuat).

## **Media Massa**

Media massa merupakan media informasi yang terkait dengan masyarakat, digunakan berhubungan dengan khalayak secara umum, dikelola secara professional dan bertujuan mencari keuntungan. Menurut McLuhan dalam buku *Crisis Publik Relation*, media massa adalah perpanjangan alat indra kita. Melalui media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa bekerja untuk menyampaikan informasi.

Media massa dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media massa pada dasarnya

dibagi menjadi dua kategori, yakni media massa cetak dan elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah. Sedangkan media elektronik yang memenuhi kriteria media massa adalah radio siaran, televisi, film, dan media online (Ardianto, 2009:103)

## Teori Citra

Citra dapat diartikan: (a) kata benda: gambar, rupa, gambaran; (b) gambar yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau produk; (c) kesan mental atau tayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase, atau kalimat, dan merupakan unsure dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi. Pengertian citra: *“the image is built up as a result of all past experience of the possessor of the image.* Bagian dari citra adalah citra itu sendiri.

Terdapat 10 klasifikasi citra, yaitu (a) citra ruang, (b) citra waktu; (c) citra rasional; (d) citra perorangan; (e) citra nilai; (f) citra emosional; (g) citra kesadaran atau ketidaksadaran; (h) citra keyakinan atau ketidakyakinan; (i) citra dalam dimensi realitas dan bukan realitas bahwa citra berkaitan dengan dunianya dengan sesuatu di luar realitas; (j) citra yang bersifat umum, yaitu citra pribadi yang sesuai dengan citra yang ditunjukkan oleh kehendak orang lain (Boulding, dalam Ardianto, 2009:26)

Lebih jauh Sutisna (2001) mengemukakan, citra adalah realitas, seperti yang dikemukakan oleh Bernstein dalam Gronroos. Oleh karena itu, program pengembangan dan perbaikan citra harus didasarkan pada realitas. Jika citra tidak sesuai dengan realitas dan kinerja kita tidak baik, itu adalah kesalahan kita dalam berkomunikasi. Jika citra sesuai dengan realitas dan merefleksikan kinerja kita yang buruk, itu berarti kesalahan kita dalam mengelola organisasi (Sutisna, dalam Ardianto, 2009:33)

## Efektivitas

Efektivitas organisasi memiliki banyak pengertian, tergantung bagaimana kita memandangnya, sehingga mengandung pengertian yang multidimensi. Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Hasibuan (2003:77) efektivitas adalah tercapainya sasaran eksplisit atau implicit. Efektivitas yang dimaksud adalah tercapainya sasaran baik secara tertulis maupun dalam implementasinya. Menurut Tangkilisan (2005:139) efektivitas menyangkut 2 aspek, yang diantaranya adalah sebagai berikut: Tujuan, Pelaksanaan fungsi.

Menurut Gibson et.al (tangkilisan, 2005:141), menyatakan bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. System pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Adapun kriteria atau indicator pada efektivitas menurut Hessel Nogi (Tangkilisan, 2005:140-141)

- a. Pencapaian target, maksud mencapai target disini diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat terelaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Kemampuan adaptasi (fleksibilitas), keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan luar organisasi.

- c. Kepuasan kerja, suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk mencapai efektivitas organisasi. Elemen yang menjadi focus analisis ini adalah lamanya penyelesaian pekerjaan yang dilakukan karyawan dan system insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi atau telah melakukan pekerjaan yang melebihi beban kerja yang ada.
- d. Tanggung jawab. Organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya.

Gito Sudarmo dan Mulyono (2001:128) dalam Syarif Makmur (2008:122), mengemukakan sebagai berikut: efektivitas organisasi harus mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dan lingkungannya yang lebih luas. Efektivitas organisasi juga adalah apakah suatu organisasi itu mampu bertahan dan hidup terus dalam lingkungannya sehingga kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan merupakan ukuran terakhir atau ukuran jangka panjang mengenai efektivitas organisasi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang aktif yang mempunyai kebebasan berkemauan dan berkehendak, yang perilakunya hanya dapat dipahami dalam konteks budayanya, dan perilakunya yang seringkali tidak didasarkan oleh hukum sebab-akibat seperti yang terdapat pada hukum-hukum alam.

Untuk mencapai hal tersebut, penelitian kualitatif lebih menekankan pada bahasa atau linguistik sebagai sarana penelitiannya. Sarana bahasa lebih mampu untuk mengungkapkan perasaan, nilai-nilai yang berada dibalik perilaku manusia (Lawson dan Garrod dalam David dan Sutton, 2004). Keunikan manusia sebenarnya bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa (Suriasumantri, 2007).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Sedangkan dasar dari penelitian ini adalah dengan survei yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu populasi apakah berkenaan dengan sikap, tingkah laku, ataukah aspek sosial lainnya. Dan bentuk penggalan data dalam penelitian ini berupa wawancara, dan dokumentasi.

### **Teknik pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu :

1. Wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara yang digunakan adalah bentuk wawancara terpimpin di mana pertanyaan yang diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun. wawancara di sini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap lagi apabila peneliti ingin melengkapi data yang sudah ada. Wawancara akan dilakukan bersamaan dengan pengisian kuesioner oleh responden.
2. Dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objektif. Teknik kuesioner dan wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya



untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Dokumen bisa berbentuk dokumen publik atau dokumen privat.

### **Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Salim (2006: 20-24), menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis.

Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data, sehingga model dari Miles dan Huberman disebut juga sebagai Model Interaktif. Berdasarkan pada penjelasan yang telah dikembangkan oleh Agus Salim (2006: 22-23), dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- a) Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- b) Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

## **Key Informan.**

Dalam kaitan ini ada lima kriteria untuk pemilihan sampel *key informan* atau informan yang dijadikan sumber pengambilan data diantaranya:

1. Subyek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi informasi, melainkan juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatan yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan. Ini biasanya ditandai oleh kemampuannya dalam memberikan informasi tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subyek yang masih terlibat secara aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian penelitian.
3. Subyek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.
4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu.
5. Subyek yang sebelumnya tergolong cukup asing dengan penelitian sehingga lebih mudah menggali informasi (Bungin, 2003).

*Key informan* dalam penelitian ini terdiri dari: kepala Biro Humas Untirta periode 2009-2012, akademisi, penulis rubrik civitas akademika Untirta dan aktivis pemuda. Elemen-elemen tersebut ditentukan dengan pertimbangan bahwa kapasitas dan keterlibatan dalam rubric civitas akademika Untirta dinilai memadai.

## **Pembahasan**

Dalam suatu Perguruan Tinggi Humas sangatlah penting sebagai sarana dalam menjalin hubungan dengan pihak intern dan ekstern dalam mengembangkan citra institusinya. Maju mundurnya suatu institusi sangat bergantung pada bagaimana cara institusi tersebut membina hubungan yang baik dengan

lingkungan dan pihak luar yang terkait dalam proses perkembangan institusi tersebut sehingga terciptalah citra yang baik dimata pihak intern dan ekstern. Dalam hal ini peran Humas di Untirta sangat diperlukan dalam meningkatkan citra profesionalisme dan produktifitas kinerja Untirta dan supaya dapat memberikan kontribusi citra yang baik terhadap institusi dan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu diperlukan pengefektifan Humas dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Humas di Untirta memiliki peran yang sangat besar dalam pencitraan dan perkembangan Untirta. Sejak didirikannya biro Humas Untirta pada tahun 2009 dapat dinilai sangat menunjang Untirta dalam melakukan komunikasi yang efektif baik internal maupun eksternal.

Nilai Pentingnya Peranan Humas di Untirta terdapat mengandung peranan yang diemban dalam rangka menciPerguruan Tinggiakan efektifitas perguruan tinggi. Nilai-nilai tersebut, terkait dengan bagaimana fungsi Humas dapat dijalankan dan memeberi kontribusi dalam mengkomunikasikan Untirta sehingga tercipta citra positif. Tugas Humas adalah melakukan upaya dalam menyampaikan isi pernyataan kepada khalayak sarannya agar internal dan eksternal publik minimal tidak merugikan dan maksimal dalam memberi keuntungan secara terus-menerus kepada organisasi (Hoeta Soehoet, 2003).

Secara umum program humas di Untirta adalah Memperkenalkan dan memperkuat kedudukan Untirta di Provinsi Banten. Sebagai suatu langkah *brand image* dan ajang promosi di kalangan lokal. Memperkenalkan Untirta di tingkat nasional. Dimana pada tahun 2010, Untirta mengadakan pameran pendidikan di Tangerang, Trisakti dan UI. Memulai menggagas Untirta di tingkat internasional.

Dengan sudut pandang terpusat pada upaya pembentukan opini publik yang baik serta evaluasi terhadap upaya tersebut untuk perkembangan organisasi, Cutlip &

Center (dalam Gruning 1998, 2003) mengatakan fungsi Humas adalah sebagai agen pembentuk opini publik. PRSA (Public Relations Society of America) mendefinisikan tugas Humas sebagai agen yang menghubungkan organisasi dengan publiknya.

### **Kolom Civitas Akademika Untirta di Harian Umum Kabar Banten**

Berdasarkan definisi tugas Humas, komponen utama yang harus dibangun oleh Humas Untirta adalah citra Institusi. Selaras dengan definisi tugas Humas, adalah terwujudnya citra positif Untirta di masyarakat. Citra Untirta selama ini belum dikelola dengan baik, sehingga Humas Untirta belum dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utamanya. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Humas Untirta mampu mewujudkan pencitraan positif Institusi.

Citra organisasi dibangun dari elemen visual, verbal dan perilaku yang menjadi cerminan aktualisasi dari visi pemimpin organisasi yang terintegrasi dengan misi dan rencana strategik organisasi (Howard, 1998). Citra organisasi juga merupakan cerminan identitas organisasi yang akan membangun nama baik organisasi (Fomburn, 1996).

Mengacu pada definisi dari pakar komunikasi di atas, maka dapat diketahui bahwa citra harus dikelola melalui dialog dan hubungan baik dengan khalayak organisasi. Hubungan baik disini berarti Humas Untirta juga berperan dalam mengelola jaringan komunikasi dan kerjasama dengan mitra institusi. Dikaitkan dengan pembagian tugas dalam institusi, Humas Untirta merupakan komponen yang melakukan pengelolaan citra secara sistematis. Namun, mengingat proses pembentukan persepsi, khususnya pada komponen perilaku, setiap civitas akademika Untirta dapat memberikan pesan kepada khalayaknya melalui perilaku yang ditampilkan, maka setiap civitas akademika harus dapat bertindak sebagai Humas.

Tiap-tiap civitas akademika merupakan representasi pencitraan dari organisasi secara keseluruhan.

Dalam menyikapi suatu issue, Humas Untirta selama ini memperhatikan tiga komponen yang saling berhubungan dan mempunyai kepentingan masing-masing, yaitu pemerintah, khalayak (masyarakat, mahasiswa) dan media massa. Interaksi ketiga komponen mendapat perhatian khusus bagi Humas Untirta karena didalamnya terdapat unsur-unsur komunikasi massa, yang merepresentasikan sejauhmana realitas untirta di hadapan masyarakat.

Citra organisasi dibangun dari elemen visual, verbal dan perilaku yang menjadi cerminan aktualisasi dari visi pemimpin organisasi yang terintegrasi dengan misi dan rencana strategik organisasi (Howard, 1998). Citra organisasi juga merupakan cerminan identitas organisasi yang akan membangun nama baik organisasi (Fomburn, 1996).

Mengacu pada definisi dari pakar komunikasi di atas, maka dapat diketahui bahwa citra harus dikelola melalui dialog dan hubungan baik dengan khalayak organisasi. Hubungan baik disini berarti Humas Untirta juga berperan dalam mengelola jaringan komunikasi dan kerjasama dengan mitra institusi. Dikaitkan dengan pembagian tugas dalam institusi, Humas Untirta merupakan komponen yang melakukan pengelolaan citra secara sistematis. Namun, mengingat proses pembentukan persepsi, khususnya pada komponen perilaku, setiap civitas akademika Untirta dapat memberikan pesan kepada khalayaknya melalui perilaku yang ditampilkan, maka setiap civitas akademika harus dapat bertindak sebagai Humas. Tiap-tiap civitas akademika merupakan representasi pencitraan dari organisasi secara keseluruhan.

Dalam menyikapi suatu issue, Humas Untirta selama ini memperhatikan tiga komponen yang saling berhubungan dan mempunyai kepentingan masing-masing, yaitu pemerintah, khalayak (masyarakat, mahasiswa) dan media massa. Interaksi

ketiga komponen mendapat perhatian khusus bagi Humas Untirta karena didalamnya terdapat unsur-unsur komunikasi massa, yang merepresentasikan sejauhmana realitas untirta di hadapan masyarakat. Berbicara mengenai citra realitas Untirta, terbentuk berdasarkan pesan yang didesain dan diterima oleh masyarakat (*Stakeholder*). Melalui media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan apapun dari Untirta kepada khalayak. Bagi khalayak, pesan yang diterima mengenai Untirta dapat membentuk, mempertahankan atau mendefinisikan citra realitas faktual di lapangan. Pada tahap ini analisis terbentuk mengenai apakah citra yang diterima adalah positif atau negatif.

Beberapa hasil wawancara, pengaruh media massa (cetak) dalam pembentukan citra Untirta terasa kuat. Pembagian tugas dalam struktur Biro Humas yang memiliki terkait media massa adalah rubrik Civitas Akademia Untirta. Rubrik ini disediakan untuk mewadahi civitas akademika Untirta dalam merepresentasikan ide, pemikiran dan gagasannya. Rubrik ini dibuat salah satunya untuk mencitrakan Untirta bahwa Untirta memiliki tanggung jawab sosial dalam memperhatikan persoalan sosial di Banten. Lebih jauh Humas Untirta melakukan langkah-langkah untuk melakukan counter issue sekaligus menjaga citra positif institusi.

Walaupun dalam konteks lokal, kolom civitas akademika Untirta ini sudah luar biasa, karena merupakan inisiasi awal dalam membangun budaya menulis yang masih sangat sulit di Untirta. Animo dari civitas akademika bagus dan kualitasnya cukup. Beberapa tulisan atau artikel yang dimuat mampu memberikan pencerahan dan solusi, tetapi tidak sedikit terbilang dekonstruksi dan ambigu karena tidak memadai baik dari sisi konten ataupun kontribusinya. Dari sisi *positioning*, rubrik ini memang diperuntukkan bagi penulis pemula untuk melatih dan mengasah bakat menulis. Dalam prakteknya tidak sedikit

penulis-penulis senior yang intens dan secara periodik mengirimkan tulisannya.

### **Efektivitas Kolom Civitas Akademika Untirta terhadap Citra Realitas Untirta.**

Rubrik civitas akademika Untirta, sebenarnya merupakan program kerjasma Untirta dan beberapa media cetak lokal yang sepenuhnya diperuntukkan sebagai forum akademis untuk mewadahi aktivitas aspirasi, opini, ide dan gagasan. Dalam mekanismenya, tim humas Untirta memiliki tim rubrik yang bertugas untuk menyeleksi dan mengatur semua tulisan yang akan dimuat. Prosesnya berawal dari penjaringan artikel-artikel yang masuk, kemudian ditentukan mana artikel yang dinilai dapat dan layak muat setelah itu diserahkan kepada redaksi media cetak untuk kemudian dimuat. Dalam beberapa prakteknya, ada juga penulis-penulis di Untirta yang menyerahkan artikelnya langsung ke media cetak.

Mengenai konten artikel, sangat bervariasi, dari mulai tema, penulis dan konten keseluruhan isi. Ada beberapa catatan mengenai artikel dalam rubrik civitas academia Untirta bahwa alangkah baiknya memperbaiki dari segi konten, kualitas dan standard penulisan. Tulisan dalam kolom ini terkesan biasa saja, belum punya *added value* yang kompetitif. Terlihat bahwa humas memiliki tim redaksi yang terbatas seharusnya mereka memiliki tim bidang-bidang akademik. Kemudian penataan yang lebih baik dan rapi. Sehingga kedepan kolom ini mempunyai nilai tambah. Kolom ini adalah ruang public yang terbuka, merupakan tempat tumbuhnya akademik yang sehat

Pada dasarnya Untirta lembaga pendidikan merupakan organisasi sosial yang memiliki publik internal dan eksternal yang keduanya harus difasilitasi dalam forum akademis. Untirta berupaya menjadi agen perubahan dan tempat untuk

menyalurkan ilmu kepada generasi penerus bangsa. Di era globalisasi masyarakat akan lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih lembaga pendidikan. Maka lembaga pendidikan harus berupaya untuk mencitrakan citra sebaik mungkin di hadapan masyarakat. Salah satu yang dilakukan Untirta adalah dengan membuat rubric civitas academia di media cetak lokal. Rubrik ini sengaja dibuat selain untuk menjaga pencitraan juga untuk mewadahi aspirasi semua pihak yang ada di lingkungan civitas akademika Untirta.

Seperti yang diketahui bahwa bukan hal yang mudah untuk mengembalikan image positif. Pengembalian citra menjadi tantangan penting bagi lembaga pendidikan. Namun sayangnya pada masa sekarang peran humas dalam dunia pendidikan tidak difungsikan secara maksimal oleh lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaksana dan pengelola lembaga tersebut terhadap arti penting peran humas yang sesungguhnya.

Berbicara mengenai citra realitas Untirta di masyarakat, terbentuk berdasarkan pesan yang didesain dan terima oleh masyarakat (*Stakeholder*). Melalui media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan apapun dari Untirta kepada khalayak. Bagi khalayak, pesan yang diterima mengenai Untirta dapat membentuk, mempertahankan atau mendefinisikan citra realitas faktual di lapangan. Pada tahap ini analisis terbentuk mengenai apakah citra yang diterima adalah positif atau negatif.

Beberapa hasil wawancara, pengaruh media massa (cetak) dalam pembentukan citra Untirta terasa kuat. Pembagian tugas dalam struktur Biro Humas yang memiliki terkait media massa adalah rubrik Civitas Akademia Untirta. Rubric ini disediakan untuk mewadahi civitas akademika Untirta dalam merepresentasikan ide, pemikiran dan gagasannya. Rubrik ini dibuat salah satunya untuk



mencitrakan Untirta bahwa Untirta memiliki tanggung jawab sosial dalam memperhatikan persoalan sosial di Banten. Lebih jauh Humas Untirta melakukan langkah-langkah untuk melakukan counter issue sekaligus menjaga citra positif institusi.

Realitas faktual citra Untirta di masyarakat dinilai penting didalamnya terdapat tingkat penerimaan Untirta di masyarakat. Selama ini keberadaan Untirta dapat dinilai baik dalam membantu memfasilitasi dan mencerdaskan pendidikan dan potensi daerah. Tetapi dari sisi kontribusi dan keterlibatan Untirta dalam berbagai sendi kemasyarakatan dan pemerintahan harus terus dioptimalkan, sehingga tumbuh kepercayaan kepada Untirta.

Humas Untirta tidak hanya berperan untuk memelihara hubungan dengan para mahasiswanya, lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta tetapi yang lebih penting menghadapi krisis yang sewaktu-waktu dapat muncul sebagai akibat yang bermacam-macam dan tidak dapat diramalkan jauh sebelumnya. Apabila suatu perguruan tinggi mendapatkan masalah diperlukan suatu tindakan untuk menormalisasikan keadaan kembali baik.

Dalam pelaksanaannya humas Untirta melakukan banyak komunikasi baik secara langsung secara personal contact maupun komunikasi melalui mass media menciptakan dan menjaga citra merupakan tujuan dari kegiatan program kerja *public relations* di perguruan tinggi baik untuk keperluan publikasi ataupun promosi . peran *public relations* mencakup bidang yang luas menyangkut hubungan dengan berbagai pihak dan tidak berbentuk hubungan dengan arti sempit karena *personal relations* mempunyai peran yang cukup besar dalam kegiatan *public relations*.

Meningkatkan kesadaran, pengertian dan pemahaman tentang aktifitas Untirta membentuk sikap yang menyenangkan, itikad baik, saling toleransi, saling pengertian,

saling mempercayai, saling menghargai dan akhirnya akan menciptakan citra yang baik. Untuk lebih memantapkan keberadaan humas ditengah masyarakat, terutama yang masih baru berdiri harus melakukan pengenalan diri mendapatkan pengakuan, memperoleh penghargaan atau kepercayaan serta bantuan dari masyarakat (*Zein Bastian, 2010*).

Citra realitas merupakan persepsi, kesan, perasaan dan gambaran dari publik terhadap sesuatu. Persepsi publik terhadap Untirta dari hasil pengamatan dan wawancara didasari pada apa yang masyarakat ketahui tentang Untirta yang bersangkutan. Karena citra ada di benak masyarakat, maka salah satu hal yang harus dilakukan Untirta adalah menjaga jangan sampai karena berbagai macam sebab, mayoritas publik mempunyai persepsi yang salah tentang perguruan Untirta sehingga menimbulkan citra negatif.

Jika rubrik Civitas akademika Untirta dituntut untuk membentuk realitas faktual Untirta di masyarakat, dari data yang diperoleh bahwa rubrik civitas akademika Untirta belum mampu merepresentasikan Citra Untirta secara keseluruhan. Dibutuhkan instrumen-instrumen lain yang justru berhbungan langsung dengan penegelolaan citra dan kontribusi Untirta pada permasalahan Untirta.

Kondisi di atas menuntut peningkatan peran dan fungsi Humas Untirta dari peran sebagai unit yang mengelola citra lembaga. Humas Untirta juga selayaknya diperankan sebagai juru bicara yang mampu menjelaskan informasi dan kebijakan dari pimpinan perguruan tinggi, membina hubungan harmonis dengan publik intern (dosen, mahasiswa, karyawan, manajemen) dan hubungan kepada publik ekstern (orang tua mahasiswa, media massa, pihak terkait lainnya), membina komunikasi dua arah kepada publik internal dan eksternal dengan menyebarkan pesan, informasi dan publikasi hasil penelitian, dan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan, dan membantu mencari solusi dalam meyelesaikan

masalah antar perguruan tinggi dengan dan mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan, baik yang ada di perguruan tinggi maupun di masyarakat.

Rosady Ruslan (2002) dan Nasution (2006) mengatakan agar Humas Perguruan Tinggi dapat melaksanakan fungsi strategis maka harus diupayakan penempatan posisi Humas yang dekat dengan pimpinan Perguruan Tinggi agar humas mengetahui secara jelas dan rinci mengenai pola perencanaan, kebijakan, keputusan yang diambil, visi dan arah tujuan Perguruan Tinggi, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan dan informasi kepada masyarakat. Selain itu agar dapat mengetahui secara langsung dengan tepat tentang latar belakang suatu proses perencanaan, kebijaksanaan, arah dan tujuan organisasi yang hendak dicapai, baik dalam jangka pendek maupun panjang, pimpinan humas perlu diikutsertakan pada rapat atau pertemuan tingkat pimpinan, Humas perlu diberi wewenang mendapatkan informasi dari semua unit di Perguruan Tinggi melalui rapat pimpinan. Tidak kalah pentingnya, sebagai lembaga Humas perlu dilengkapi dengan struktur dan peralatan yang memadai dan staf yang profesional.

Akhirnya, peningkatan peran dan kedudukan Humas sangat ditentukan oleh *political will* dari pimpinan Perguruan Tinggi untuk dapat mewujudkan humas yang sehat dan berdaya. Juga kemampuan pejabat Humas melakukan pendekatan kehumasan secara lebih strategis melalui *research-based knowledge* atau melakukan riset untuk menciptakan pengetahuan yang diperlukan. Dengan kemampuan untuk menyajikan data, pejabat Humas dapat duduk dalam *decision making table*. Tanpa itu, Humas hanya akan dianggap sebagai pemanis organisasi, yang akan dicari karena diperlukan, dan dilupakan jika semuanya sudah berjalan lancar.

## **Kesimpulan**

Penelitian dalam kesimpulan ini secara garis besar menggambarkan bahwa rubrickcivitas academia Untirta selama ini sudah dapat menjadi ruang apresiasi bagi civitas academia Untirta, tetapi dalam perjalannya banyak menemui kendala sehingga belum bisa dikatakan efektif dalam pencitraan realitas Untirta di masyarakat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Kolom Civitas Akademika Untirta di Harian Umum Kabar Banten, merupakan ruang aktivitas apresiasi wacana, ide, kritik dan gagasan yang dituukan bagi pembangunan daerah. Rubrik ini diisi oleh penulis-penulis muda berbakat baik oleh mahasiswa atau dosen juga tidak menutup kemungkinan untuk staf.
- (2) Citra Realitas Untirta di masyarakat merupakan persepsi dan opini masyarakat mengenai Untirta. Masyarakat berpendapat bahwa Untirta dinilai mampu mewartahi dan memfasilitasi sarana pendidikan tinggi yang memadai untuk kebutuhan local, adapun kontribusi dan keterlibatan Untirta dalam baerbagai hal harus terus ditingkatkan sehongga bisa kontributif bagi pembangunan masyarakat dan daerah.
- (3) Efektivitas Kolom Civitas Akademika Untirta terhadap Citra Realitas Untirta belum bisa dikatakan optimal, karena bicara citra realitas tidak hanya ditentukan oleh satu program humas, tetapi ditentukan oleh keseluruhan aspek yang berkaitan satu sama lain.

## **Saran**

- 1) Diperlukan tim khusus yang menangani rubrik civitas academia Unirta, sehingga nilai keberlanjutan, konten dan kualitas artikel mampu mencerminkan profesionalisme akademik.

- 2) Dibutuhkan apresiasi yang lebih bagi penulis artikel di rubric civitas academia Untirta, sehingga penulis-penulis muda berbakat merasa difasilitasi dan penting keberadaannya.
- 3) Perlu perencanaan strategis dan taktis dalam membuat desain atau agenda setting pencitraan Untirta di media, khususnya citra profesiobalitas dan tri dharma perguruan tinggi.

### **Daftar Pustaka**

Ardianto, Elvinaro, Lukiaty K, S. Karlina. 2009. *Komunikasi Massa suatu Pengantar*. Bandung: PT. Simbiosis Rekatama Media

Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: unit penerbitan dan percetakan

Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan sdm dan efektivitas organisasi, kajian penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia



## MAJELIS TAK'LIM SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN NON FORMAL WANITA

( Studi Majelis Tak'lim At-Takwa Ciwaktu Kota Serang)

*Oleh : Ima Maisaroh & Titi Stiawati*

### **Pendahuluan**

Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Dalam konteks itu, pendidikan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non-formal, atau pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, yang antara satu dengan lainnya memiliki keterkaitan fungsional saling melengkapi.

Pendidikan informal adalah aktivitas dan proses pendidikan paling dasar yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri di dalam lingkungan keluarga oleh orang yang telah dewasa terhadap orang yang belum dewasa. Biasanya dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Di dalam pendidikan informal ini, tidak dikenal Sistem dan pola penyelenggaraan pendidikan secara terstruktur dan baku seperti kurikulum, metoda maupun evaluasi, melainkan dilakukan secara lentur dan sangat variatif. Sangat tergantung pada latar belakang dan kondisi social ekonomi orang tua.

Namun demikian, pendidikan informal atau pendidikan keluarga ini memiliki urgensi sangat tinggi terhadap masa depan dan kepribadian si anak kelak maupun kehidupan social suatu komunitas masyarakat. Di dalam kehidupan keluarga inilah dinamika dan proses pendidikan dalam arti yang sesungguhnya terjadi.

Pendidikan formal dalam bentuk pendidikan sekolah (*schooling education*) adalah pendidikan “lanjutan” yang dilaksanakan di luar keluarga. Dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat atau swasta yang berbadan hukum atau terakreditasi, dan sudah memiliki struktur serta pola yang baku baik kurikulum, waktu, proses maupun tempat dan standar mutu yang tertentu. Pendidikan formal dilakukan sebagai upaya pengembangan potensi kecerdasan dan keterampilan peserta didik untuk memperoleh standar akademik tertentu, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja.

Pendidikan nonformal atau dikenal dengan istilah *pendidikan luar sekolah*, pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk dan pola kegiatan belajar-mengajar. Biasanya dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dilakukan melalui pola pendidikan sekolah seperti kursus-kursus maupun melalui pola pendidikan non-sekolah seperti pelatihan-pelatihan keterampilan, seminar, pengajian dan Majelis Ta’lim.

*Majelis Ta’lim* adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang bergerak dalam transformasi dan transmisi pelajaran dan nilai-nilai agama Islam. Lembaga keswadayaan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan luar sekolah ini tersebar baik di lingkungan masyarakat perdesaan maupun di perkotaan. Biasanya dilaksanakan di rumah-rumah ulama, pesantren, masjid ataupun balai pertemuan dan dikelola oleh ulama sebagai nara sumber ataupun oleh pengasuh pesantren



yang dilakukan secara swadaya dan swakelola, dan oleh organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu bentuk layanan kepada para anggotanya. Bahkan dari pengamatan yang penulis lakukan, kini majelis-Majelis Ta'lim juga diselenggarakan dan dikelola oleh partai-partai politik sebagai salah satu strategi "marketing" dan penjaringan konstituen dan kepentingan politik partai.

Terlepas dari siapa ataupun lembaga apa yang melaksanakan dan mengelola Majelis Ta'lim ini, penulis melihat bahwa Majelis Ta'lim - karena muatan "kurikulumnya" dan pola penyelenggaraannya yang lentur ini - telah menjadi fakta social yang ada dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, baik remaja maupun dewasa, dengan latar belakang yang variatif dari kalangan yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun oleh kalangan masyarakat yang telah memperoleh pendidikan yang cukup tinggi.

Sebagai salah satu sub-sistem pendidikan nasional dan upaya pengembangan mutu sumber daya manusia yang banyak diminati masyarakat - terutama oleh kaum wanita, Majelis Ta'lim perlu memperoleh perhatian dan dukungan serius dari lembaga pemerintah terkait dan semua *stake holder* pendidikan termasuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan memperoleh perhatian dan dukungan yang serius, diharapkan peranan, fungsi dan manfaat keberadaan Majelis Ta'lim dapat ditingkatkan dan optimal. Namun agar perhatian dan dukungan tepat sasaran maka perlu dilakukan studi / penelitian yang komprehensif. Sebagai salah satu upaya ke arah itu, penulis sangat tertarik dan bermaksud melakukan penelitian pendahuluan dengan judul: "Majelis Tak'lim Sebagai Media Pendidikan Non Formal Wanita (Studi Majelis Tak'lim At-Takwa Ciwaktu Kota Serang)

## Pendidikan Majelis Tak'lim

Dalam memenuhi kewajiban konstitusional sebagai sebuah bangsa yang merdeka, pemerintah berkewajiban memberi layanan pendidikan bagi masyarakat melalui upaya sistematis untuk memberi kesempatan dan sekaligus “menciptakan” manusia guna memperoleh pengetahuan yang luas, memiliki sikap yang positif dan produktif serta keterampilan fungsional yang mendukung sehingga menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Upaya ini dikemas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN atau Sisdiknas) sebagai salah satu sistem dalam pembangunan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban konstitusional tadi. Masyarakat Indonesia yang *nota bene* mayoritas beragama Islam mempunyai kepentingan dengan suksesnya pembangunan, tetapi tujuan akhir adalah perubahan kesadaran. Karena perubahan kesadaran jauh lebih baik daripada perubahan material, sebagaimana dinyatakan juga oleh Kunto Wijoyo (1997:13) dalam bukunya: “*Identitas Politik Umat Islam*”

Dalam Sisdiknas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan ini dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, yang antara lain berbentuk sistem pendidikan sekolah (*schooling education*, termasuk Madrasah) dan sistem pendidikan lain yang disebut pesantren atau Majelis Ta'lim. Baik model pendidikan sekolah maupun model pendidikan Majelis Ta'lim, secara substansial memiliki tujuan yang sama, yaitu menyiapkan sumberdaya manusia yang utuh dan handal, yang memiliki landasan keimanan dan keberagamaan yang dalam, pengetahuan dan wawasan yang luas, keterampilan yang dapat diandalkan (fungsional), sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, serta pola hidup yang sehat dan produktif. Perbedaan yang sangat nyata antara model pendidikan sekolah dan model pendidikan Majelis Ta'lim, secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

Model Pendidikan Sekolah, muatan kurikulumnya lebih berorientasi pada keduniawian (*sekuler*), diselenggarakan secara baku, terstruktur dan evaluasi yang berkelanjutan oleh pemerintah. Kalaupun ada muatan kurikulum keagamaan, prosentasenya sangat kecil. Sementara *Model Pendidikan Majelis Ta'lim* dilakukan masyarakat secara swadaya dan swakelola, sangat lentur, muatan kurikulumnya tidak terstruktur karena sangat bergantung pada latar belakang dan "jam terbang" nara sumber yang biasanya hanya berjumlah satu atau dua orang saja, muatan kurikulumnya lebih pada muatan yang mentransformasikan nilai-nilai keimanan dan ke-Islam-an yang tujuan akhirnya memberi bekal kepada masyarakat untuk memperoleh keseimbangan yang sejati, yaitu keselamatan di dunia dan di akhirat.

Sebagai sebuah sistem atau model pendidikan yang bergerak dalam bidang transformasi nilai-nilai ke-*illahi*-an / profetik, Majelis Ta'lim memiliki karakteristik yang khas. Dengan karakteristiknya tersebut Majelis Ta'lim masih tetap eksis dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sampai saat ini.

Terkait dengan pencapaian tujuan dan program pembangunan nasional yang membutuhkan partisipasi masyarakat, besarnya minat masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian peningkatan kualitas diri guna mencapai keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, serta besarnya peran, potensi dan manfaat Majelis Taklim yang sudah dirasakan oleh masyarakat, maka secara teoritis Majelis Taklim dapat menjembatani keterbatasan pemerintah dalam menjangkau dan melayani kebutuhan masyarakat. Majelis Taklim dapat menjadi katalisator dan Model Pendidikan Nonformal yang menjadi jalur alternative pendidikan bagi masyarakat, khususnya kaum wanita. Namun supaya Majelis Taklim dapat melaksanakan perannya serta optimal maka pemerintah terlebih dahulu perlu memberikan

penguatan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi kelembagaan yang dibutuhkan.

### **Pendidikan Non Formal**

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui penilaian penyeteraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintahan atau pemerintahan daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

### **Sasaran Pendidikan Nonformal**

Sasaran pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

### **Fungsi Pendidikan Nonformal**

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

### **Jenis Pendidikan Nonformal**

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, paket C serta pendidikan lain yang dituju untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis

tak'lim, sanggar dan lain sebagainya serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

### **Satuan Pendidikan Penyelenggaraan**

1. Kelompok Bermain (KB)
2. Taman Penitipan Anak (TPA)
3. Lembaga Kursus
4. Sanggar
5. Lembaga pelatihan
6. Kelompok Belajar
7. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
8. Majelis tak'lim
9. Lembaga keterampilan dan pelatihan

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

### **Hasil & Pembahasan**

#### **Gambaran Umum Majelis Taklim At-Taqwa, Ciwaktu, Kota Serang.**

Di Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten terdapat banyak Majelis Taklim, baik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pesantren, pemerintah, swasta maupun masjid. Masjid-masjid yang menyelenggarakan kegiatan Majelis Taklim pada umumnya adalah masjid yang dikelola dengan baik oleh organisasi pengelola yang dikenal dengan istilah Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM), salah satu diantaranya adalah Masjid At-Taqwa dengan nama Majelis Taklim At-Taqwa yang menjadi obyek penelitian ini.

Majelis Taklim Masjid At-Taqwa terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 001 / RW 002 Kampung Ciwaktu Lor, Desa Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang. Majelis Taklim

At-Taqwa adalah salah satu program kegiatan DKM Masjid At-Taqwa yang diselenggarakan secara rutin dan memiliki jamaah yang sangat banyak, baik jamaah perempuan maupun laki-laki. Namun sesuai dengan judul penelitian ini maka pembahasan hasil penelitian ini difokuskan pada Majelis Taklim dengan jamaah kaum perempuan.

Kegiatan Majelis Taklim At Taqwa bagi kaum perempuan dipimpin oleh Ibu Hudaefah dengan seorang narasumber tetap bernama Ustadz Jakaria. Dalam satu bulan dilaksanakan 4 (empat) kali kegiatan Pengajian, yaitu setiap hari Minggu Sore mulai jam 16.00. Jumlah jamaah yang hadir dalam setiap kegiatan rata-rata sekitar 70 orang. Selain berasal dari lingkungan Ciwaktu Lor, kegiatan pengajian juga dihadiri oleh jamaah yang berasal dari tempat lain di Kota Serang.

### **Pelajaran dan Pengetahuan**

Kegiatan pembelajaran pada Majelis Taklim pada umumnya dikenal dengan istilah atau sebutan *Pengajian*. Sebagaimana layaknya pembelajaran pada Pengajian umumnya, materi pokok yang diajarkan adalah pelajaran keagamaan, terutama pelajaran *Fikih* secara umum yang meliputi *ubudiyah*, *amaliah* dan *syar'iyah*. Pelajaran *Ubudiyah* adalah pelajaran tentang ketuhanan (*aqidah*) dan tata cara beribadah.

Pelajaran '*Amaliyah* adalah pelajaran mengenai sikap dan perilaku sopan santun atau amal perbuatan manusia (*adab* dan *akhlak*), baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Sedangkan pelajaran *Syar'iyah* adalah pelajaran tentang hukum dalam Islam, serta sejarah keislaman (*tarikh*).

Di luar Pengajian yang merupakan kegiatan pokok, jamaah Majelis Taklim At Taqwa juga sering kali memperoleh berbagai ilmu pengetahuan yang bersifat umum. Antara lain pengetahuan yang terkait dengan masalah perawatan dan

pendidikan anak (PAUD), penanggulangan dan pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hak-hak dan kewajiban perempuan, pengetahuan tentang gizi keluarga, kesehatan rumah tangga dan lingkungan, keluarga berencana, ekonomi keluarga, pemilihan umum kepala daerah, dan lain-lain. Materi-materi tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga / institusi yang bekerja dengan Majelis Taklim untuk sosialisai program-program mereka. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan tambahan ini bersifat insidental, sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan program lembaga-lembaga tersebut.

Berkenaan dengan gambaran tersebut di atas, Majelis Taklim memiliki nilai guna yang besar baik dipandang dari sisi masyarakat sebagai jamaah dan subyek penerima manfaat maupun dari sudut pandang lembaga-lembaga yang bekerjasama dan mendayagunakan Majelis taklim untuk merealisasikan program-program mereka. Dari sudut pandang masyarakat, jamaah Majelis Taklim memperoleh pelajaran ilmu pengetahuan keagamaan yang mereka butuhkan dengan biaya murah dan waktu yang relatif lentur, sedangkan dari sudut pandang lembaga-lembaga eksternal yang mendayagunakan Majelis Taklim, mereka memiliki mitra strategis sebagai “obyek” pelaksanaan program yang bisa mereka “gunakan” kapan pun dengan biaya yang sangat murah, tanpa harus mengumpulkan orang yang biasanya harus dilakukan melalui persiapan yang rumit.

Dengan demikian, kerjasama antara lembaga-lembaga eksternal penerima manfaat dengan Majelis Taklim sesungguhnya potensi “modal sosial” yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut bagi peningkatan mutu layanan majelis Taklim bagi masyarakat.

### **Metodologi Pembelajaran**

Metodologi pembelajaran yang digunakan di Majelis Taklim pada umumnya menggunakan Metode Klasikal, begitu

pula metodologi pembelajaran yang digunakan di majelis Taklim At-Taqwa Ciwaktu Lor Serang. Dalam setiap kegiatan pembelajaran pada pengajian, metode yang dipakai cenderung monoton, yaitu Ceramah dan Tanya Jawab.

Pengajian di Majelis Taklim At Taqwa terdiri dari 4 Empat mata acara, yang terdiri dari:

- 1) Shalawatan, yaitu pembacaan Shalawat Nabi yang dipimpin oleh salah seorang jamaah, dilakukan oleh jamaah sambil menunggu Kiai atau Ustadz sebagai narasumber;
- 2) Tadarus, yaitu pembacaan salah satu Surat Al Qur'an yang dipimpin oleh Ustad;
- 3) Ceramah, yaitu penyampaian materi pengajian yang dilakukan langsung oleh Ustad sebagai satu-satunya narasumber;
- 4) Tanya Jawab, yaitu suatu *sessi* pengajian yang dilaksanakan setelah Ustadz menyampaikan materi pokok pengajian. Tahapan ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada jamaah guna menyampaikan pertanyaan atau pendapat terkait terkait dengan materi;
- 5) Doa Penutup, dilakukan setiap akhir dari pengajian

Dalam pembelajaran di Majelis Taklim At-Taqwa, selain digunakan metodologi pembelajaran yang masih klasikal (dengan segala kekurangan dan kelebihannya), proses belajar mengajar memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada Kiai sebagai satu-satunya narasumber. Oleh karenanya seringkali kegiatan pengajian tidak berlangsung utuh jika karena satu dan lain hal narasumber berhalangan hadir. Akibatnya, jika narasumber tidak datang pengajian tidak berlanjut. Inilah salah satu kekurangan yang menurut hemat peneliti perlu diperbaiki dan disempurnakan supaya proses pembelajaran dan transformasi bisa berlangsung efektif dan efisien.



## **Media Pendidikan Yang Digunakan**

Sebagaimana metodologi pembelajaran, Media Pendidikan yang dipergunakan di majelis taklim At Taqwa pun masih relatif sederhana dan cenderung apa adanya – bahkan asal ada. Dari pengamatan selama proses penelitian, media pendidikan yang digunakan di Majelis Taklim At Taqwa Ciwaktu Lor tidak lebih dari 4 (empat) jenis media, yaitu *sound system* sederhana (mikropon, amplyfier dan speaker), papan tulis dan spidol, kitab suci Al Qur'an dan buku-buku kumpulan doa.

Mengingat perkembangan kemajuan teknologi dan media pendidikan saat ini serta kompleksitas materi pembelajaran yang diberikan di majelis taklim, ke depan perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan yang menyangkut ketersediaan dan kelengkapan media pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan materi yang disampaikan agar terlaksana kegiatan belajar mengajar yang optimal, efektif dan efisien.

## **Manfaat Majelis Taklim**

Baik dipandang dari sudut masyarakat umum, jamaah, maupun pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang pernah bekerjasama dengan Majelis Taklim At Taqwa, keberadaan Majelis Taklim At-Taqwa memiliki peranan, fungsi, dan manfaat yang besar.

Dari sudut pandang masyarakat, mereka memperoleh manfaat dengan meningkatnya pemahaman ilmu agama sebagai bekal ibadah dan meningkatnya pengetahuan umum kaum perempuan bagi kebaikan keluarga dan rumah tangga. Dari sudut pandang jamaah, mereka memperoleh peningkatan ilmu agama dan pengetahuan umum yang bisa mereka dedikasikan baik untuk dirinya dalam beribadah, melayani keluarga maupun pergaulan di masyarakat. sementara bagi lembaga-lembaga pemerintah maupun lainnya, mereka memiliki *target audience* yang sudah matang tanpa harus

mengeluarkan biaya besar untuk melakukan pengumpulan orang dan pembentukannya maupun pembinaan kelompok sasaran.

## **Kesimpulan**

Majelis Taklim At Taqwa adalah sebuah lembaga pelaksana dan pengelola serta sekaligus sebagai media pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah dirasakan manfaatnya baik oleh jamaahnya, masyarakat umum maupun lembaga-lembaga eksternal yang pernah bekerjasama dengan Majelis Taklim ini.

Lembaga ini diselenggarakan sebagai media layanan pendidikan non-formal bagi kaum perempuan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang mencakup peribadatan (*ubudiyah*), sikap, perilaku dan pergaulan yang baik (*'amaliyah*), serta kaidah-kaidah hukum dalam Islam (*syar'iyah*). Selain sebagai media pendidikan non-formal untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan, Majelis Taklim At Taqwa juga sekaligus berfungsi sebagai Media Pendidikan Non-formal bagi kaum perempuan yang strategis bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk mengedukasi masyarakat sesuai dengan program-program yang mereka canangkan.

Baik dalam peranannya sebagai lembaga penyelenggara dan pelaksana maupun dalam fungsinya sebagai Media Pendidikan Non-formal Bagi Kaum Perempuan, Majelis Taklim At-Taqwa adalah modal sosial yang dihimpun dari potensi dan kearifan masyarakat Ciwaktu Lor guna meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Hal ini mencakup dalam konteks peningkatan mutu spiritualitas keberagamaannya sebagai *syi'ar Islam*; maupun dalam konteks pembentukan masyarakat warga negara yang baik (*good citizenship*). Baik dalam konteks peranan maupun fungsinya Majelis Taklim At-Taqwa memiliki

kekurangan dan kelebihan sehingga perlu memperoleh perhatian dari stake holder pendidikan dan kemasyarakatan agar majelis taklim ini lebih optimal efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan.

### **Saran**

Sebagai lembaga dan media pendidikan non-formal bagi kaum perempuan yang dirasakan dan dibutuhkan keberadaannya, kepada Majelis Taklim At Taqwa secara kelembagaan perlu diberikan *empowerment*. Yaitu upaya terencana dan sistematis guna mereduksi kekurangannya dan meningkatkan kelebihanannya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada kaum perempuan.

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan non-formal bagi kaum perempuan, para pengelola Majelis Taklim At-Taqwa perlu memperoleh peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan tata-laksana organisatoris dalam merancang program dan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi kaum perempuan. Sebagai media pendidikan non-formal bagi kaum perempuan maka sarana dan prasarana Majelis Taklim At Taqwa perlu dilengkapi seoptimal mungkin sehingga peranan dan fungsinya dapat terlaksana dengan optimal, efektif dan efisien. Hal-hal yang perlu disempurnakan antara lain penata-laksanaan organisasi, penyiapan dan penambahan SDM Pengelola dan Sumber Belajar, program dan kurikulum pelajaran serta nilai-nilai keislaman maupun pengetahuan umum yang akan ditransformasikan, dan berbagai alat bantu penunjang pendidikan baik yang berupa *hardware* maupun *software* yang dibutuhkan.

## Daftar Pustaka

- Ashshiddiqi, Hasbi, et al. 2004, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Departemen Agama
- \_\_\_\_\_, 2000 *Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta, Bulan Bintang, Cetakan I,
- Asrohah, Hanun, 2001, *Sejarah Pendidikan Islam*, Ciputat, Logos, Cetakan II,
- Bakhtiar, Wardi, 1990, *Laporan Penelitian Perkembangan Pesantren di Jawa Barat*, Bandung, Balai Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati,
- Dhofier, Zamakhsyari, 1982, *Tradisi Pesantren*, Jakarta, LP3ES,
- Kamal Hasan, Muhammad. 1987. *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, Jakarta, Lingkaran Studi Indonesia,
- Madjid, Nurcholis, 1995, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta, Paramadina,
- Mastuhu, 1994, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta, INIS, Seri XX,
- Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, Cetakan ke 11,
- Naisbit, John, 1996, *Megatrends Asia: Delapan Megatrends Asia yang Mengubah Dunia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
- Nata, Abuddin, 2003, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-8,

- Postman, Neil, 2002, *Matinya Pendidikan: Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah*, Yogyakarta, Jendela, Cetakan II,
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, Edisi Revisi, Cetakan II,
- Soetari AD, Endang, 1987, *Laporan Penelitian Sistem Kepemimpinan Pondok Pesantren*, Bandung, Balai Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati,
- Sudjatmoko, 1984, *Etika Pembebasan*, Jakarta, LP3ES,
- Tafsir, Ahmad, 2004, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Cetakan Ke-4,
- Wan Daud, Wan Mohd Nor, 2003, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, Bandung, Mizan,



## CITRA POLITIK PEREMPUAN DI KOTA CILEGON

*Oleh : Rina Yulianti & Rahmawati*

### **Pendahuluan**

Isu-isu mengenai politikus perempuan yang tersangkut masalah korupsi di Indonesia ini menjadi banyak sorotan public. Dimana 2 (dua) nama yang sangat terkenal di masyarakat yaitu Angelina Sondakh dan Wa ode tersangkut masalah korupsi yang nilainya tidak sedikit. Dan kasus ini menjadikan banyak perbincangan di kalangan pengamat di televisi terkait dengan pernyataan mereka dikala menjadi saksi pihak lain. Sehingga menarik masyarakat untuk mengetahui kelanjutan dari kasus yang terjadi. Sebagai politikus muda perempuan yang cukup handal dan mempunyai citra yang baik di kalangan masyarakat tentunya dengan kasus korupsi ini dapat merusak citra yang telah mereka bangun selama ini, apalagi mereka merupakan kader-kader partai yang besar di dalam kemenangan pemilu, dan mereka juga mempunyai posisi yang penting di dalamnya. Tidak hanya mencoreng nama mereka secara pribadi tetapi juga mencoreng nama partai.

Seperti kita ketahui citra politik, identik dengan pengemasan perwajahan atau *covering image personal*. Semakin populer baik secara fisik maupun perilaku maka semakin baik pencitraan yang diciptakan. Politikus muda perempuan cantik, pintar di kalangan partainya adalah wilayah yang paling mudah melakukan citra politik. Sebagai contoh Angelina Sondakh politikus muda yang juga mantan puteri Indonesia menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Demokrat mempunyai kedekatan lebih dengan media massa, dan memiliki nilai *walkpoint view* tersendiri, yakni popularitas

Di dalam politik, perempuan mempunyai wajah tersendiri dalam perjalanannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan juga menghiasi dari perjalanan perpolitikan di pusat pemerintahan atau pun daerah. Seperti Megawati Sukarnoputri dan beberapa nama lain yang memberikan warna di dalam perpolitikan dan memberikan citra yang positif. Walaupun akhir-akhir ini citra politik perempuan menjadi perbincangan masyarakat. Wajah perpolitikan perempuan di Indonesia ini juga terjadi di Kota Cilegon Provinsi Banten. Secara keterwakilan tentunya anggota legislative perempuan di Kota Cilegon belum sesuai kuota yang sudah ditetapkan, karena dari data yang ada, anggota DPRD perempuan hanya 6 orang di Kota Cilegon.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara studi literatur tentang : *bagaimana politisi perempuan memandang citra politik perempuan saat ini di Kota Cilegon ?*

### **Tinjauan Pustaka**

Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik memiliki dua sasaran strategis, *pertama* memberi



dampak atau gambaran positif kepada institusi-institusi agar lebih bisa memahami sekaligus mengeliminasi berbagai bentuk rasisme (termasuk subordinasi dan marginalisasi) serta *seksisme* (*sexual harassment*) dimanapun perempuan berada. *Kedua*, agar institusi-institusi tersebut mampu mencegah terjadinya prasangka gender dan sukuisme. (Ani W Soejipto: 2001:230, dikutip dalam Agustino: 2006: 23). Oleh karena itu, agar ketimpangan gender dan representasi perempuan di lembaga politik lebih adil, maka perlu dilakukan gerakan-gerakan demokratis yang lebih nyata, salah satunya adalah menjalankan affirmative action secara konsekuen dan menerapkan sistem kuota bagi perempuan.

Peluang bagi perempuan untuk berkarya sebenarnya telah tersedia ruangnya dan juga telah diatur dibanyak peraturan dan undang-undang di antaranya :

1. UUD 1945 Pasal 27
2. Undang-undang No. 68 Tahun 1958 tentang persetujuan Konversi Hak-hak Politik Kaum Wanita.
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita.
4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.
5. Undang-undang No. UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
6. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
7. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 jo UU No. 8 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Meskipun peluang perempuan untuk masuk dalam dunia public politik, sudah didukung kuat oleh undang-undang,

tetapi bukan tanpa kendala atau hambata. Beberapa kendala utama politik yang dihadapi oleh kaum perempuan di Indonesia adalah : 1) Politik kaum pria yang terlalu dominative, 2) Kurangnya dukungan partai, 3) Kendala ideologis. Salah satu jargon ideologis yang mengekang aktivitas perempuan ialah adanya ungkapan yang mengatakan, ketika perempuan menjadi politisi, ia berhenti menjadi seorang ibu. 4) Mind set, bahwa keterlibatan perempuan dalam berpolitik, semata-mata bukan pengabdian pada nusa dan bangsa, tetapi hanya untuk berjuang demi perempuan saja sehingga menimbulkan ego sektoral. 5) Masih minimnya wawasan politik baik dalam konteks local, nasional, maupun internasional. Perempuan yang mempunyai wawasan politik luas membuat politisi perempuan tidak tampil eksklusif, melainkan inklusif dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang elegan dan terbuka bagi segenap masukan positif dan konstruktif dari segenap spectrum masyarakat. 6) Masih minimnya perempuan yang berkiprah aktif di partai-partai politik dan turut serta di dalam proses-proses pengambilan keputusan yang strategis. Artinya kader-kader perempuan di partai politik masih sangat rendah. Partai politik kurang bisa merekrut perempuan untuk pemenuhan kuota calon legislatif. Masih ada politisi perempuan pasif dan memposisikan diri semata sebagai obyek “pelengkap penderita” di dalam institusi atau lembaganya.

7) Masih ada stigma bahwa perempuan tidak bisa aktif di dalam memanfaatkan peluang-peluang politik yang ada, tidak siap bersaing atau berkompetisi dikancah politik, khususnya untuk memperoleh legitimasi rakyat dalam pemilu karena mempunyai tugas ganda. 8) Kurangnya rasa percaya diri atau kepercayaan. Kurangnya rasa kepercayaan diri adalah salah satu penyebab utama atas kurang keterwakilan perempuan dalam ruang-ruang publik politik; parlemen, yudikatif, pemerintahan hingga partai-partai politik. Hal ini dikarenakan adanya argument bahwa perempuan makhluk lemah dan harus

dilindungi. Oleh karena itu, ranah pekerjaan yang cocok untuk perempuan adalah ranah domestic atau rumah tangga saja. Dan 10 ) Peran media massa yang masih kurang mendorong peran perempuan dalam konteks ruang publik politik. Media massa acapkali meminimalkan peliputan peristiwa dan kepentingan kaum perempuan. Media massa kerap kali kurang menginformasikan secara seimbang mengenai hak-hak dan peran-peran perempuan dalam masyarakat; termasuk di dalamnya jarang sekali media massa meliput isu-isu yang berkaitan dengan langkah-langkah pemerintah untuk memperbaiki kondisi atau posisi kaum perempuan.

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggapan politisi perempuan tentang citra politik perempuan saat ini di Kota Cilegon. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

- a) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kiprah politikus perempuan
- b) Memahami penting sebuah imege di dalam politik.
- c) Sebagai masukan bagi pihak terkait dalam upaya program pemberdayaan politik perempuan.

### **Metode penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1987) adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sementara Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006: 4-5). Yang menjadi obyek penelitian primer adalah perempuan yang

menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon periode 2009-2014. Sumber data dalam penelitian ini melalui wawancara dan studi kepustakaan/literature.

## Hasil Penelitian

Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, Grogol, Jombang, Purwakarta, Cilegon dan Cibeber dengan jumlah penduduk 309.097 jiwa. Berjarak 17 Km dari Ibukota Provinsi Serang dan 120 Km ke Ibukota Pusat Jakarta. Menurut UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD pasal 26 ayat 2 d bahwa kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi. Berdasarkan BPS 2006 jumlah penduduk Kota Cilegon adalah 331.667 jiwa. Berdasarkan besarnya jumlah penduduk tersebut, maka jumlah kursi di DPRD Kota Cilegon sebanyak 33 kursi. Perolehan 1 kursi DPRD harus mendapatkan kurang lebih 100.000 suara pemilih pada tiap pemilu.

DPRD Kota Cilegon berlokasi di jalan Jenderal Soedirman berhadapan dengan kantor Pemerintah Kota Cilegon. Berdasarkan hasil pemilu 2009, saat ini terdapat 33 orang anggota DPRD dari beberapa partai. Berdasarkan komposisi perolehan kursi parpol di DPRD Kota Cilegon, Partai Golkar mendapatkan kursi lebih banyak. Berikut ini komposisi kursi di DPRD Kota Cilegon berdasarkan partai politik

**Tabel Jumlah Kursi Partai Politik DPRD  
Kota Cilegon Periode 2009-2014**

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Golkar	11

2.	PDIP	3
3.	PPP	3
4.	Demokrat	3
5.	PAN	4
6.	PKNU	1
7.	PBB	1
8.	PKS	4
9.	PKB	3

Sumber : DPRD Kota Cilegon 2012

Sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2012 pasal 8 ayat 2 E menyebutkan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Kuota 30% tersebut memberikan kesempatan yang lebih besar pada perempuan untuk berkiprah lebih besar lagi pada dunia politik. Berdasarkan hasil pemilu 2009, komposisi anggota legislative perempuan Kota Cilegon sebagai berikut:

**Tabel Komposisi Anggota DPRD Kota Cilegon Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Anggota Dewan
1.	Laki-laki	27 orang
2.	Perempuan	6 orang
	Jumlah	33 orang

Sumber : DPRD Kota Cilegon 2012

Berdasarkan kuota 30%, seharusnya jumlah anggota legislative perempuan sebanyak 10 orang, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah legislative perempuan belum mencapai kuota. Dari 6 orang anggota perempuan, 2 orang dari Partai Amanat Nasional, 2 orang dari Partai Persatuan

Pembangunan, 1 orang dari Partai Demokrat dan 1 orang dari Partai Golkar. Partai Golkar meskipun memperoleh jumlah kursi lebih banyak tetapi hanya ada satu perwakilan perempuan sebagai anggota legislative.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan image atau citra politik perempuan di tingkat local berkaitan erat dengan sosok yang ada di belakang politisi perempuan tersebut. Keikutsertaan perempuan dalam partai politik untuk kemudian terpilih menjadi anggota DPRD banyak didukung oleh factor kekerabatan dan nama besar suami, ayah atau bahkan kakek yang politisi perempuan tersebut. Jika citra atau image sosok di belakang politisi perempuan tersebut dipandang baik oleh masyarakat, maka citra atau image politisi perempuan itu pun dianggap baik. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan dukungan pada pemilihan umum yang dilakukan.

### **Simpulan dan Saran**

Jumlah anggota DPRD Perempuan Kota Cilegon periode 2009-2014 belum memenuhi kuota 30% sesuai dengan UU Pemilu No. 8 tahun 2012. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative Kota Cilegon baru mencapai 60% dari kuota yang ditetapkan. Sementara citra atau image politisi perempuan di tingkat daerah, terutama Kota Cilegon sangat dipengaruhi oleh sosok yang berada di belakang politisi perempuan tersebut. Image atau citra politisi akan terbangun baik, jika sosok yang berada di belakangnya dikenal baik oleh masyarakat. Hal ini memudahkan bagi politisi dalam perolehan dukungan suara pada pemilihan umum.

Untuk meningkatkan jumlah politisi perempuan pada jabatan-jabatan public dan lembaga legislative, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melakukan pendidikan politik bagi perempuan melalui media pengajian dan arisan
2. Meningkatkan sosialisasi tentang kuota 30% bagi perempuan dalam partai melalui media massa local dan memasang plamfet atau poster di lingkungan masyarakat
3. Memberi dukungan kepada perempuan untuk terus berkiprah dalam politik
4. Menghapuskan ideology dan kendala sosio budaya yang menghambat aktivitas perempuan di ruang public, terutama ruang politik dan jabatan public.

### **Daftar Pustaka**

Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. AIPI Bandung

Machfud, M.D. 1998. Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan. PT. Cidesindo bekerjasama dengan U.I.I. Yogyakarta & Yayasan IPPSDM

Moleong. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Gramedia, Jakarta

Pramusinto, Agus. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum dan pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota





## **ANALISIS PERSEPSI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI**

(Studi Kasus di FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

*Oleh: Yeni Widyastuti & Arenawati*

### **Pendahuluan**

Kesempatan dalam kiprah politik dan peran kepemimpinan bagi perempuan, penting untuk terus ditingkatkan tidak hanya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, tetapi juga agar perempuan dapat membangun sistem dan etika politik yang semakin baik. Ini terkait dengan kapasitas perempuan sebagai pemilih, pemimpin partai politik, legislator atau pejabat pemerintah supaya semakin banyak kebijakan publik yang merefleksikan kekhawatiran dan perspektif perempuan serta diiringi derajat sensitifitas yang makin tinggi pada berbagai persoalan di tanah air. Hasil penelitian di beberapa negara di dunia menunjukkan bahwa efektifitas peran perempuan dalam mendorong kesejahteraan lebih kuat pengaruhnya melalui peran dalam legislatif ketimbang eksekutif.

Namun pada kenyataannya, masih terjadi adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki yang terkait dengan adanya budaya, adat istiadat, religi serta norma-norma pada tataran lokal, sekalipun dalam lingkup nasional negara

menjamin kesederajatan ini dalam konstitusinya. Di Indonesia, perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan peran ini (atau lazim disebut sebagai kesetaraan jender) relatif tidak seberat dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia. Dalam perspektif politik, bahkan perempuan Indonesia jauh lebih cepat memperoleh hak-haknya dibandingkan negara lain yang lebih maju, misalnya Amerika Serikat. Di negara ini kaum perempuan memerlukan perjuangan sekitar 60 tahun untuk memperoleh hak pilih. Adapun perempuan Indonesia sejak pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 1955 atau 10 tahun sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945, hak memilih sudah dimilikinya. Indonesia bahkan sudah pernah memiliki presiden perempuan, dibandingkan dengan Amerika Serikat yang baru memiliki calon presiden perempuan.

Kepemimpinan akan sangat berkaitan dengan karakteristik, kemampuan, gaya kepemimpinan, relasi, interaksi serta penilaian-penilaian praktis dari masyarakat. Pemimpin yang baik akan dinilai dari kemampuannya dalam menyelesaikan tugas, keeratan hubungan dengan pengikutnya (*cohesiveness*), moralitasnya, senantiasa belajar dan berusaha untuk memperbaiki dan mengembangkan diri (*continual learning and development*). Masyarakat akan menuntut akuntabilitas dari para pemimpinnya karena mereka mempunyai hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Dari latar belakang di atas maka semakin kita sadari bahwa etika sangat berperan dalam mewujudkan akuntabilitas birokrasi para pejabat publik untuk melaksanakan tugas mengelola pemerintahan yang baik. Menjadi pemimpin itu meliputi bagaimana menggerakkan sumber daya manusia, bagaimana mengatur strategi terbaik dalam organisasi publiknya, maka kolaborasi antara

kompetensi terbaik dalam pemahaman dan ketrampilan sosial, teknis dan organisatoris harus dipunyai.

Kepemimpinan Perempuan merupakan fenomena yang menarik pada saat ini, di tengah isu kesetaraan gender yang merebak. pemimpin-pemimpin perempuan bermunculan di berbagai organisasi, termasuk birokrasi. Kemampuan pemimpin perempuan seringkali dipandang sebelah mata, banyak stigma yang menyatakan bahwa perempuan hanya cocok untuk posisi tertentu saja, seperti kepala bagian keuangan, kepegawaian dan humas. Persepsi bahwa perempuan lebih teliti, lebih betah untuk bekerja berjam-jam, lebih sabar, lebih luwes banyak menempatkan perempuan pada posisi tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Persepsi Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi”.

### **Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan**

Dalam *Women's Studies Encyclopedia Volume I* halaman 153 (dikutip dari Sumiarni, E.2004:2) menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat, sehingga peran, fungsi maupun tanggung jawab ini dapat berubah, tidak bersifat permanen maupun universal.

### **Persepsi**

#### ***Apakah Persepsi itu?***

1. Persepsi adalah suatu proses membuat penilaian (*judgement*) atau membangun kesan (*impression*) mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan

penginderaan seseorang. Penilaian atau pembentukan kesan ini adalah dalam upaya pemberian makna kepada hal-hal tersebut (Menurut Harvey & Smith; Wrigthsman & Deaux dalam Wibowo, 2000:2.3)

2. Suatu proses melekatkan atau memberikan makna kepada informasi sensori yang diterima seseorang (Verderber & Verderber dalam Wibowo, 2000:2.3)

### ***Fungsi Persepsi Sosial***

1. Membantu kita menghadapi berbagai macam orang dan situasi yang kita temui sehari-hari, persepsi membantu kita untuk tahu dan mengerti hal-hal yang kita hadapi.
2. Pada diri manusia terdapat kebutuhan yang kuat untuk mengenali dan memperoleh kepastian tentang hal-hal yang ditemuinya, sebagaimana adanya *safety needs* dalam hirarki kebutuhan Maslow, dan persepsi membuat kita siaga menghadapi kemungkinan yang terjadi
3. Dalam interaksi sosial kita tidak hanya sekedar mengerti siapa yang kita hadapi, tetapi perlu juga untuk meramalkan atau mengantisipasi sikap dan perilaku orang lain, dengan siapa kita berinteraksi, agar interaksi tersebut berjalan dengan lancar. Untuk pengambilan keputusan yang harus cepat dan tidak ada waktu untuk menganalisis situasi atau peristiwa yang kita temui, setidaknya persepsi dapat kita jadikan pegangan untuk sementara waktu.

## **Kepemimpinan**

### **Pengertian Kepemimpinan**

Ketika seorang individu berusaha mempengaruhi perilaku individu yang lainnya dalam suatu kelompok tanpa menggunakan bentuk paksaan, usaha ini menggambarkan suatu proses kepemimpinan. Relevansi kekuasaan dan pengaruh nampaknya tidak bisa dihindari lagi dalam kegiatan

kepemimpinan. Kepemimpinan sangat diperlukan jika suatu organisasi ingin sukses. Anggota suatu organisasi yang baik selalu ingin tahu bagaimana mereka dapat menyumbang dalam pencapaian tujuan organisasi dan setidaknya mempunyai gairah atau antusiasme sebagai dasar motivasi eksternal untuk menjaga tujuan-tujuan mereka tetap harmonis dengan tujuan organisasi.

Dalam buku *Handbook of Leadership* yang dikutip Gibson (1997:5) memberikan definisi kepemimpinan sebagai suatu interaksi antar anggota suatu kelompok. Pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Kepemimpinan timbul ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompetensi anggota lainnya dalam kelompok. Kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan.

### **Metode Penelitian**

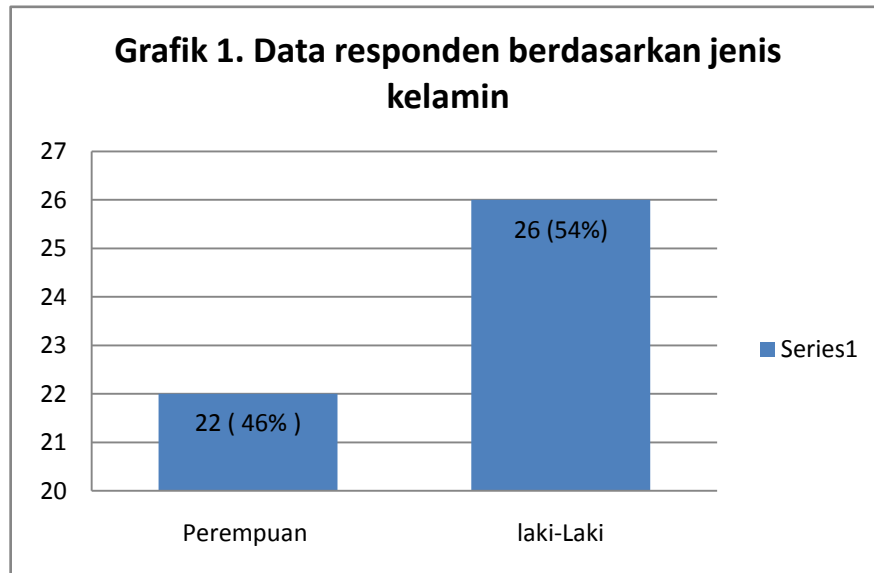
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian adalah metode penelitian survai. Menurut Singarimbun (1989 : 3) penelitian survai adalah penelitian yang mengambil variabel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di lingkungan FISIP Untirta yang terdiri dari dosen dan staf baik yang berstatus PNS maupun Non PNS yang berjumlah 61 orang. Dengan menggunakan rumus Taro Yamane dengan sampling error sebesar 7 persen maka diperoleh responden sebanyak 48 orang.

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

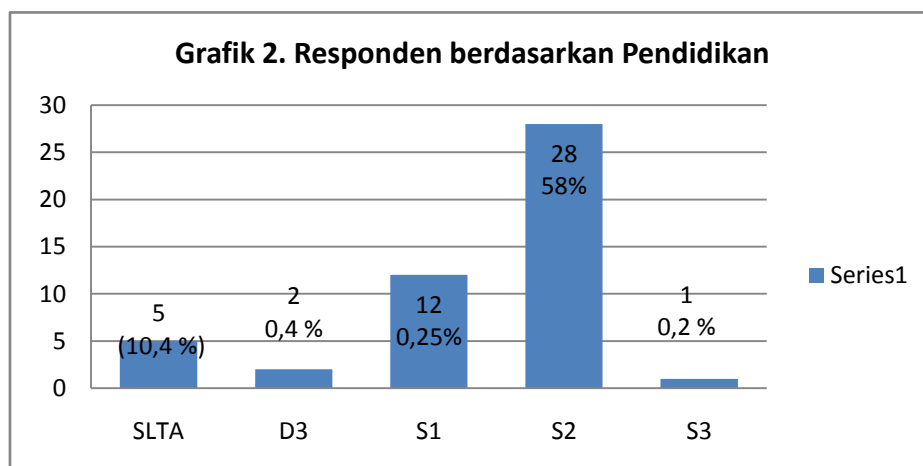
Pada saat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) sedang mempersiapkan pengalihan status negeri secara utuh dan

menyeluruh dengan ditandainya pengalihan aset dan pengelolaan sumber daya dari Yayasan Pendidikan Tirtayasa kepada pemerintah yang dilaksanakan paling lama dalam kurun waktu tiga tahun. Maka pada tanggal 10 Juni 2003 dikeluarkan Surat Keputusan dari DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS dengan nomor 1179/D/ T/2003 tentang izin operasional program studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, seiring dengan operasional program studi maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik didirikan pada tahun akademik 2002/2003 yang mendapat legitimasi menjadi bagian dari Untirta dengan surat keputusan nomor 124/0/2004 sesuai dengan SOTK. Pada tanggal 1 Februari 2006 telah dikeluarkan SK No. 295/D/T/2006 tentang Perpanjangan izin penyelenggaraan Program studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi selama 4 tahun. FISIP Untirta terus berpacu dan berkembang untuk berusaha mensejajarkan diri dengan fakultas yang lebih dulu berdiri dengan mengeluarkan jurus-jurus strategis baik dibidang pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat, sarana dan prasarana sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakan berbagai kegiatan dan beberapa sarana untuk meningkatkan kualitas baik dosen, mahasiswa maupun karyawan.

## Deskripsi Hasil Penelitian Identitas Responden

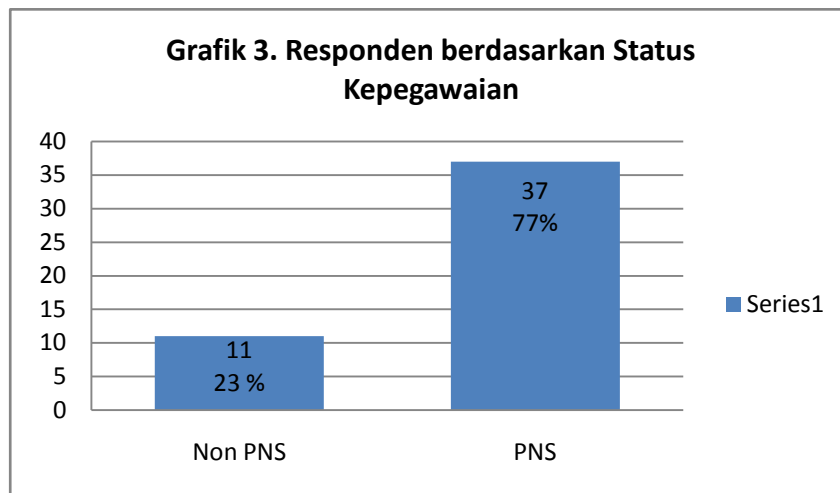


Berdasarkan grafik di atas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin maka yang menjadi responden lebih banyak laki-laki daripada perempuan dengan perbandingan 54 persen responden laki-laki yaitu sebanyak 26 orang dan 46 persen perempuan yaitu sebanyak 22 orang



Berdasarkan grafik di atas maka dapat dilihat bahwa responden terbesar adalah terdiri dari lulusan Strata 2 (S2)

yaitu sebanyak 28 orang atau 58 persen.. Hal ini disebabkan karena sebagian besar responden adalah para dosen yang secara kualifikasi minimum berpendidikan S2. Sedangkan responden dengan jumlah terkecil adalah dengan tingkat pendidikan D3 yaitu sebanyak 2 orang atau 0,4 persen. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden adalah tinggi.



Jumlah responden berdasarkan status kepegawaian sebagian besar terdiri dari PNS yaitu sebesar 77 persen atau sebanyak 37 pegawai. Sedangkan jumlah responden yang terdiri dari pegawai non PNS adalah sebesar 23 persen atau 11 pegawai.

## Deskripsi Hasil Penelitian

**Tabel 2**  
**Sebaran Jawaban Responden Berdasarkan Kategori**

Pertanyaan/ Jawaban	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sangat Setuju	4	7	6	9	3	7	4	6	6	4	6	3	6	7	3	5	3	4
Setuju	37	31	36	21	34	29	24	35	30	34	36	36	33	32	29	23	22	22
Tidak Setuju	6	9	4	5	11	12	19	7	11	9	4	9	8	7	15	20	21	21
Sangat Tidak Setuju	1	1	2	3	0	0	1	0	1	1	2	0	1	2	1	0	1	1

(Sumber: Data Diolah, 2012)



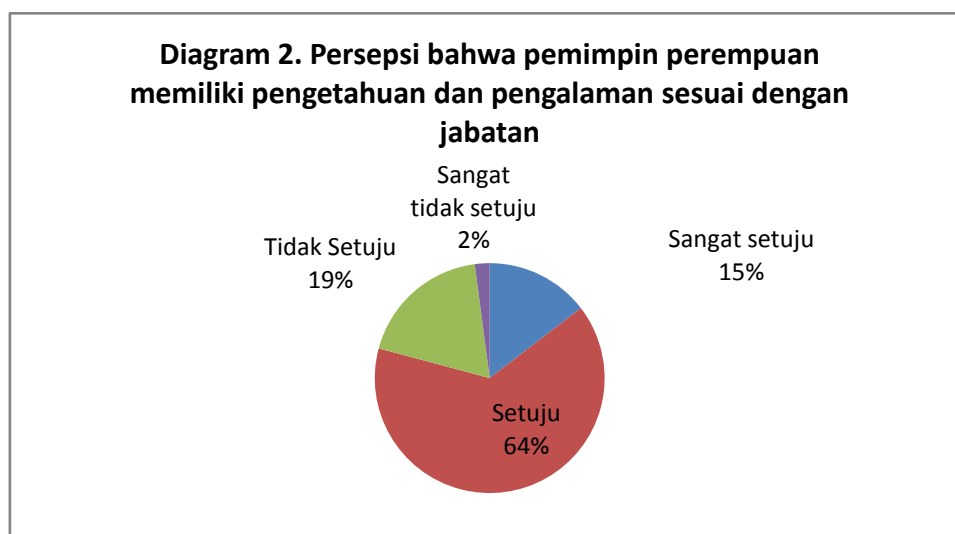
Secara keseluruhan berdasarkan tabel 2 di atas , jawaban yang disampaikan oleh 48 responden menunjukkan adanya kecenderungan untuk menjawab setiap item kuesioner dengan jawaban “Setuju” yang dalam skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini memiliki skor 3. Sedangkan kategori jawaban yang diberi skor terendah yaitu “Sangat Tidak Setuju” merupakan pilihan jawaban terendah yang dipilih oleh para responden.

Berdasarkan tabel di atas, juga dapat terlihat keberagaman jawaban yang diberikan responden terhadap setiap item kuesioner. Meskipun ada kecenderungan responden untuk menjawab “setuju” namun di beberapa item kuesioner yang diberikan responden juga memiliki jawaban yang berbeda sehingga item kuesioner dengan jawaban “sangat setuju” dan “tidak setuju” juga terisi meskipun tidak secara keseluruhan. Dalam konteks persepsi dapat kita lihat bahwa variasi jawaban yang diberikan oleh responden menunjukkan adanya keberagaman persepsi yang dimiliki oleh para responden dalam menanggapi dan memmberikan jawaban terhadap kuesioner yang diberikan.



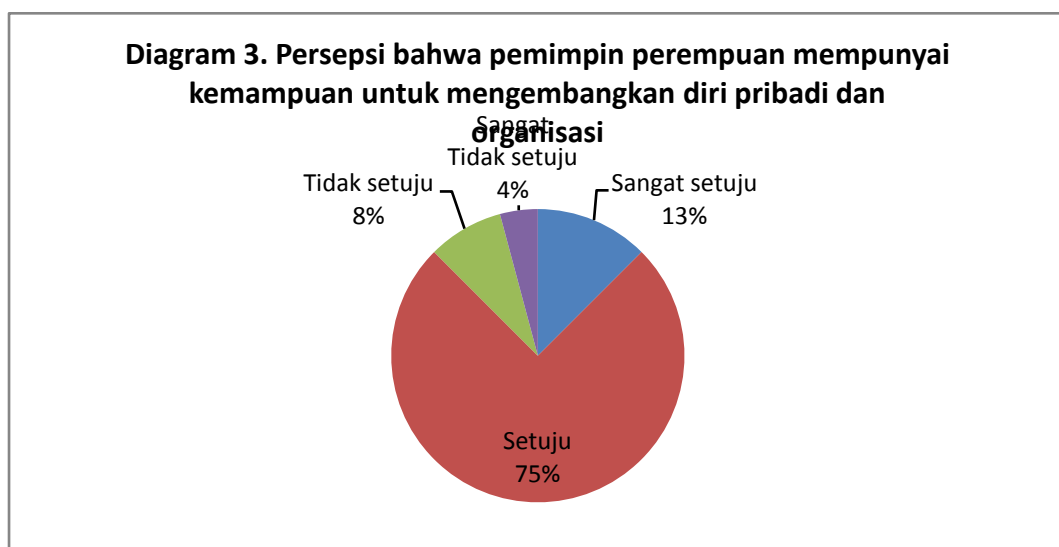
Berdasarkan diagram di atas , dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 77 persen atau 37 responden, memiliki persepsi bahwa para pemimpin perempuan dalam birokrasi memiliki pengetahuan yang luas. Hanya 2 persen atau 1 responden saja yang memberikan jawaban “sangat tidak setuju”. Sedangkan yang memberikan jawaban “ sangat setuju” adalah sebanyak 8 persen dan “tidak setuju” sebanyak 13 persen.

Jawaban responden yang sebagian besar memiliki kecenderungan setuju dan sangat setuju adalah mencapai 85 persen dibandingkan dengan kecenderungan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yang mencapai 15 persen saja. Hal ini dimungkinkan terjadi karena dengan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, misalnya pendidikan dan kesempatan kerja, memungkinkan para perempuan untuk menenpuh pendidikan yang tinggi dan memiliki pengetahuan yang luas. Kondisi ini mempengaruhi persepsi responden bahwa para perempuanpun juga memiliki pengetahuan yang luas, sama halnya dengan pemimpin laki-laki. Apalagi saat ini kompetensi yang baik sangat dibutuhkan sebagai seorang pemimpin.



Berdasarkan diagram di atas , dapat terlihat bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan bahwa pemimpin perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan jabatan yang diembannya adalah sebanyak 64 persen menyatakan “setuju” dan 15 persen menyatakan “sangat setuju”. Sementara jawaban responden yang menyatakan “tidak setuju” adalah sebanyak 19 persen dan “sangat tidak setuju” sebanyak 2 persen.

Jawaban responden yang sebagian besar memiliki kecenderungan setuju dan sangat setuju adalah mencapai 79 persen dibandingkan dengan kecenderungan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yang mencapai 17 persen saja. Berdasarkan kecenderungan jawaban ini dapat terlihat bahwa persepsi atas pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh perempuan dalam menduduki jabatan di lingkungan FISIP Untirta adalah sesuai dengan jabatan yang diembannya. Hal ini menunjukkan bahwa di lingkungan FISIP Untirta kesempatan untuk menduduki jabatan apapun bagi laki-laki dan perempuan adalah setara dan sangat terbuka bagi siapapun yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya.



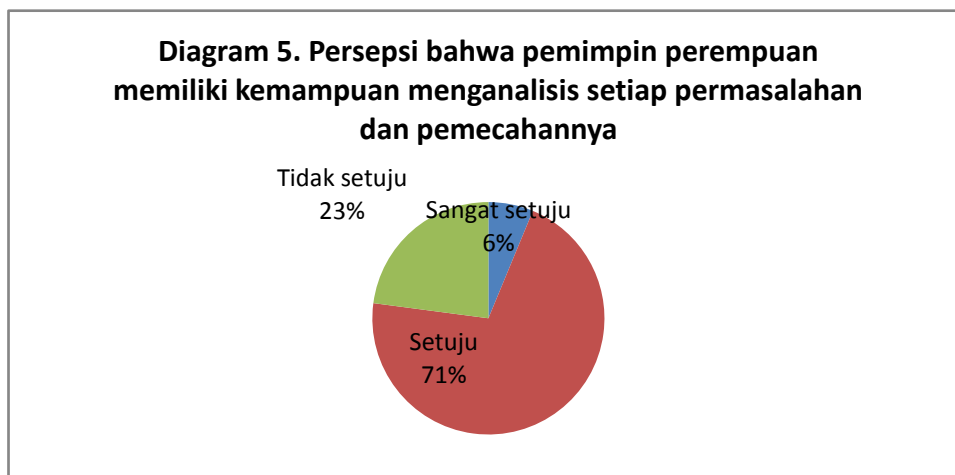
Berdasarkan data pada diagram 3 di atas , terlihat bahwa jawaban responden atas pertanyaan bahwa pemimpin perempuan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan pribadi dan organisasi adalah sebanyak 75 persen responden menyatakan setuju dan 13 persen menyatakan sangat setuju. Adapun responden yang memberikan jawaban “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” masing-masing adalah 8 persen dan 4 persen. Kecenderungan jawaban yang menyatakan “sangat setuju” dan “setuju” adalah 88 persen sedangkan kecenderungan jawaban yang menyatakan “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” adalah 12 persen. Berdasarkan hal ini dapat kita lihat bahwa persepsi yang dimiliki responden terhadap pemimpin perempuan sangat tinggi atas keyakinan bahwa pemimpin perempuanpun memiliki kemampuan untuk mengembangkan organisasi.



Berdasarkan data pada diagram di atas , terlihat bahwa jawaban responden atas pertanyaan bahwa pemimpin perempuan keingintahuan yang tinggi dalam menunjang pekerjaannya adalah sebanyak 55 persen responden menyatakan “setuju” dan 24 persen menyatakan “sangat setuju”. Adapun responden yang memberikan jawaban “tidak

setuju” dan “sangat tidak setuju” masing-masing adalah 13 persen dan 8 persen.

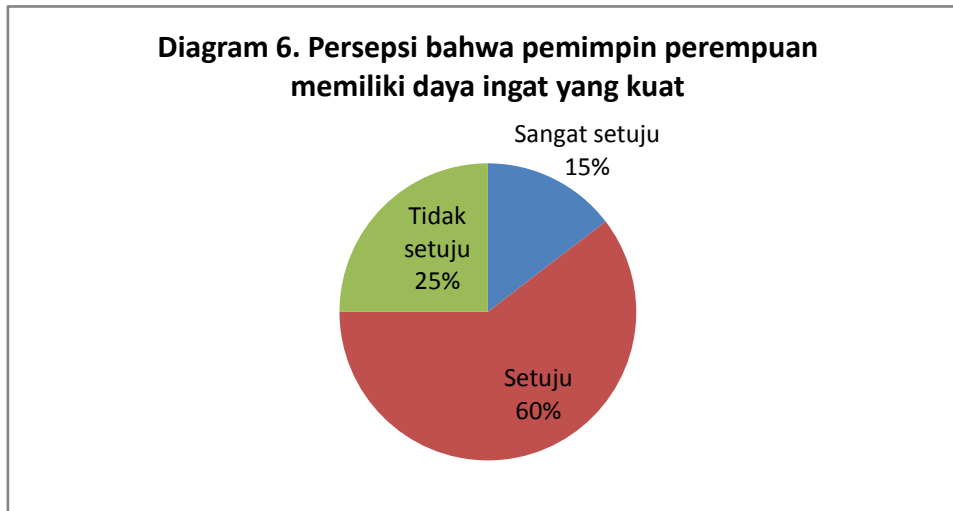
Kecenderungan jawaban yang menyatakan “sangat setuju” dan “setuju” adalah 79 persen sedangkan kecenderungan jawaban yang menyatakan “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” adalah 21 persen. Persepsi yang dimiliki responden yang menyatakan bahwa keingintahuan pemimpin perempuan untuk menunjang pekerjaannya menunjukkan bahwa para pemimpin perempuan memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya dengan seluas mungkin mengembangkan rasa ingin tahunya atas keadaan dalam organisasi dan untuk menunjang pekerjaan yang dimilikinya.



Berdasarkan diagram di atas, dapat terlihat bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan bahwa pemimpin perempuan memiliki kemampuan untuk menganalisis setiap permasalahan dan pemecahannya adalah sebanyak 71 persen menyatakan “setuju” dan 6 persen menyatakan “sangat setuju”. Sementara jawaban responden yang menyatakan “tidak setuju” adalah sebanyak 23 persen dan tidak ada responden yang menjawab “sangat tidak setuju”.

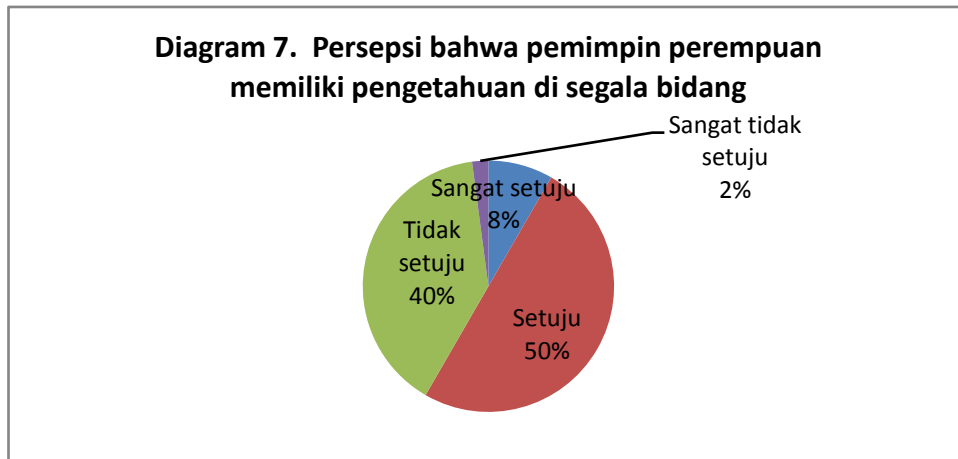
Kecenderungan jawaban yang menyatakan “sangat setuju” dan “setuju” adalah 77 persen sedangkan jawaban yang menyatakan “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” adalah 23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki

persepsi yang positif bahwa setiap pemimpin perempuan memiliki kemampuan untuk menganalisis setiap permasalahan dan pemecahannya.



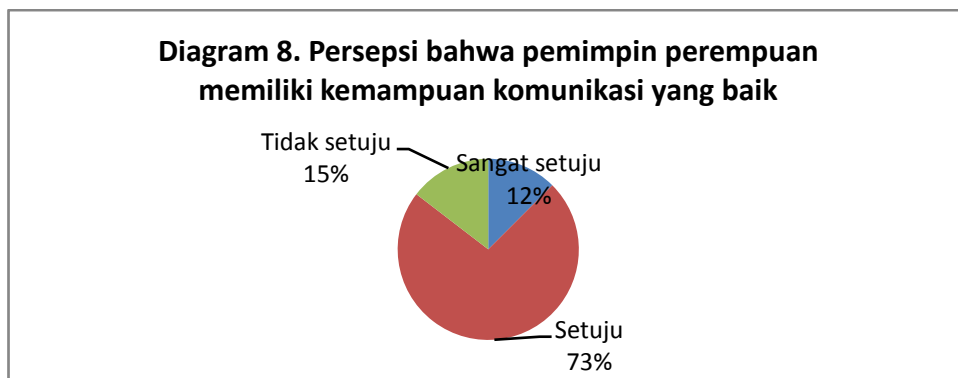
Berdasarkan diagram di atas, dapat terlihat bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan bahwa pemimpin perempuan memiliki daya ingat yang kuat adalah sebanyak 60 persen menyatakan “setuju” dan 15 persen menyatakan “sangat setuju”. Sementara jawaban responden yang menyatakan “tidak setuju” adalah sebanyak 25 persen dan tidak ada responden yang menjawab “sangat tidak setuju”.

Kecenderungan jawaban yang menyatakan “sangat setuju” dan “setuju” adalah 75 persen sedangkan jawaban yang menyatakan “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” adalah 25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang positif bahwa setiap pemimpin perempuan memiliki daya ingat yang kuat. Dapat dikatakan bahwa memang sebagian besar perempuan harus memiliki kemampuan yang sifatnya “multi tasking” mengingat selain sebagai perempuan pekerja disatu sisi sementara di sisi lain adalah sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai banyak tugas, dirumah maupun di kantor.



Berdasarkan diagram di atas, dapat terlihat bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan bahwa pemimpin perempuan memiliki pengetahuan di segala bidang adalah sebanyak 50 persen menyatakan “setuju” dan 2 persen menyatakan “sangat setuju”. Sementara jawaban responden yang menyatakan “tidak setuju” adalah sebanyak 40 persen dan 8 persen responden yang menjawab “sangat tidak setuju”.

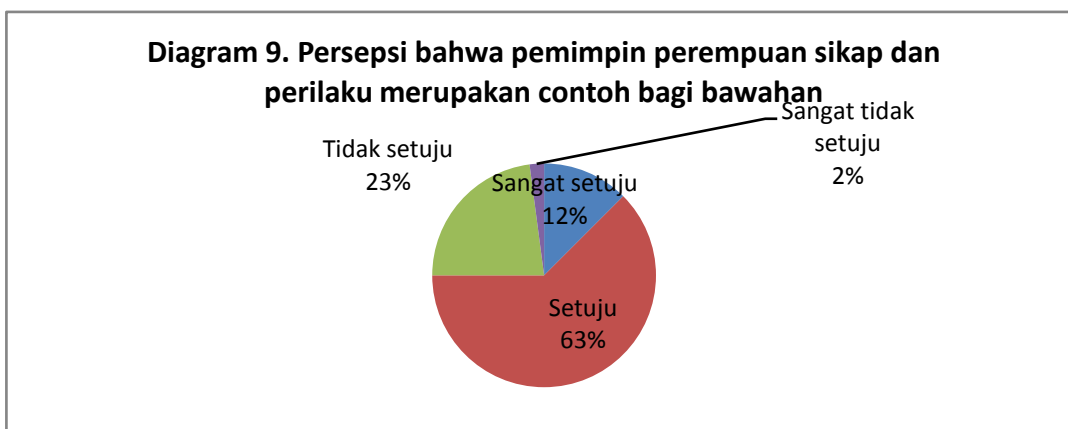
Kecenderungan jawaban yang menyatakan “sangat setuju” dan “setuju” adalah 52 persen sedangkan jawaban yang menyatakan “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” adalah 48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang positif bahwa pemimpin perempuan memiliki kemampuan di berbagai bidang, namun dari komposisi jawaban yang tidak terlalu berbeda menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang.



Berdasarkan diagram di atas, dapat terlihat bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan bahwa pemimpin

perempuan memiliki kemampuan komunikasi yang baik adalah sebanyak 73 persen menyatakan “setuju” dan 12 persen menyatakan “sangat setuju”. Sementara jawaban responden yang menyatakan “tidak setuju” adalah sebanyak 15 persen dan tidak ada responden yang menjawab “sangat tidak setuju”.

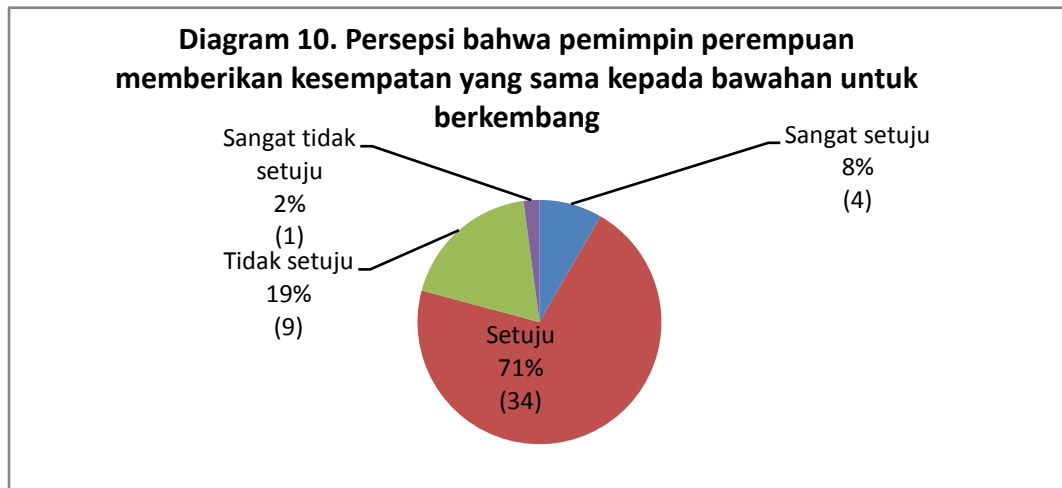
Kecenderungan jawaban yang menyatakan “sangat setuju” dan “setuju” adalah 85 persen sedangkan jawaban yang menyatakan “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” adalah 15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang positif bahwa pemimpin perempuan memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan baik. Pada umumnya memang perempuan dianggap lebih luwes dalam menjalankan kepemimpinannya karena dianggap memiliki kepekaan rasa yang lebih tinggi dibandingkan pemimpin laki-laki.



Berdasarkan diagram di atas, dapat terlihat bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan bahwa pemimpin perempuan memiliki sikap dan perilaku yang menjadi contoh bagi bawahan adalah sebanyak 63 persen menyatakan “setuju” dan 12 persen menyatakan “sangat setuju”. Sementara jawaban responden yang menyatakan “tidak setuju” adalah sebanyak 23 persen dan 2 persen responden yang menjawab “sangat tidak setuju”. Kecenderungan jawaban yang menyatakan “sangat setuju” dan “setuju” adalah 75 persen sedangkan jawaban yang



menyatakan “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” adalah 25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang positif terhadap pemimpin perempuan yang memiliki sikap dan perilaku yang menjadi contoh bagi bawahannya, selain itu memang seorang pemimpin wajib memiliki keteladanan dalam berperilaku.

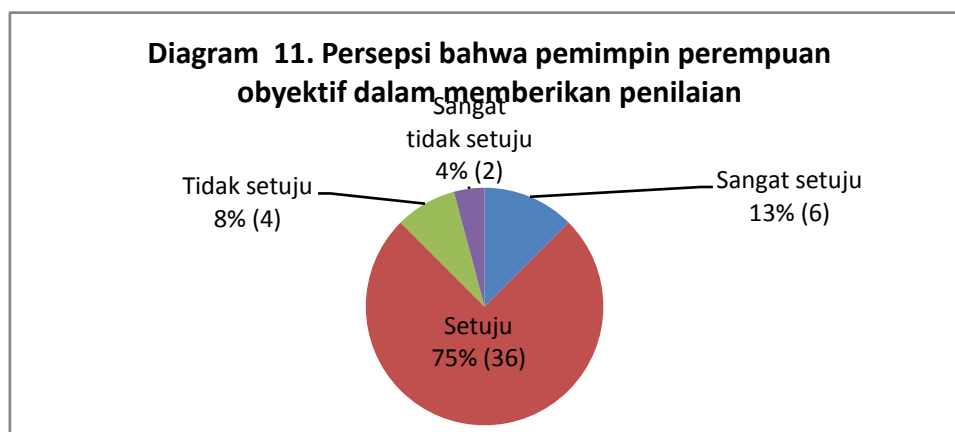


Dari diagram di atas diperoleh gambaran bahwa sebagian besar yaitu sebanyak 34 orang atau 71 % pegawai dengan persepsi bahwa pemimpin perempuan memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk berkembang, 9 orang pegawai atau 19 % menyatakan tidak setuju dengan persepsi bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk berkembang. Persepsi tersebut didasarkan pada bahwa masih ada pegawai yang baik dosen maupun staf yang karirnya agak terhambat. Sebenarnya hal ini tidak hanya berdasarkan pada sikap adil tidaknya pemimpin tetapi ada beberapa faktor , yaitu data base yang tidak lengkap. Sehingga dasar penunjukkan orang yang mengikuti pelatihan dan lain-lain, didasarkan pada pengetahuan yang terbatas. Jadi seringkali ada saja pegawai yang terlewat untuk mengikuti satu pelatihan. Jadi untuk mengembangkan diri pegawai juga harus aktif mencari tahu dan mengikuti pelatihan, kegiatan seperti seminar dan

symposium atas inisiatif sendiri. Faktor lain adalah anggaran yang terbatas, sehingga kadang untuk mengikuti suatu kegiatan harus urut kacang.

Dari diagram juga diperoleh gambaran bahwa ada 4 orang pegawai atau 8 % pegawai yang sangat setuju dengan persepsi bahwa pemimpin perempuan memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk berkembang. Hanya 1 orang pegawai atau 2% yang sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Hasil penelitian yang menjelaskan bagaimana persepsi pegawai terhadap keobjektifan pemimpin perempuan di FISIP Untirta dapat dilihat dari diagram berikut ini:

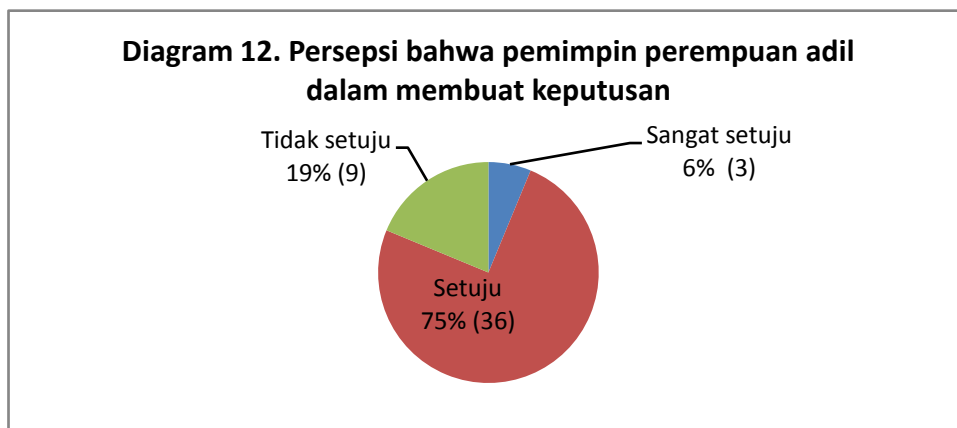


Dari diagram tersebut dapat digambarkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 36 orang atau 75% setuju dengan persepsi bahwa pemimpin perempuan obyektif dalam memberikan penilaian kepada bawahannya. Hal ini ini juga diperkuat dengan pernyataan 6 orang responden yang sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Jadi tidak benar jika ada pernyataan bahwa pemimpin perempuan lebih mengutamakan perasaan ketimbang logika.

Terdapat 4 orang pegawai atau 8% yang menyatakan tidak setuju dan 2 orang pegawai atau 4 % menyatakan sangat tidak setuju dengan persepsi bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta obyektif dalam memberikan penilaian kepada

bawahannya. Ketidak obyektifan dalam penilaian dapat disebabkan oleh sistim evaluasi yang tidak baku, indikator tidak disarkan pada kinerja tetapi lebih pada loyalitas. Contohnya adalah DP3 dimana instrument yang tercantum hanyalah lebih bersifat niali-nilai atau norma-norma seperti kesetiaan, kejujuran. Dan terdapat kecenderungan bahwa isi dari DP3 setiap pegawai sama dan harus meningkat setiap tahunnya. Setiap pegawai disama ratakan penilaiannya, padahal ada beberapa pegawai yang kinerjanya buruk.

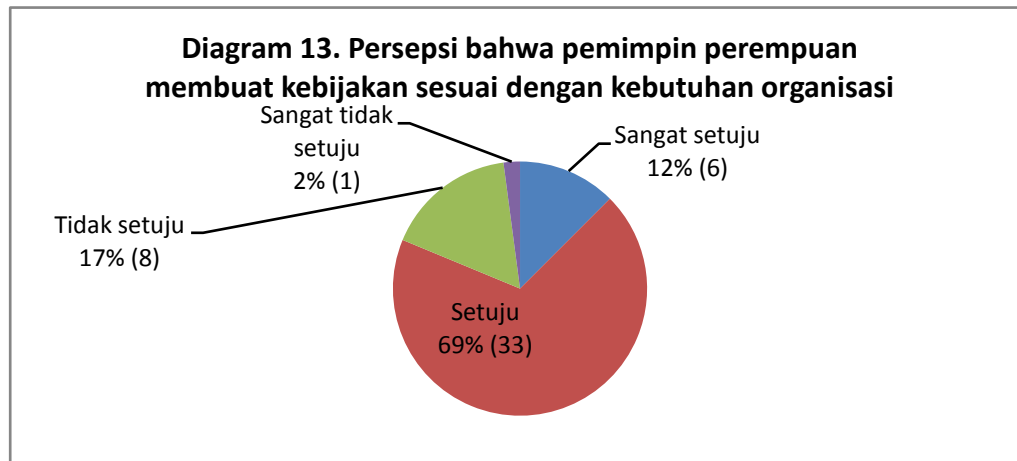
Untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai atas keadilan dalam membuat keputusan, dapat dilihat dari diagram berikut :



Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yaitu 36 orang atau 75 % setuju dan 3 orang responden atau 6% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan yang mempersepsikan bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta adil dalam membuat keputusan. Setiap pemimpin harus bersikap adil kepada bawahan, begitu pula dalam mengambil keputusan tidak boleh ada pihak yang dirugikan, karena sikap tidak adil dapat mengurangi motivasi kerja karyawan. Terdapat 19 responden atau 9 % responden yang tidak setuju dengan pernyataan yang mempersepsikan bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta adil dalam membuat keputusan. Adil dan bermanfaat atau tidaknya suatu keputusan, didasarkan pada informasi yang cukup.

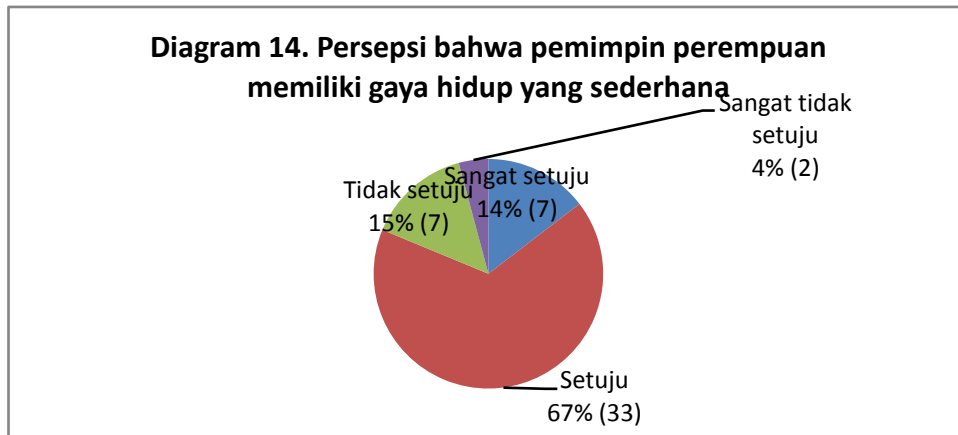
Keterbatasan informasi seperti data yang tidak ada dapat membuat sebuah keputusan dirasakan tidak adil oleh sebagian pihak.

Persepsi pegawai bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat dilihat pada diagram berikut ini :



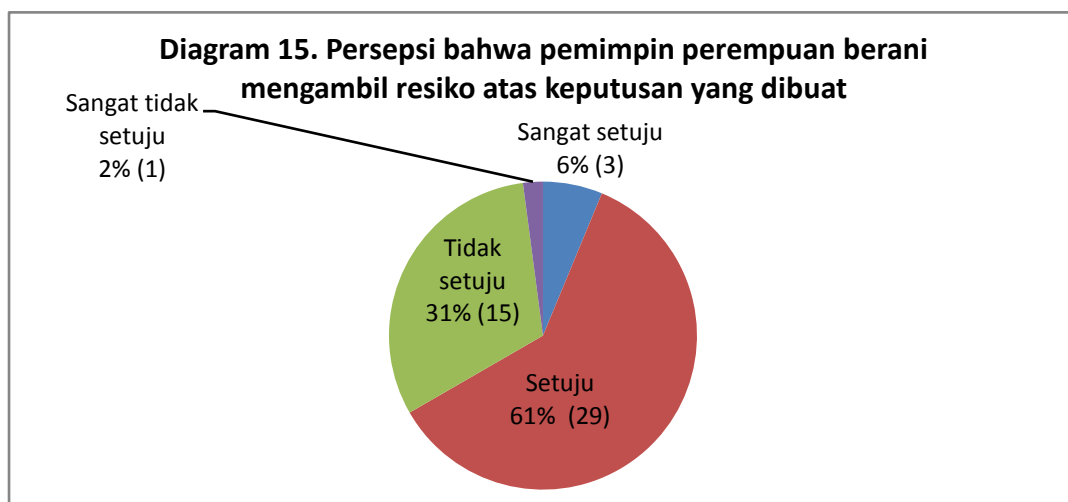
Dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar yaitu sebanyak 33 orang responden atau 69% responden setuju dan 6 orang responden sangat setuju dengan pernyataan yang mempersepsikan bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini disebabkan koordinasi yang dibangun oleh pemimpin dan penyerahan kewenangan pada unit-unit organisasi di FISIP Untirta untuk mengajukan program kerja setiap akhir tahun. Terdapat 8 orang responden atau 17% yang tidak setuju dan 1 orang responden atau 2% yang sangat tidak setuju dengan pernyataan yang mempersepsikan bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini disebabkan karena seringkali program yang diajukan tidak mendapatkan persetujuan dari pihak universitas atau terpaksa harus dipangkas karena keterbatasan anggaran.

Persepsi bahwa Pemimpin perempuan memiliki gaya hidup yang sederhana, dapat dilihat dari diagram berikut :



Dari diagram tersebut dapat digambarkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 33 orang responden atau 67 % responden setuju dan 7 responden atau 14% responden sangat setuju dengan pernyataan yang mempersepsikan bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta memiliki gaya hidup yang sederhana . Sedangkan 7 orang responden atau 15% responden tidak setuju dan 2 orang responden atau 4% responden sangat tidak setuju dengan pernyataan yang mempersepsikan bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta bergaya hidup sederhana.

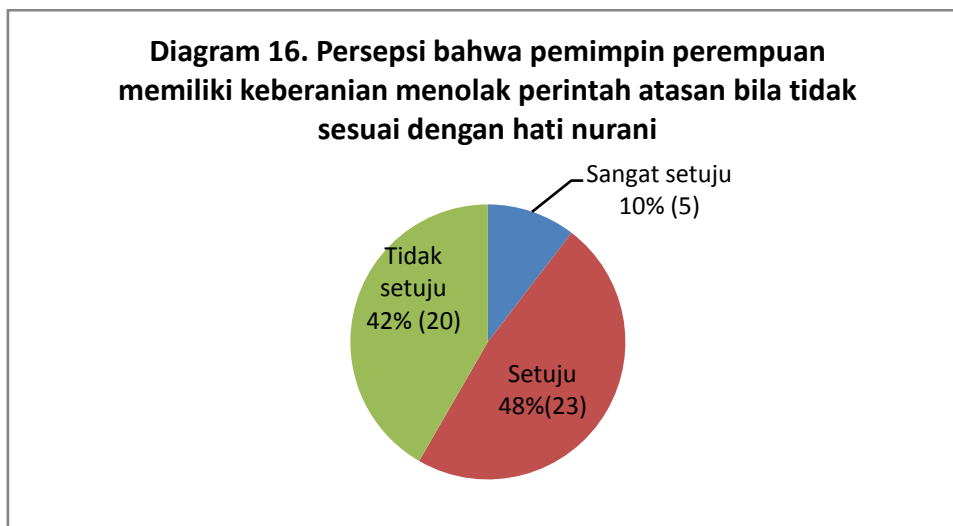
Persepsi yang menyatakan bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta berani mengambil resiko atas keputusan yang dibuat, dapat dilihat dari diagram berikut :



Dari diagram tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 29 orang responden atau

61 % responden setuju dan 3 orang responden atau 6% responden sangat setuju dengan pernyataan yang mempersepsikan bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta berani mengambil resiko atas keputusan yang dibuat. Sedangkan 15 orang responden atau 31% responden tidak setuju dan 1 orang responden atau 2% responden sangat tidak setuju dengan pernyataan yang mempersepsikan bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta berani mengambil resiko atas keputusan yang dibuat.

Persepsi yang menyatakan bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta memiliki keberanian untuk menolak perintah atasan apabila tidak sesuai dengan hati nurani, dapat dilihat pada diagram berikut ini :

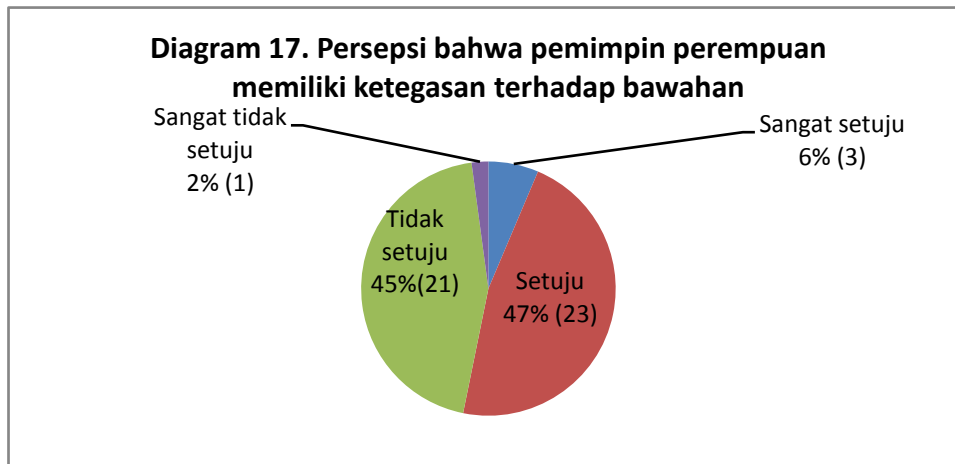


Dari diagram tersebut dapat dipersepsikan bahwa bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta masih belum berani menolak perintah atasan apabila tidak sesuai dengan hati nurani, hal ini dilihat dari jumlah responden yang tidak setuju terhadap pernyataan tersebut cukup banyak, yaitu 20 orang atau sekitar 42 %. Sedangkan responden yang setuju 23 orang atau 48% dan yang sangat setuju sebanyak 5 orang atau 10%.

Walaupun jumlah responden yang setuju masih lebih banyak dengan yang tidak setuju, tetapi hal ini dapat menunjukkan masih banyak pegawai yang berpersepsi bahwa

pemimpin perempuan di FISIP yang tidak berani menolak perintah dari atasan, walaupun tidak sesuai dengan hati nurani.

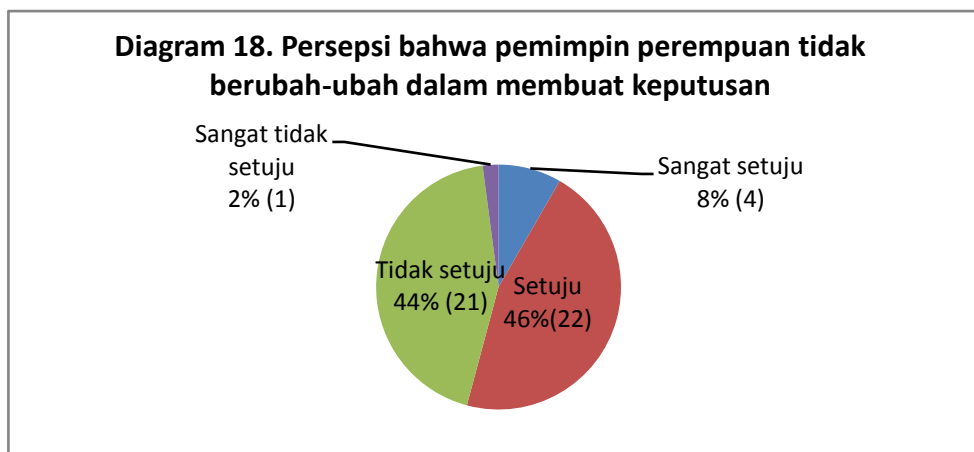
Persepsi yang menjelaskan bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta memiliki ketegasan terhadap bawahan dapat dilihat pada diagram berikut :



Dari diagram tersebut di atas dapat digambarkan masih banyak pegawai yang mempersepsikan bahwa pemimpin perempuan tidak memiliki ketegasan terhadap bawahannya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang tidak setuju dan yang sangat tidak setuju terhadap pernyataan yang mempersepsikan bahwa pemimpin perempuan memiliki ketegasan terhadap bawahannya.

Dari 48 responden, 21 orang responden atau 45 % setuju, 1 orang responden atau 2% sangat tidak setuju dengan pernyataan yang mempersepsikan bahwa pemimpin perempuan memiliki ketegasan terhadap bawahannya. Sedang 23 orang atau 47 % responden setuju dan dan 4 orang atau 8 % responden menyetujui bahwa pemimpin perempuan juga memiliki ketegasan terhadap bawahannya.

Persepsi yang menyatakan bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta tidak berubah ubah dalam membuat keputusan , dapat dilihat pada diagram berikut :



Dengan melihat diagram di atas , maka dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap Pemimpin perempuan di FISIP Untirta dalam mengambil keputusan tidak berubah-ubah masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang tidak setuju 21 orang atau 44%, dan yang sangat tidak setuju 1 orang responden. Sedangkan yang setuju sebanyak 22 orang dan 4 responden atau 8 % mempersepsikan bahwa pemimpin perempuan di FISIP Untirta dalam mengambil keputusan tidak berubah-ubah.

### **Simpulan dan Saran**

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa persepsi pegawai di FISIP Untirta dapat dikatakan baik yaitu sebesar 70,86 persen. Hal ini disebabkan karena pemimpin perempuan di FISIP mempunyai kemampuan dan tanggung jawab dalam pekerjaannya, memiliki perilaku yang dapat dijadikan contoh dan bersikap adil. Saran yang diberikan adalah agar pemimpin perempuan di FISIP memiliki ketegasan pada bawahan, memiliki banyak informasi dalam pembuatan keputusan sehingga keputusan yang dibuat adil dan sesuai dengan kebutuhan.



## Daftar Pustaka

Gibson, Donnelly dan Ivancevich, 1996, Manajemen Edisi ke 9  
Jilid 1, Erlangga, Jakarta

Keban, Yeremias T, 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi  
Publik, Konsep, Teori dan Isu, Gavamedia,  
Yogyakarta

Robbins, Stephen P, 1994, Teori Organisasi, Struktur, Desain  
dan Aplikasi, Arcan , Jakarta

Sumiarni, E, (2004), Jender dan Feminisme, Yogyakarta:  
*Wonderful Publishing Company*

Wibowo,I.,dkk. 2000. Psikologi Sosial. Universitas Terbuka.  
Jakarta

Winardi, J, 2003, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, Raja  
Grafindo Persada, Jakarta



## **WEBSITE USABILITY PROVINSI BANTEN**

*Oleh: Anis Fuad*

### **Pendahuluan**

Meningkatnya penggunaan teknologi Internet khususnya di masyarakat dan pemerintahan menjadikan posisi ICT memiliki potensi untuk mengubah secara mendasar bagaimana organisasi pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Internet memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada warganya melalui *website*. *Website* pemerintah menyediakan platform untuk komunikasi yang efisien dan memberikan akses informasi ke publik. Internet memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah lebih mudah. Konsep ini disebut *E-government* yang didefinisikan sebagai "penggunaan teknologi informasi (TI) oleh organisasi sektor publik" (Heeks, 2006:4)

Implementasi *E-Government* dapat dilihat dari empat tahap yaitu, yaitu: (1) tahap kehadiran (*presence*), (2) tahap interaksi (*interaction*), (3) transaksi online (*transaction*) dan (4) Transformasi (*transformation*) portal pemerintah yang komprehensif (Baum dan Di Maio, 2000). Tahap pertama melibatkan pengembangan situs web pemerintah untuk memberikan informasi kepada warga negara (*citizen*). Tahap kedua berfokus pada pembangunan sebuah platform untuk

interaksi antara warga dan pemerintah. Alat seperti formulir pengajuan elektronik dan forum diskusi dibuat pada fase ini. Tahap ketiga bertujuan menciptakan alat web untuk memfasilitasi transaksi layanan pemerintah, seperti pengadaan elektronik. Tahap terakhir melibatkan integrasi sistem pemerintah untuk berbagi sumber daya. Dari empat tahap itu isu *Website Usability* pemerintah sangat relevan dengan tahap satu dan dua dari pelaksanaan situs web pemerintah.

Menurut Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO), kegunaan dari pengukuran *Website Usability* adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu produk, perangkat lunak atau sebuah situs web, dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektivitas, efisiensi dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu (ISO, 1998). *Website Usability* memiliki posisi penting untuk organisasi swasta maupun publik karena *website* menjadi gambaran apakah komunikasi antara pengguna dan organisasi efektif atau tidak. *Website Usability* secara umum ingin mengetahui mengenai kejelasan *website*, kesederhanaan, konsistensi dan kemudahan bagi pengguna untuk menggunakannya (Cappel & Huang, 2007).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis aspek *usability* yang mempengaruhi sikap penerimaan masyarakat terhadap portal/website pemerintah. Manfaat keberadaan portal/website pemerintah diukur berdasarkan parameter-parameter kepuasan masyarakat terhadap *website* pemerintah tersebut. Kecenderungan sikap penolakan atau penerimaan terhadap portal/website pemerintah melalui kegiatan survey diharapkan dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan portal/web pemerintah yang dinilai di kemudian hari.

Adapun *portal/website* yang akan dinilai adalah *website* Pemerintah Provinsi Banten. Mengapa dipilih portal/website Pemerintah Provinsi Banten karena berdasarkan indikator

tahapan implementasi *e-government*, *portal/website* di Pemerintahan Provinsi Banten dapat dikatakan dalam tahap dua. Ini sangat relevan jika *portal/website* di Provinsi Banten dapat diukur melalui *Website Usability*.

Dengan demikian, dengan jelas bahwa tujuan dari pengukuran *Website Usability* di Pemerintah Provinsi Banten untuk mengetahui dan mengukur kualitas web maupun kepuasan masyarakat terhadap *website* pemerintah Provinsi Banten. Sedangkan target luaran yang didapat adalah adanya proses perbaikan kualitas *portal/website* pemerintah Provinsi Banten didasarkan pada hasil penelitian ini. Sehingga tujuan pelayanan yang efektif dan efisien lewat *e-government* di Banten dapat tercapai.

## **Tinjauan Pustaka**

### ***Website Usability***

Asiimwe dan Lim (2010) mengatakan *Website Accessibility* dan *Usability* mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan web dan meningkatkan kepuasan pengguna. Banyak penelitian sebelumnya berfokus pada aksesibilitas meskipun kedua konsep tersebut kelengkapan desain filosofisnya saling tumpang tindih (Alexander, 2006). Fokus utama dari aksesibilitas adalah bagaimana orang-orang penyandang cacat mendapatkan akses, sedangkan *Website Usability* berfokus pada unsur-unsur *learnability*, *memorability*, efisiensi efektivitas, dan kepuasan untuk semua pengguna situs web (Henry, 2002). *Usability* bertujuan untuk memuaskan para pengguna-alasan mengapa konteks budaya pengguna yang dipertimbangkan saat merancang situs web dapat digunakan (Hillier, 2003). Karena aksesibilitas adalah subset dari *usability*, *usability* merupakan aspek penting dalam pengembangan situs web pemerintah.

Dengan meningkatnya posisi penting *website* sebagai alat komunikasi, banyak penelitian telah dilakukan untuk

mengevaluasi kegunaan dari situs-situs organisasi swasta maupun publik. *Website Usability* juga menjadi masalah bagi pengembangan *e-government*. Meskipun pedoman internasional tentang pengembangan halaman web yang disediakan oleh world Wide Web Consortium (W3C, 2009) ditujukan untuk membantu administrator situs mengembangkan website agar mudah digunakan. Namun pedoman ini tidak sering diikuti (Gwardak & Pahlstorp 2007).

Mengapa *website*, kebanyakan studi yang ada mengevaluasi negara atau portal pemerintah kota, hal tersebut untuk mengetahui sampai tahap mana implementasi *e-government* di berbagai negara. Namun beberapa studi memeriksa situs pemerintah lainnya. West (2008) melakukan analisis yang komprehensif dari 1.667 *website* pemerintah di 198 negara menggunakan 18 langkah-langkah yang fokus pada jumlah informasi yang tersedia dan sejauh mana interaksi dengan pengguna, seperti personalisasi *website* dan update informasi serta respon menjawab email.

### ***Pengukuran Website Usability***

Setelah melakukan kajian tentang *usability* secara umum, maka selanjutnya perlu dilakukan kajian bagaimana melakukan pengukuran *usability* pada *website*. Secara umum kriteria yang menentukan bahwa sebuah *website usable* (memiliki tingkat *usability* yang tinggi), adalah apabila pengguna bisa menemukan atau memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mengerti dari *website* tersebut (U.S. Department of Health & Human Services : 2011)

Menurut Nielsen (1994) dikutip Proyoga dan Senses (2009), Ada 5 syarat yang harus dipenuhi agar suatu *website* mencapai tingkat *usability* yang ideal, yaitu:

1. *Learnability*

Ukuran bagi pengguna dalam memahami kebiasaan mengunjungi suatu *website*, mengetahui alasan mengakses dan mengidentifikasi yang dicari.

2. *Efficiency*

Situs yang efisien dapat menyajikan informasi dengan cepat.

3. *Memorability*

Ukuran bagi pengguna, sehingga *website* akan mudah diingat. Bila *website* banyak dilakukan perubahan, maka pengunjung akan memerlukan waktu untuk menyesuaikan dan mempelajarinya kembali.

4. *Errors*

Menghindari adanya *link* yang tidak berfungsi (*broken link*) atau halaman *web* yang masih dalam proses pembuatan (*under construction*).

5. *Satisfaction*

Kepuasan adalah hal yang paling diinginkan oleh setiap pengguna. Pengunjung menginginkan situs dapat dengan mudah digunakan dan dipelajari. Selain itu mereka ingin bisa menemukan apa yang dicari dengan cepat, mengetahui di mana mereka berada dan bisa pergi ke mana saja dalam sebuah situs.

Dalam penelitian lain, Dix (1993) dikutip Prayoga dan Sensus (2009) menyampaikan 4 kriteria dalam melakukan kajian *Usability*. Keempat kriteria tersebut adalah *Effectiveness*, *Efficiency*, *Satisfaction* dan *Learnability*. Lebih lanjut Abran dkk. (2000) dikutip Prayoga dan Sensus (2009) bahwa lembaga *International Standard Organization* (ISO) kemudian melakukan konsolidasi pengukuran *Usability* dengan melihat pada kriteria pengukuran *Usability* Dix (1993), Nielsen (1994), standar ISO 9126 & ISO 14598 (*Usability* berorientasi pada *product*) dan standar ISO 9241 & ISO 13407 (*Usability* berorientasi pada proses). Hasil konsolidasi tersebut, melahirkan suatu model

konsolidasi *Usability*, dengan 5 parameter pengukuran yaitu *effectiveness, efficiency, satisfaction, learnability, security*.

Proyoga dan Sensuse (2009) menjelaskan bahwa baik *Usability Model* yang dikeluarkan oleh lembaga standar ISO, Dix (1993) dan Nielsen (1994), seluruhnya menyimpulkan perlunya pengukuran terhadap kepuasan pengguna sebagai bagian dari parameter *Usability*. Hal ini menarik perhatian peneliti, terlebih lagi setelah ditemukannya penelitian lebih lanjut terkait kepuasan pengunjung *website* dalam konteks *Usability*. Palmer (2002) yang kemudian dikenal sebagai pakar dalam *Human-Computer Interaction*, pada tahun 2002 telah berhasil mengembangkan konstruk untuk *Usability website* sebagai berikut:

1. Selang waktu penerimaan data (*Download Delay*)

Parameter yang diukur : kecepatan awal akses dan kecepatan tampilan antar halaman.

2. Pengelolaan Navigasi Halaman (*Navigation / Organization*)

Parameter yang diukur : Pengaturan, Urutan Halaman, *Links, Layout* dan pengelolaan dan penempatan Navigasi.

3. Interaktivitas (*Interactivity*)

Parameter yang diukur : Kustomisasi halaman *web* dan Interaktivitas.

4. Responsivitas (*Responsiveness*)

Parameter yang diukur : fasilitas *Feedback* dan FAQ.

5. Informasi Materi *website* (*Information / Content*)

Parameter yang diukur : Jumlah informasi, keragaman informasi, jumlah kata dan kualitas materi *website*.

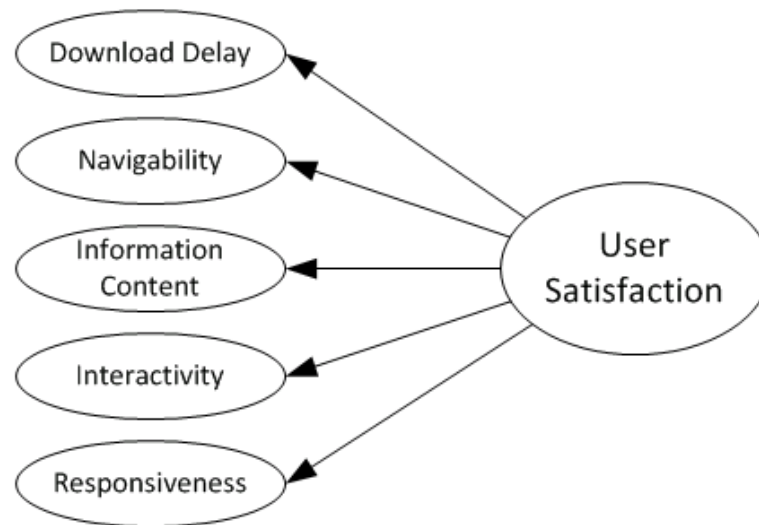
6. *Website* yang berhasil (*User Satisfaction*)

Parameter yang diukur : Kepuasan pengguna, keinginan untuk mengakses kembali *website* dan frekuensi mengakses *website*.

Dari keenam konstruk tersebut, Palmer (2009) dikutip Proyoga dan Sensuse (2009) menggambarkan kaitannya dalam



suatu model penelitian untuk *Usability* sebagaimana pada Gambar 2.1 dibawah ini:



**Gambar 2.1.** Model *Usability* Palmer dikutip Prayoga dan Sensuse (2009)

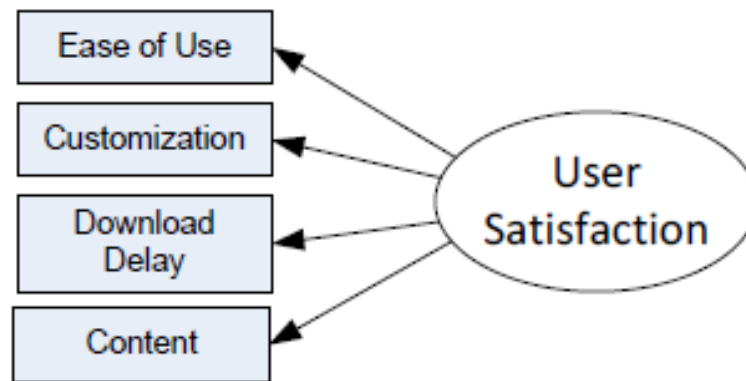
Lebih lanjut, Prayoga dan Sensuse (2009) mencatat bahwa Agarwal dan Venkatesh (2002) memperkenalkan konsep pengukuran *Usability* berdasarkan pendekatan yang dikeluarkan oleh Microsoft *Usability Guideline*. Pada penelitiannya, mereka menyusun kategori dan sub-kategori *usability* dengan skema pembobotan (*weights*) dan pemeringkatan (*rating*). Model Penelitian Agarwal dan Venkatesh (2002) tersebut, cukup banyak dijadikan referensi sebagai pembanding dengan model penelitian lainnya, khususnya dalam kajian *usability*. Beberapa di antaranya adalah Green dan Pearson (2009) yang melakukan perbandingan model Agarwal dan Venkatesh dengan model Palmer melalui metoda *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa hasil CFA model Palmer yang lebih memenuhi standar yang direkomendasikan.

Proyoga dan Sensuse (2009) mengungkapkan bahwa dalam penelitian lanjutan Green dan Pearson ditahun 2008, mereka melakukan kajian dengan membandingkan Model Penelitian *Usability* Palmer dan Model Penelitian Agarwal dan

Venkatesh terhadap suatu *website*. Dari kesimpulan yang dicapai pada penelitian kedua, Green dan Pearson (2009) merumuskan 4 dimensi terbaik untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap suatu *website*, yaitu dengan menentukan variabel pengukuran yang dinilai memiliki nilai yang lebih kuat (*robust*) namun sangat sesuai (*parsimonious*). Keempat variabel pengukuran tersebut adalah :

1. Kemudahan (*Ease of Use*)
2. Personalisasi (*Customization*)
3. Kecepatan Akses pada Aplikasi (*Download Delay*)
4. Informasi (*Content*)

Keempat konstruk inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan Prayoga dan Sensuse (2009) untuk dilakukan pengujian pada *website* Aplikasi di PT. Telkom. Bagi peneliti upaya mengkompilasi teori yang dilakukan Prayoga dan Sensuse dapat menjadi dasar teoritik dalam penelitian *Website Usability* di *website* pemerintahan yang dilakukan peneliti yaitu *Website Usability* Pemerintah Provinsi Banten. Dari penelitian tersebut, Prayogo dan Sensuse (2009) menyimpulkan bahwa selain didapat empat konstruk yang memberikan nilai signifikan terhadap validitas pengujian, juga didapat suatu model penelitian yang menyimpulkan bahwa kepuasan pengguna (*User Satisfaction*) dalam mengakses *website* menjadi variabel endogen yang dapat mendorong pengunjung untuk mengakses kembali *website* tersebut. Pada Gambar 2.2 disajikan model penelitian Green dan Pearson (2009) sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait *usablility*.



**Gambar 2.2.** Model Penelitian Green and Pearson (2009) dikutip Prayoga dan Sensuse (2009)

### Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemanfaatan (*Usability*) suatu *website* Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan pendekatan survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel secara langsung dari populasi. Untuk mempermudah proses penilaian maka populasi didasarkan pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah *electronic government* di FISIP Untirta. Penelitian ini akan melakukan uji hipotesis karena bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh (sebab-akibat/kausalitas) dari dua atau lebih fenomena.

Penelitian ini setidaknya ingin menjawab beberapa hipotesis beberapa variabel diantaranya:

- 1) Melihat Pengaruh EOU (Ease of Use), CUST (Customization) , DD (Download Delay) dan CONT (Content) secara gabungan terhadap kepuasan/ Satisfaction (SAT)
- 2) Pengaruh EOU, CUST, DD dan CONT secara parsial terhadap kepuasan (SAT)

Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa FISIP Untirta yang mengontrak mata kuliah *E-Government* dengan pertimbangan bahwa para mahasiswa setelah memahami

secara teoritis tentang *Website Usability* maka mereka dapat menilai *website* pemerintah yang diuji dengan objektif.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel jenuh di mana sampel sama besarnya dengan jumlah populasi. Dalam hal ini ada 68 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah *e-government* yang akan mengisi kuesioner. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode survei kuesioner dengan meminta responden mengunjungi *website* pemerintah Provinsi Banten dengan alamat situs <http://bantenprov.go.id>, kemudian menilai *website* tersebut dengan mengisi kuesioner secara online yang disediakan peneliti. Survei dilakukan untuk mendapatkan umpan balik atas persepsi pengguna terhadap *website* Pemerintah Provinsi Banten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari kuesioner yang disajikan secara *online* pada forum kelas virtual (*virtual class*) *e-government* yang dilakukan Peneliti.

### ***Variabel Penelitian***

Variabel menurut Silalahi (2010) suatu konsep atau konstruk yang memiliki variasi (dua atau lebih) nilai. Variabel adalah sebuah karakteristik dimana dapat membedakan dua atau lebih kategori. Nilai tersebut dapat berbeda untuk waktu yang berbeda meskipun ditujukan pada objek atau orang yang sama.

Model sebab akibat (*causal modeling*) atau disebut juga analisis jalur (*path analysis*), yang menyusun hipotesa hubungan-hubungan sebab akibat (*causal relationships*) diantara variabel-variabel dan menguji model-model sebab akibat (*causal models*) dengan menggunakan sistem persamaan linier. Model-model sebab akibat dapat mencakup variabel-variabel manifest (indikator), variabel-variabel laten atau keduanya. Model

analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Structural Equation Model (SEM)*, maka variabel yang digunakan meliputi variabel eksogen, variabel indikator (variabel terukur/ *measured variable / observed variable*), dan variabel endogen.

Konstruk	Indikator	Kode
<i>Ease of Use</i>	Struktur Penyajian	X1
	Kemudahan akses	X2
	Kejelasan penyajian Informasi	X3
<i>Customization</i>	Materi yang menarik	X4
	Personalisasi	X5
<i>Download Delay</i>	Kecepatan Menemukan Informasi	X6
	Kontrol terhadap Materi	X7
<i>Content</i>	Spesifikasi Informasi	X8
	Pemenuhan Kebutuhan	X9
	Kecukupan Materi	X10
<i>Satisfaction</i>	Kenyamanan	Y1
	Keinginan untuk terus mengakses website	Y2

**Tabel 3.1.** Definisi Konstruk Variabel Penelitian, dikutip dari Prayoga dan Sensuse (2009))

### *Instrumen Penelitian*

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala Guttman, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang dengan memberi skor kepada masing-masing alternatif jawaban. Prosedur pengukurannya adalah responden diminta untuk menyatakan persetujuannya atas dasar persepsi masing-masing responden. Jawaban terdiri dari 2 pilihan, yaitu: ya atau tidak. Pemberian nilai (*scoring*) dilakukan untuk jawaban ya adalah nilai 2 dan tidak dengan nilai 1.

### *Teknik Analisis Data*

Dalam penelitian ini teknik analisis data akan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan model

analisis *Structural Equation Model* (SEM). Biasanya SEM dihitung dengan menggunakan software LISREL atau AMOS. Hendry (2012) maupun Sarwono (2012) mengatakan *Structural equation modeling* (SEM) merupakan teknik statistik yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model-model sebab akibat. SEM sebenarnya merupakan teknik hibrida yang meliputi aspek-aspek penegasan (*confirmatory*) dari analisis faktor, analisis jalur dan regresi yang dapat dianggap sebagai kasus khusus dalam SEM. Dalam Penelitian ini hanya akan dihitung analisis jalur (*path analysis*) dan regresi dengan menggunakan software SPSS (Sarwono, 2007).

## Hasil dan Pembahasan

### *Melihat Pengaruh EOU, CUST, DD dan CONT secara gabungan terhadap kepuasan (SAT)*

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS dari data yang dihimpun berdasarkan 68 responden, diperoleh Besarnya angka R Square ( $R^2$ ) adalah 0.415. Angka tersebut sebagai besarnya pengaruh EOU, CUST, DD dan CONT terhadap SAT dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD), dengan rumus:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0.415 \times 100\%$$

$$KD = 41,5\%$$

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.644 <sup>a</sup>	.415	.378	.64559

a. Predictors: (Constant), CONT, EOU, CUST, DD

Dengan demikian diperoleh hasil bahwa Pengaruh EOU, CUST, DD dan CONT secara gabungan terhadap kepuasan (SAT) adalah 41,5%. Adapun sisanya 58,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, variabel kepuasan yang dapat

diterangkan dengan menggunakan variabel EOU, CUST, DD dan CONT adalah sebesar 41,5% sedangkan pengaruh sebesar 58,5 disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar model ini.

Untuk mengetahui apakah model regresi diatas sudah benar atau salah, diperlukan Uji Hipotesis. Uji Hipotesis menggunakan angka F.

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.610	4	4.652	11.163	.000 <sup>a</sup>
	Residual	26.258	63	.417		
	Total	44.868	67			

a. Predictors: (Constant), CONT, EOU, CUST, DD

b. Dependent Variable: SAT

Ditentukan hipotesisnya berbunyi sebagai berikut:

H0: Tidak ada hubungan linier antara pengaruh EOU, CUST, DD dan CONT dengan SAT

H1: Ada hubungan linier antara pengaruh EOU, CUST, DD dan CONT dengan SAT

Langkah pengujian dilakukan dengan membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F tabel. Dihasilkan F Penelitian sebesar 11,163. F Tabel ditentukan dengan acuan Taraf signifikansi 0,05 dan DK (derajat Kebebasan), numerator = ketentuan jumlah variabel -1 atau 5-1 = 4; dan denominator: Jumlah Kasus-5, 68-5= 63. Ditemukan F tabel sebesar 2,53.

Kemudian ditentukan kriteria uji hipotesis sebagai berikut:

Jika F Penelitian > F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima

Jika F Penelitian < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak

11,163 > 2,53 → H0 ditolak dan H1 diterima artinya Ada hubungan linier antara pengaruh EOU, CUST, DD dan CONT dengan SAT.

## *Pengaruh EOU, CUST, DD dan CONT secara parsial terhadap kepuasan (SAT)*

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.182	.532		-.343	.733
EOU	.144	.097	.154	1.493	.141
CUST	.018	.156	.017	.118	.906
DD	.334	.105	.499	3.192	.002
CONT	.092	.099	.125	.921	.361

a. Dependent Variable: SAT

### 1. Hubungan antara EOU dan SAT

Perumusan masalah dalam kasus ini adalah Apakah ada hubungan Linear antara EOU dan SAT? dengan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>0</sub> : Tidak ada hubungan linear antara EOU dan SAT

H<sub>1</sub> : ada hubungan linear antara EOU dan SAT

Berdasarkan koefisien korelasi diatas ditemukan angka t penelitian sebesar 1,493. Sedangkan besar angka t tabel = taraf signifikansi 0,05 dan DK dengan ketentuan  $DK = n-2$  atau  $68-2 = 66$ , maka diperoleh t tabel sebesar 1,996.

Kriteria Uji Hipotesisnya sebagai berikut:

Jika t Penelitian > t tabel maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima

Jika t Penelitian < t tabel maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak

Dihasilkan uji hipotesis bahwa  $1,493 < 1,996$ . Dapat disimpulkan bahwa H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak dengan demikian tidak ada hubungan linear antara EOU dan SAT

Besarnya pengaruh EOU terhadap SAT adalah sebesar 0,154 atau 15,4% dianggap tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan angka signifikansi  $0.141 > 0.05$



## 2. Hubungan antara CUST dan SAT

Perumusan masalah dalam kasus ini adalah apakah ada hubungan Linear antara CUST dan SAT? dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Tidak ada hubungan linear antara CUST dan SAT

H1 : ada hubungan linear antara CUST dan SAT

Berdasarkan koefisien korelasi diatas ditemukan Angka t penelitian sebesar 0,118. Sedangkan besar angka t tabel = taraf signifikansi 0,05 dan DK dengan ketentuan  $DK = n-2$  atau  $68-2 = 66$ , maka diperoleh t tabel sebesar 1,996

Kriteria Uji Hipotesisnya sebagai berikut:

Jika t Penelitian  $>$  t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima

Jika t Penelitian  $<$  t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak

Dihasilkan uji hipotesis  $0,118 < 1,996$  dengan kesimpulan H0 diterima dan H1 ditolak dengan demikian tidak ada hubungan linear antara CUST dan SAT.

Besarnya pengaruh CUST terhadap SAT adalah sebesar 0,125 atau 12,5% dianggap tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan angka signifikansi  $0.906 > 0.05$

## 3. Hubungan antara DD dan SAT

Perumusan masalah dalam kasus ini adalah apakah ada hubungan Linear antara DD dan SAT? dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Tidak ada hubungan linear antara DD dan SAT

H1 : ada hubungan linear antara DD dan SAT

Berdasarkan koefisien korelasi diatas ditemukan Angka t penelitian sebesar 3,192. Sedangkan besar angka t tabel = taraf signifikansi 0,05 dan DK dengan ketentuan  $DK = n-2$  atau  $68-2 = 66$ , maka diperoleh t tabel sebesar 1,996

Kriteria Uji Hipotesisnya sebagai berikut:

Jika t Penelitian  $>$  t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima

Jika t Penelitian  $<$  t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak

Dihasilkan uji hipotesis  $3,192 < 1,996$  dengan kesimpulan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan demikian ada hubungan linear antara DD dan SAT.

Besarnya pengaruh DD terhadap SAT adalah sebesar 0,499 atau 49.9% dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan angka signifikansi  $0.002 < 0.05$

#### 4. Hubungan antara CONT dan SAT

Perumusan masalah dalam kasus ini adalah apakah ada hubungan Linear antara CONT dan SAT? dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak ada hubungan linear antara CONT dan SAT

$H_1$  : ada hubungan linear antara CONT dan SAT

Berdasarkan koefisien korelasi diatas ditemukan Angka t penelitian sebesar 0,921. Sedangkan besar angka t tabel = taraf signifikansi 0,05 dan DK dengan ketentuan  $DK = n-2$  atau  $68-2 = 66$ , maka diperoleh t tabel sebesar 1,996

Kriteria Uji Hipotesisnya sebagai berikut:

Jika t Penelitian  $>$  t tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

Jika t Penelitian  $<$  t tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

Dihasilkan uji hipotesis sebesar  $0,921 < 1,996$ . Kesimpulannya  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak dengan demikian tidak ada hubungan linear antara CONT dan SAT.

Besarnya pengaruh CONT terhadap SAT adalah sebesar 0,017 atau 1,7% dianggap tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan angka signifikansi  $0.361 > 0.05$

#### *Analisis Korelasi*

**Correlations**

		EOU	CUST	DD	CONT
EOU	Pearson Correlation	1	.121	.123	.330**
	Sig. (2-tailed)		.327	.317	.006
	N	68	68	68	68
CUST	Pearson Correlation	.121	1	.723**	.543**

	Sig. (2-tailed)	.327		.000	.000
	N	68	68	68	68
DD	Pearson Correlation	.123	.723**	1	.648**
	Sig. (2-tailed)	.317	.000		.000
	N	68	68	68	68
CONT	Pearson Correlation	.330**	.543**	.648**	1
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.000	
	N	68	68	68	68

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Kriteria Korelasi

- 0 – 0,25 = Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada)
- > 0,25 – 0,5 = Korelasi cukup kuat
- > 0,5 – 0,75 = Korelasi kuat
- > 0,75 – 1 = Korelasi sangat kuat

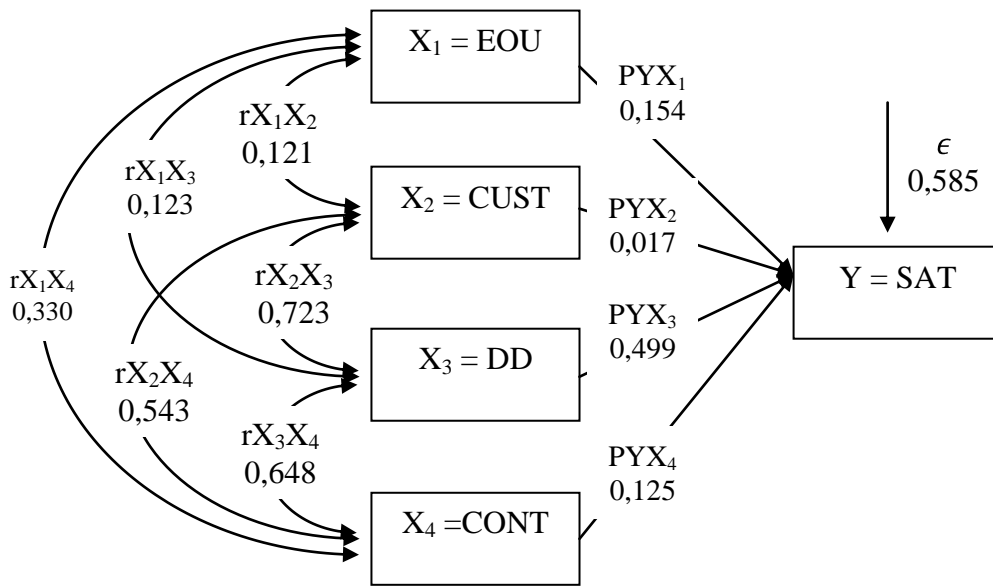
### Kriteria Signifikansi

Jika angka Sig. < 0,05 maka hubungan kedua variabel signifikan. Sebaliknya, jika angka sig. > 0,05 maka hubungan kedua variabel tidak signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat ditemukan analisis korelasi dan signifikansi antar variabel dibawah ini:

- a. Korelasi antara EOU dan CUST  
0,121 korelasi sangat lemah  
0,327 hubungan tidak signifikan
- b. Korelasi antara EOU dan DD  
0,123 korelasi sangat lemah  
0,317 hubungan tidak signifikan
- c. Korelasi antara EOU dan CONT  
0,330 korelasi cukup kuat  
0,006 hubungan signifikan
- d. Korelasi antara CUST dan DD  
0,723 korelasi kuat  
0,000 hubungan signifikan

- e. Korelasi antara CUST dan CONT  
0,543 korelasi kuat  
0,000 Hubungan signifikan
- f. Korelasi DD dan CONT  
0,648 korelasi kuat  
0,000 Hubungan signifikan

**Diagram Jalur**



Persamaan structural untuk diagram jalur di atas sebagai berikut:

$$Y = 0,154X_1 + 0,017X_2 + 0,499X_3 + 0,125X_4 + \epsilon$$

**Simpulan**

Dapat disimpulkan bahwa beberapa variabel yang mempengaruhi kepuasan pengunjung terhadap website pemerintahan Provinsi Banten dalam konsep *Website Usability* melalui kesimpulan berikut:

- a. Pengaruh variabel EOU terhadap SAT sebesar 0,154 atau 15,4%
- b. Pengaruh variabel CUST terhadap SAT sebesar 0,017 atau 1,7%

- c. Pengaruh variabel DD terhadap SAT sebesar 0,499 atau 49,9%
- d. Pengaruh variabel CONT terhadap SAT sebesar 0,125 atau 12,5%
- e. Pengaruh variabel EOU, CUST, DD, CONT secara gabungan terhadap SAT sebesar 0,415 atau 41,5%
- f. Pengaruh variabel-variabel lain diluar model analisis jalur ini sebesar 0,585 atau 58,5%
- g. Korelasi antara variabel EOU dan CUST sebesar 0,121
- h. Korelasi antara variabel EOU dan DD sebesar 0,123
- i. Korelasi antara variabel EOU dan CONT sebesar 0,648
- j. Korelasi antara variabel CUST dan DD sebesar 0,723
- k. Korelasi antara variabel CUST dan CONT sebesar 0,543
- l. Korelasi antara variabel DD dan CONT sebesar 0,330

Dengan demikian variabel *Download Delay* paling mempengaruhi terhadap Kepuasan/*Satisfaction* dibanding variabel lain. Sedangkan secara berturut *Ease of Use* (kemudahan) dan *Content* (isi) menjadi variabel yang ikut menentukan selain variabel *Download Delay*.

Sedangkan korelasi antar variabel yang paling besar ada pada korelasi variabel *Customization* (pengaturan) dan variabel *Download Delay* serta korelasi antara *Ease of Use* (Kemudahan) berkorelasi dengan variabel *Content* (isi). Dengan kata lain variabel *Ease of Use* (Kemudahan) dan *Content* (isi) yang memiliki tingkat pengaruh maupun korelasi yang sangat signifikan sebagai tanda bahwa masyarakat/pengguna lebih memperhatikan kemudahan dan isi ketimbang variabel lain. Oleh karena itu diharapkan dalam pengelolaan website pemerintah khususnya di Provinsi Banten perlu ditingkatkan aspek kemudahan maupun konten dalam pengelolaan web. Sedangkan aspek kecepatan akses dan pengaturan perlu diperbaiki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, R., & Venkatesh, V. 2002. "Assessing a Firm's Web Presence: A Heuristic Evaluation Procedure for the Measurement of Usability". *Information Systems Research*, 13, 2, 168-186, 2002
- Alain Abran, Adel Khelifi, Witold Suryn, Ahmed Seffah. 2000. "Consolidating the ISO Usability Models", *Journal of Departement de genie logiciel et des TI*, 2000
- Alexander, D. 2006. *Usability and Accessibility: Best friends or Worst enemies?* [http://www.valaconf.org.au/vala2006/papers2006/99\\_Alexander\\_Final.pdf](http://www.valaconf.org.au/vala2006/papers2006/99_Alexander_Final.pdf) diakses 13 Maret 2012
- Asimwe, Edgar Napoleon and Nena Lim. 2010. *Usability of Website in Uganda*, [www.ejeg.com/issue/download.html?idArticle=160](http://www.ejeg.com/issue/download.html?idArticle=160) diakses 13 Maret 2012
- Baum, Christopher and Di Maio, Andrea. 2000. *Gartner's Four Phases of E-Government Model*. Stamford, CT: Gartner
- Cappel, J. J. & Huang, Z. 2007. "A usability analysis of company websites", *The Journal of Computer Information Systems*, vol 48, no. 1, pp. 117-123.
- David T. Green, J Michael Pearson, "Confirmatory Factor Analysis of Two Web Site Usability Instruments", *Proceedings of the Third Annual Workshop on HCI Research in MIS*, Washington, D.C., December 10-11, 2004

- David T. Green, J. Michael Pearson. 2009. "The Examination of two web site usability instruments for use in B2C e-Commerce Organizations", *Journal of Computer Information Systems*.
- Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., and Beale, R. 1993. *Human-Computer Interaction*, Prentice-Hall: New Jersey
- Gwardak, L. & Pålhorstorp, L. 2007. *Exploring Usability Guidelines for Rich Internet Applications*. Masters' thesis. Department of informatics, Lund University, <http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOid=1336270&fileOid=1646468> diakses 13 Maret 2012
- Heeks, R. 2006. *Implementing and Managing eGovernment: An International Text*, Sage: London
- Hendry, *Structural Equation Modeling (SEM): Tutorial SEM dengan LISREL*, <http://teorionline.wordpress.com/research-methods/structural-equation-modeling-sem/> diakses 13 Maret 2012
- Henry, Shawn Lawton. 2002. *Understanding Web Accessibility*, [http://www.adobe.com/macromedia/accessibility/pub/acc\\_sites\\_chap01.pdf](http://www.adobe.com/macromedia/accessibility/pub/acc_sites_chap01.pdf) diakses 13 Maret 2012
- Hillier, M. 2003. "The role of cultural context in multilingual website usability", *Electronic Commerce Research and Applications*, vol. 2, no. 1, pp. 2-14
- ISO (International Organization for Standardization).1998. ISO 9241-11:1998(E)

- Nielsen, Jakob. 1994. "Guerrilla HCI: Using Discount Usability Engineering to Penetrate the Intimidation Barrier" [Online], [http://www.useit.com/papers/guerrilla\\_hci.html](http://www.useit.com/papers/guerrilla_hci.html), diakses 13 Maret 2012.
- Palmer, Jonathan W. 2002. "Web Site Usability, Design and Performance Metrics", *Information Systems Research*, pg 151; ABI/INFORM Global, June 2002
- Prayoga, Sigit Hadi dan Sensuse, Dana Indra. 2009. Analisis Usability Pada Aplikasi Berbasis Web Dengan Mengadopsi Model Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*), *Jurnal Sistem Informasi MTI-UI*, Volume 6, Nomor 1, ISSN 1412-8896 hal 647-3
- Sarwono, Jonathan. 2007. Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS, Penerbit Andi: Yogyakarta
- Sarwono, Jonathan. 2012. Teori SEM (*Structural Equation Model*) <http://www.jonathansarwono.info/sem/sem.htm> diakses 13 Maret 2012
- Silalahi, Ulber. 2010, Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama: Bandung
- U.S. Department of Health & Human Services. 2009. "Usability Basics", <http://www.usability.gov> Diakses 13 Maret 2012.
- W3C (World Wide Web Consortium) 2009. *W3C Web Standard Defines Accessibility for Next Generation Web*, <http://www.w3.org/2008/12/wcag20-pressrelease.html> diakses 13 Maret 2012



West, D. M. 2008. *Improving Technology Utilization In Electronic Government Around The World*, 2008. Governance Studies at Brookings.

Wijanto, Setyo Hari. 2008, *Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8 Konsep dan Tutorial*, Graha Ilmu: Jakarta





**Bantenisme** merupakan bagian dari buku serial Kebantenan yang diterbitkan oleh FISIP Untirta. Serial Pertama berjudul Bantenesia sudah terbit pada bulan Februari yang lalu menjadi awal dari serial Kajian Kebantenan. Kemudian dilanjutkan dengan Buku Bantenisme yang saat ini ada di tangan anda. Buku Bantenisme terdiri dari dua jilid. Buku yang sedang anda baca ini merupakan buku jilid ke-2 (dua) yang berisikan kumpulan tulisan hasil refleksi maupun hasil penelitian beberapa dosen yang ada di FISIP Untirta ini. Buku ini dipublikasikan juga dalam versi online yang tersajikan di situs [www.bantenisme.com](http://www.bantenisme.com). Buku Bantenisme Jilid 2, merupakan sebuah proses evolusi dan refleksi berfikir yang tidak akan berakhir. Buku ini merupakan proses pembelajaran yang membuka ruang diskusi terbuka bagi seluruh kalangan tentang apa dan bagaimana Banten serta perkembangannya.



**BANTENISME**  
JILID 2

Desain Cover:  
**Ridvan Maulana**  
ridvan@indosain.com

ISBN 978-602-97365-6-4 (no.jil lengkap)  
ISBN 978-602-97365-8-8 (jil.2)



9 786029 736588